



# ASEAN

## SELAYANG PANDANG

Edisi ke-22, Tahun 2017



Satu Visi  
Satu Identitas  
Satu Masyarakat

---

# ASEAN

## Selayang Pandang

Edisi ke-22, Tahun 2017

Satu **Visi**

Satu **Identitas**

Satu **Masyarakat**

—

Ilustrasi cover menggambarkan *landmarks* negara-negara anggota ASEAN, yaitu:  
Kuil Sastra (Vietnam), Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin (Brunei Darussalam), Shwedagon  
Pagoda (Myanmar), Menara Petronas (Malaysia), Patung Merlion (Singapura), Monumen  
Nasional (Indonesia), *Patuxai Arch* (Laos), Angkor Wat (Kamboja), *The Big Buddha*  
(Thailand), Katedral Manila (Filipina)

Penerbit:  
Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN,  
Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri

Hak Cipta dipegang oleh Kementerian Luar Negeri RI.  
Diperbolehkan mengutip isi buku dengan menyebutkan sumber.



---

# KATA PENGANTAR

---

“

Pada usia emas ASEAN semakin penting untuk menekankan bahwa Masyarakat ASEAN sungguh dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia.

Pada kesempatan ini, perkenalkan saya mengucapkan rasa syukur atas selesainya penyusunan buku ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-22 Tahun 2017. Buku ini merupakan revisi dari edisi sebelumnya yang memuat perkembangan kerjasama ASEAN saat ini.

Pembentukan ASEAN yang ditandai melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, didasarkan atas adanya kepentingan bersama secara timbal balik di antara negara-negara Asia Tenggara, dan atas keyakinan tentang perlunya memperkokoh solidaritas dan kerjasama regional dalam upaya mewujudkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Peran sentral ASEAN dalam arsitektur keamanan regional berkontribusi penting terhadap terciptanya perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Bagi ASEAN, pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan merupakan prioritas yang harus senantiasa diperjuangkan karena hal itu merupakan prasyarat bagi kelanjutan



pembangunan ekonomi dan kemakmuran kawasan.

Menginjak usia 50 tahun sejak didirikannya, kerjasama ASEAN bergerak semakin maju menuju tahapan penting, yaitu implementasi Masyarakat ASEAN. Pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan proses transformasi menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis serta saling peduli dan melindungi hak hasasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal.

Guna menjabarkan arah strategis ASEAN dalam satu dekade mendatang (2016-2025), pada KTT ASEAN ke-27, para Pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur

---

mengenai “ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama”. Deklarasi tersebut mengesahkan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru ketiga Pilar Masyarakat ASEAN 2025 untuk menggantikan Peta Jalan Menuju Masyarakat ASEAN (2009-2015) yang telah berakhir pada 31 Desember 2015. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan Masyarakat ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Pada usia emas ASEAN, semakin penting untuk menekankan bahwa Masyarakat ASEAN sungguh dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan dukungan dan partisipasi bersama di antara semua pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia agar ASEAN tidak bersifat eksklusif dan elitis, melainkan dapat menjadi organisasi yang bertumpu serta menjadi milik seluruh masyarakat (*people-centered and people-oriented organization*).

Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman dan rasa kepemilikan bersama di antara semua pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia mengenai arti penting dan manfaat Masyarakat ASEAN. Ditjen Kerja Sama ASEAN sebagai koordinator Setnas ASEAN-Indonesia dan lembaga terdepan dalam pelaksanaan kerja

sama ASEAN bertugas melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pemahaman tentang perkembangan kerja sama ASEAN kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui penerbitan Buku ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-22. Buku ini telah dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan ASEAN terkini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang menyeluruh tentang ASEAN. Diharapkan pula, informasi dalam buku ini dapat menggugah rasa memiliki terhadap ASEAN. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat secara optimal dalam ASEAN merupakan kunci utama keberhasilan kerja sama ASEAN dan terwujudnya Masyarakat ASEAN yang damai dan sejahtera.

Jakarta, Oktober 2017

A stylized signature in black ink, reading "Jose Tavares".

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN



PETA NEGARA-NEGARA  
ANGGOTA ASEAN

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>INDONESIA</b><br>Tanggal Bergabung: 8 Agustus 1967<br>Ibukota: Jakarta     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| <br><b>MALAYSIA</b><br>Tanggal Bergabung: 8 Agustus 1967<br>Ibukota: Kuala Lumpur | <br><b>THAILAND</b><br>Tanggal Bergabung: 8 Agustus 1967<br>Ibukota: Bangkok                       | <br><b>FILIPINA</b><br>Tanggal Bergabung: 8 Agustus 1967<br>Ibukota: Manila     |
| <br><b>SINGAPURA</b><br>Tanggal Bergabung: 8 Agustus 1967<br>Ibukota: Singapura  | <br><b>BRUNEI DARUSSALAM</b><br>Tanggal Bergabung: 7 Januari 1984<br>Ibukota: Bandar Seri Begawan | <br><b>VIETNAM</b><br>Tanggal Bergabung: 28 Juli 1995<br>Ibukota: Hanoi        |
| <br><b>LAOS</b><br>Tanggal Bergabung: 23 Juli 1997<br>Ibukota: Vientiane        | <br><b>MYANMAR</b><br>Tanggal Bergabung: 23 Juli 1997<br>Ibukota: Naypyidaw                      | <br><b>KAMBOJA</b><br>Tanggal Bergabung: 30 April 1999<br>Ibukota: Phnom Penh |





# Daftar Isi

|                                                                  |     |                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Kata Pengantar<br/>Direktur Jenderal<br/>Kerja Sama ASEAN</b> | i   | <b>Bab 3 — Kerja Sama<br/>Eksternal ASEAN</b>                |     |
| <b>Peta Negara-negara<br/>Anggota ASEAN</b>                      | iii | <b>1. Perkembangan Kerja Sama<br/>dengan Mitra Wicara</b>    | 86  |
| <b>Daftar Isi</b>                                                | v   | <b>2. Kerja Sama ASEAN dengan<br/>Mitra Wicara Sektoral</b>  | 117 |
| <b>Bab 1 — Sekilas ASEAN</b>                                     |     | <b>3. Kerja Sama ASEAN dengan<br/>Mitra Pembangunan</b>      | 121 |
| <b>1. Latar Belakang<br/>Pembentukan ASEAN</b>                   | 3   | <b>4. Kerja Sama ASEAN dengan<br/>Organisasi Regional</b>    | 123 |
| <b>2. Transformasi Menuju<br/>Masyarakat ASEAN</b>               | 4   | <b>5. Kerja Sama Lainnya</b>                                 | 129 |
| <b>3. Struktur Organisasi ASEAN</b>                              | 11  | <b>6. <i>Trust Fund</i> dan <i>Project<br/>Fund</i></b>      | 143 |
| <b>4. Sekretariat Nasional<br/>ASEAN-Indonesia</b>               | 13  | <b>Lampiran 1<br/>Identitas ASEAN</b>                        | 157 |
| <b>5. Pusat Studi ASEAN</b>                                      | 13  | <b>Lampiran 2<br/><i>ASEAN Anthem</i></b>                    | 159 |
| <b>Bab 2 — Membangun<br/>Masyarakat ASEAN<br/>2025</b>           |     | <b>Lampiran 3<br/>Profil Ringkas Negara-negara<br/>ASEAN</b> | 163 |
| <b>1. Masyarakat Politik-<br/>Keamanan ASEAN</b>                 | 17  | <b>Indeks</b>                                                | 183 |
| <b>2. Masyarakat Ekonomi<br/>ASEAN</b>                           | 35  |                                                              |     |
| <b>3. Masyarakat Sosial-Budaya<br/>ASEAN</b>                     | 63  |                                                              |     |

Lokasi: Kawah Ijen, Jawa Timur





Lokasi: Bedugul, Bali



# SEKILAS ASEAN



## 1. Latar Belakang Pembentukan ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 (sepuluh) negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal **8 Agustus 1967** di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan “Deklarasi Bangkok”.

Pembentukan ASEAN dilatarbelakangi keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi antar kekuatan militer negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan.

Lima orang wakil Negara/Pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, yaitu: Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso R. Ramos), Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman), Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak) (Malaysia), dan Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam).

Pada perkembangannya, lima negara di kawasan Asia Tenggara selanjutnya menyusul bergabung dalam ASEAN, yakni **Brunei Darussalam** (8 Januari 1984); **Vietnam** (28 Juli 1995); **Laos** dan **Myanmar** (23 Juli 1997); serta Kamboja (30 April 1999).

## 2. Transformasi Menuju Masyarakat ASEAN

Kerja sama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan sejahtera.

Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan Masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal.



*Lima wakil Negara/Pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara yang menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu: Narciso Ramos (Filipina), Adam Malik (Indonesia), Thanat Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan S. Rajaratnam (Singapura). Foto: Arsip Nasional RI*

Pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat (*people-centered and people-oriented*).



“Pembentukan Masyarakat ASEAN bertujuan menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat pada kepentingan rakyat.”



“

*ASEAN 2025: Forging Ahead Together* ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN dalam sepuluh tahun ke depan.

Demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca-2015, pada KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 November 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan 2 kesepakatan utama, yaitu:

- a. *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community* yang secara resmi mencanangkan pembentukan Masyarakat ASEAN; dan
- b. *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang memuat peta jalan ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan.

*ASEAN 2025: Forging Ahead Together* merupakan dokumen pengganti Peta Jalan Pembentukan Masyarakat ASEAN 2009-2015 atau yang dikenal sebagai Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015.

*ASEAN 2025: Forging Ahead Together* terdiri dari 5 dokumen, yaitu:

- *Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together*
- Visi Masyarakat ASEAN 2025
- Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025
- Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025
- Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025

Dokumen ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN dalam sepuluh tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Berikut adalah urutan peristiwa-peristiwa penting di ASEAN sejak penandatanganan Deklarasi Bangkok hingga pemberlakuan Masyarakat ASEAN:



**8 Agustus  
1967** | Penandatanganan Deklarasi Bangkok menandai pembentukan ASEAN.



**23-25 Februari  
1976** | Bali Concord I: *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*



Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama ASEAN di Bali, 23-25 Februari 1976. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Bali Concord I dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*).

**8 Januari  
1984** | Brunei Darussalam bergabung menjadi negara anggota ASEAN.



**28 Juli  
1995** | Vietnam bergabung menjadi negara anggota ASEAN.



## Timeline Peristiwa Penting

**7 Oktober  
2003** | Bali Concord II: Masyarakat ASEAN

Pada KTT ASEAN ke-9, para Pemimpin ASEAN mengesahkan Bali Concord II untuk mendeklarasikan tiga pilar Masyarakat ASEAN, yang terdiri atas: Pilar Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.



**30 April  
1999** | Kamboja bergabung menjadi negara anggota ASEAN.



**15 Desember  
1997** | *ASEAN Vision 2020*

Pada KTT Informal ASEAN yang berlangsung pada 14-16 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN menyepakati *ASEAN Vision 2020* untuk membentuk suatu Masyarakat ASEAN yang akan dicapai pada tahun 2020.



**23 Juli  
1997** | Laos dan Myanmar bergabung menjadi negara anggota ASEAN.





**2004**Vientiane Action  
Programme (VAP)

Untuk mempertegas keinginan pembentukan Masyarakat ASEAN, pada KTT ke-10 ASEAN yang berlangsung di Vientiane pada 29-30 November 2004, disepakati untuk mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Masyarakat ASEAN dari masing-masing pilar ke dalam *Vientiane Action Programme (VAP)*.

**13 Januari  
2007**

Deklarasi Cebu



Pada KTT ke-12 ASEAN, para Pemimpin ASEAN menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pembentukan Masyarakat ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.

**20 November  
2007**Penandatanganan  
Piagam ASEAN

Piagam ASEAN ditandatangani oleh sepuluh kepala negara/pemerintahan negara ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN yang berlangsung di Singapura. Piagam ASEAN merupakan kerangka hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN, dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum (*legal personality*).

**15 Desember  
2008**Pemberlakuan  
Piagam ASEAN

Piagam ASEAN mulai berlaku efektif setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008**.

9

10

11

12

**31 Desember  
2015**

Masyarakat ASEAN secara resmi diberlakukan.

16



15

**22 November 2015**

Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia menghasilkan dua kesepakatan utama, yaitu:

- 1 *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community*
- 2 *ASEAN 2025: Forging Ahead Together*

Pengesahan kedua kesepakatan ini sekaligus menegaskan bahwa pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan suatu proses berkelanjutan guna mewujudkan ASEAN yang berpusat dan berorientasi pada rakyat (*people-centered and people-oriented*).

14

**2011**

Bali Concord III

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ke-19 ASEAN di Bali, 14-19 November 2011. Pada KTT tersebut disahkan *Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations* atau dikenal sebagai *Bali Concord III*, yang mengukuhkan posisi ASEAN dalam masyarakat global sebagai entitas yang bersifat *outward looking* dan aktif memberikan solusi tentang permasalahan global.

**1 Maret  
2009**Cetak Biru  
Masyarakat  
ASEAN 2015

Sebagai pedoman pembentukan Masyarakat ASEAN dengan ketiga pilarnya, pada KTT ke-14 ASEAN yang berlangsung di Cha Am Hua Hin, Thailand, para Pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi Cha-am Hua Hin mengenai Peta Jalan Pembentukan Masyarakat ASEAN 2009-2015 (*Cha Am Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community 2009-2015*) atau yang juga dikenal sebagai Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015.

13

**8 Agustus  
2017**

50 tahun ASEAN.

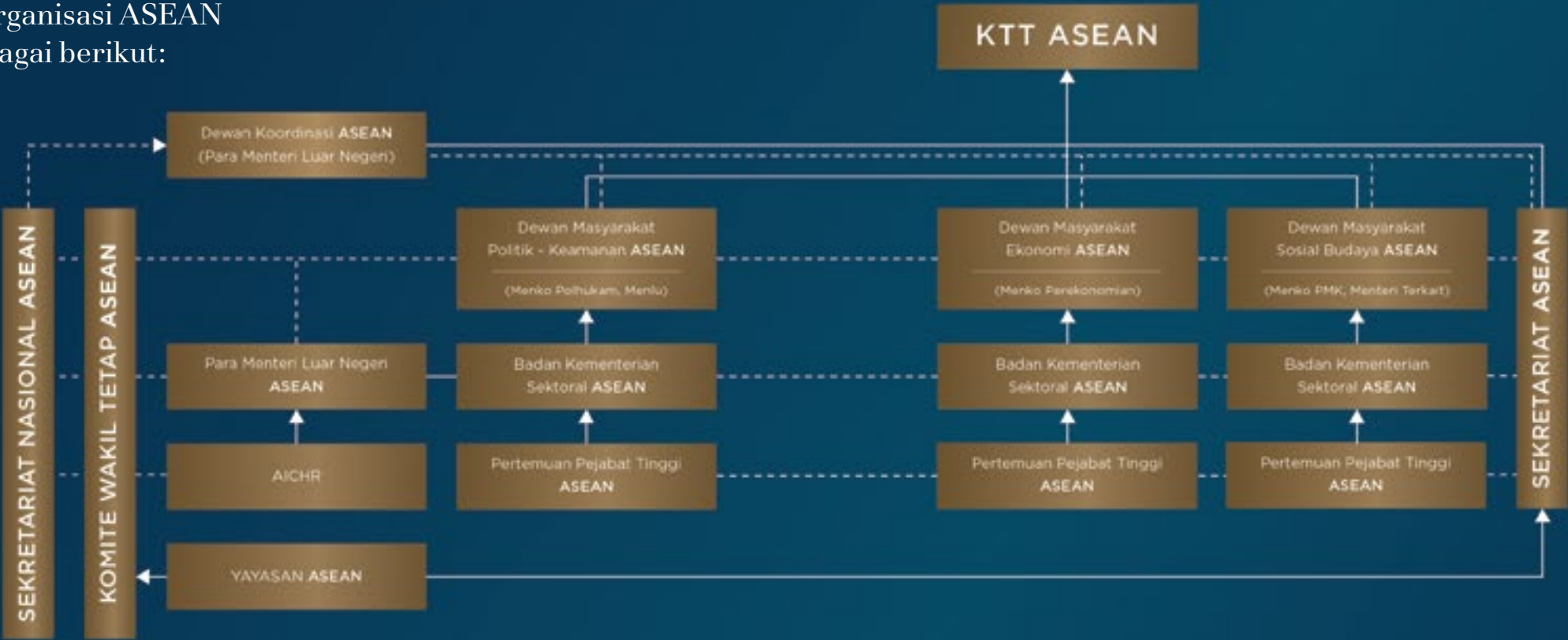
17



3.

Struktur Organisasi ASEAN

Struktur organisasi ASEAN adalah sebagai berikut:



Keterangan:

a. **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN** (*ASEAN Summit*) adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan negara anggota.

b. **Dewan Koordinasi ASEAN** (*ASEAN Coordinating Council*) adalah pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN.

c. **Dewan Masyarakat ASEAN** (*ASEAN Community Council*) adalah pertemuan para Menteri yang membidangi tiga pilar Masyarakat

ASEAN, yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial-Budaya.

d. Pertemuan **Badan-Badan Sektor** (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*) adalah pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.

e. Pertemuan tingkat **Pejabat Tinggi ASEAN** (*ASEAN Senior Officials' Meeting*) adalah pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.

f. **Sekretariat ASEAN** adalah organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerja sama ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

g. **Komite Wakil Tetap ASEAN** adalah forum para Duta Besar/Wakil Tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasi ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

h. **Sekretariat Nasional** adalah pempunan kegiatan (*focal point*) tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN.

i. Komisi Antarpemerintah untuk **HAM ASEAN** (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AIHR*) adalah Badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN.

## 4.

### Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia (Setnas ASEAN-Indonesia) dibentuk berdasarkan amanat Piagam ASEAN. Pasal 13 Piagam ASEAN menugaskan setiap negara membentuk Sekretariat Nasional ASEAN yang berfungsi sebagai koordinator di tingkat nasional untuk efektivitas implementasi maupun peningkatan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai ASEAN.

Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)-Indonesia. Berdasarkan Keppres tersebut, Setnas ASEAN-Indonesia memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- sebagai pumpunan kegiatan pada tingkat nasional;
- menyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;
- mengoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional;
- mengoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN;
- memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional;
- berkontribusi pada pembentukan Masyarakat ASEAN

## 5.

### Pusat Studi ASEAN

Ditjen Kerja Sama ASEAN bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi yang berada di berbagai provinsi di Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Salah satu ruang lingkup kerja sama sebagaimana dituangkan pada Nota Kesepahaman tersebut adalah pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) sebagai lembaga yang melakukan riset, konsultasi, dan komunikasi untuk mempromosikan kerja sama ASEAN kepada para pemangku kepentingan secara luas.

Kegiatan bersama yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Kerja Sama ASEAN dan PSA tersebut antara lain: kuliah umum, seminar, pameran foto, simulasi sidang, lomba debat, dan lomba *public speaking* mengenai ASEAN.

PSA sebagai mitra Ditjen Kerja Sama ASEAN memiliki keunggulan dalam memberikan sudut pandang akademis guna mendukung proses perumusan kebijakan dan implementasi Masyarakat ASEAN sesuai karakteristik masing-masing daerah. Oleh karena itu, PSA berperan penting dalam memberikan masukan melalui kajian akademis mengenai kerja sama ASEAN pada pilar Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.

### Berikut adalah daftar PSA yang telah terbentuk hingga September 2017 (Berdasarkan urutan alfabet)

|                                                                         |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Universitas 17 Agustus 1945, Semarang                                   | Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo                                    |
| Universitas Airlangga, Surabaya                                         | Universitas Negeri Semarang, Semarang                                     |
| Universitas Andalas, Padang                                             | Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu                               |
| Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan                          | Universitas Padjajaran, Bandung                                           |
| Universitas Brawijaya, Malang                                           | Universitas Pasundan, Bandung                                             |
| Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau Bau                                 | Universitas Pattimura, Ambon                                              |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta                                     | Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang                          |
| Universitas Garut, Garut                                                | Universitas Riau, Pekanbaru                                               |
| Universitas Hasanuddin, Makassar                                        | Universitas Sam Ratulangi, Manado                                         |
| Universitas Indonesia, Depok                                            | Universitas Siliwangi, Tasikmalaya                                        |
| Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar                        | Universitas Sumatera Utara, Medan                                         |
| Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan | Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan                                   |
| Universitas Jember, Jawa Timur                                          | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh                                       |
| Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto                              | Universitas Udayana, Denpasar                                             |
| Universitas Kristen Indonesia, Jakarta                                  | Universitas Wiraraja, Sumenep                                             |
| Universitas Kuningan                                                    | Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya, Tasikmalaya           |
| Universitas Lampung, Bandar Lampung                                     | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar, Sumatera Barat           |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang                        | Institut Bisnis dan Multimedia ASMI, Jakarta                              |
| Universitas Muhammadiyah Malang, Malang                                 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations, Jakarta |
| Universitas Mulawarman, Samarinda                                       | Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado, Manado                             |
| Universitas Narotama, Surabaya                                          | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Tanjung Pinang     |
| Universitas Negeri Manado, Manado                                       |                                                                           |





BAB  
2

MEMBANGUN  
MASYARAKAT ASEAN

Lokasi: Raja Ampat, Papua



# 1. MASYARAKAT POLITIK KEAMANAN ASEAN



Stabilitas dan Keamanan Kawasan Penting: KTT 28-29 ASEAN, Laos

Indonesia memprakarsai salah satu pilar masyarakat ASEAN, yaitu pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*). Karakteristik APSC adalah memiliki kesamaan nilai dan norma; kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi; serta dinamis dan berpandangan keluar. Cetak Biru APSC 2009-2015 berhasil mencapai tujuan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas kawasan. Cetak Biru ini juga mengadopsi pendekatan menyeluruh terhadap keamanan dan pendekatan *outward looking* dalam hubungan eksternal ASEAN.

Cetak Biru APSC 2025 ditujukan untuk meneruskan pembangunan di atas capaian-capaian yang telah ada guna meningkatkan kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat

yang lebih tinggi. Dalam APSC, akan terdapat masyarakat yang berdasarkan hukum dan bersifat inklusif dimana setiap orang menikmati hak asasinya, kebebasan dasar dan keadilan sosial, hidup dalam lingkungan yang aman dan memiliki kapasitas lebih untuk menanggapi secara efektif munculnya tantangan-tantangan baru dalam sebuah wilayah yang dinamis. Cetak Biru APSC mempromosikan ASEAN yang berorientasi pada masyarakat dan berpusat pada masyarakat (*people-oriented, people-centered*) di semua sektor kemasyarakatan, terlepas dari *gender*, ras, agama, bahasa, atau latar belakang sosial budaya, didorong untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.

Karakteristik Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*) 2009 – 2015:

- Masyarakat yang berdasarkan hukum yang berbagi nilai dan norma
- Kawasan yang kohesif, damai, stabil dan berdaya tahan dengan berbagi tanggung jawab keamanan secara komprehensif
- Kawasan yang dinamis dan *outward-looking* dalam dunia yang semakin menyatu dan interdependen.

Karakteristik Cetak Biru APSC 2025:

- Masyarakat yang berdasar hukum, *people-oriented, people centered* yang diikat oleh prinsip-prinsip dasar, nilai dan norma yang sama. Masyarakat akan menikmati hak asasi, kebebasan dasar dan keadilan sosial, meyakini nilai-nilai toleransi dan moderasi.
- Masyarakat yang berdaya tahan tinggi dalam kawasan yang damai, aman dan stabil, memiliki kapasitas lebih untuk menanggapi secara efektif munculnya tantangan-tantangan baru dalam sebuah wilayah yang dinamis.
- Masyarakat yang *outward-looking* yang memiliki kerja sama yang dalam dengan pihak-pihak luar, mempertahankan dan memperkuat sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang berubah.
- Masyarakat dengan kapasitas institusional yang diperkuat melalui proses dan koordinasi kerja ASEAN, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organ dan lembaga ASEAN, termasuk *ASEAN Secretariat*, dan meningkatkan kehadiran ASEAN sebagai lembaga pada level nasional, regional dan internasional.



"Cetak Biru APSC 2025 ditujukan untuk meneruskan capaian-capaian yang telah ada guna meningkatkan kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi."



# ISU-ISU POLITIK KEAMANAN ASEAN

Isu-isu strategis dan kerja sama politik-keamanan pada tahun 2016 yang dipandang strategis oleh Indonesia dapat dikelompokkan menjadi isu keamanan kawasan, pemberantasan kejahatan lintas negara, keamanan maritim, serta hukum dan hak asasi manusia.

| Keamanan Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara                                                                                                                                                 | Keamanan Maritim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Penandatanganan Protokol SEANWFZ dan Akses TAC</li><li>• Isu Laut China Selatan (LCS)</li><li>• Pembangunan arsitektur kawasan</li><li>• Resolusi dan Manajemen Konflik</li><li>• Pertahanan, Perdamaian dan Stabilitas Kawasan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</li><li>• Penanggulangan terorisme</li><li>• Pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• maritime safety,</li><li>• maritime security,</li><li>• transnational crime,</li><li>• Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dan Search and Rescue (SAR)</li><li>• environment and conservation,</li><li>• marine resources,</li><li>• maritime connectivity,</li><li>• confidence building measures/preventive diplomacy,</li><li>• norms building,</li><li>• maritime domain awareness.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)</li><li>• Diresmikan 23 Oktober 2009, di Cha-Am Hua Hin, Thailand.</li><li>• AICHR merupakan lembaga HAM yang bersifat menyeluruh dan bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN</li></ul> |

## A. Keamanan Kawasan

Empat hal menonjol dalam masalah keamanan kawasan adalah penandatanganan Protokol *South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) oleh *Nuclear Weapon States* (NWS) dan akses *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), isu Laut China Selatan (LCS), pembangunan arsitektur kawasan, resolusi dan manajemen konflik serta pertahanan dan stabilitas kawasan.

### I. SOUTH EAST ASIA NUCLEAR WEAPON-FREE ZONE (SEANWFZ)

SEANWFZ merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir, yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Sebagai langkah selanjutnya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan segala jenis senjata pemusnah masal lainnya, ASEAN menyusun Protokol Traktat SEANWFZ. Untuk mendorong penyelesaian isu ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ, Indonesia senantiasa mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

1. penandatanganan dan ratifikasi bertahap dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi, dan/atau yang reservasinya dapat diterima seluruh Negara Anggota ASEAN, dan
2. meminta Negara Anggota ASEAN yang memiliki keberatan terhadap reservasi *Nuclear Weapon State* (NWS) untuk secara langsung bernegosiasi dengan negara NWS terkait.

### II. TREATY OF AMITY AND COOPERATION (TAC)

TAC merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC menjadi prinsip dalam pengaturan penyelesaian konflik diantara negara-negara pihak secara damai. TAC ditandatangani oleh lima kepala negara pendiri ASEAN pada tahun 1976. Pada tahun 1987 TAC diamandemen untuk membuka akses bagi negara-negara di kawasan lain. Hingga September 2016, telah terdapat 35 *High Contracting Parties* (HCP) atau negara yang melakukan akses terhadap TAC.

### III. LAUT CHINA SELATAN (LCS)

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam dan RRT. Potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi karena adanya klaim yurisdiksi yang tumpang tindih di antara beberapa negara pengklaim yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam dan RRT.

Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, para Menlu ASEAN mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South China Sea* pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2002, ASEAN bersama RRT mengeluarkan *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC). DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara-negara ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya.

Pada tahun 2013, Indonesia mengajukan formula 3+1 yang merupakan tujuan dari *Code of Conduct* (COC) yaitu

1. meningkatkan *trust* dan *confidence building*,
2. mencegah insiden,
3. mengatasi insiden sekiranya terjadi, serta
4. menciptakan suasana kondusif di lapangan demi penyelesaian COC.

Indonesia terus mendorong optimalisasi forum *ASEAN-China Senior Officials Meeting* (SOM) on DOC dan *ASEAN-China Joint Working Group* (JWG) on DOC untuk memajukan implementasi DOC secara penuh dan efektif. dan dalam konsultasi COC.

ASEAN dan RRT berhasil menyepakati kerangka COC di Laut China Selatan pada pertemuan ke-14 *SOM on DOC* di Guiyang, RRT, 18 Mei 2017. Atas dorongan Indonesia dan berdasarkan *draft* yang disiapkan Indonesia, pembahasan substantif yang menghasilkan *draft* pertama *COC Framework* dilakukan pada Pertemuan *ASEAN-China JWG on DOC* di Bali, pada akhir Februari 2017 yang diikuti pertemuan *JWG on DOC* di Siem Reap, Kamboja, akhir Maret 2017.

#### IV. PEMBANGUNAN ARSITEKTUR KAWASAN

ASEAN memegang peran penting dalam pembangunan kelembagaan di tingkat kawasan. Negara-negara anggota ASEAN dan di luar ASEAN mulai mengakui bahwa ASEAN membantu penciptaan kelembagaan dan proses yang memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya dan negara-negara di kawasan untuk menangani masalah secara damai. Dengan pengakuan ini, ASEAN telah mengukuhkan diri sebagai “inti pemersatu kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik”. Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas di kawasan tanpa perlu menjadi hegemon juga memberikan

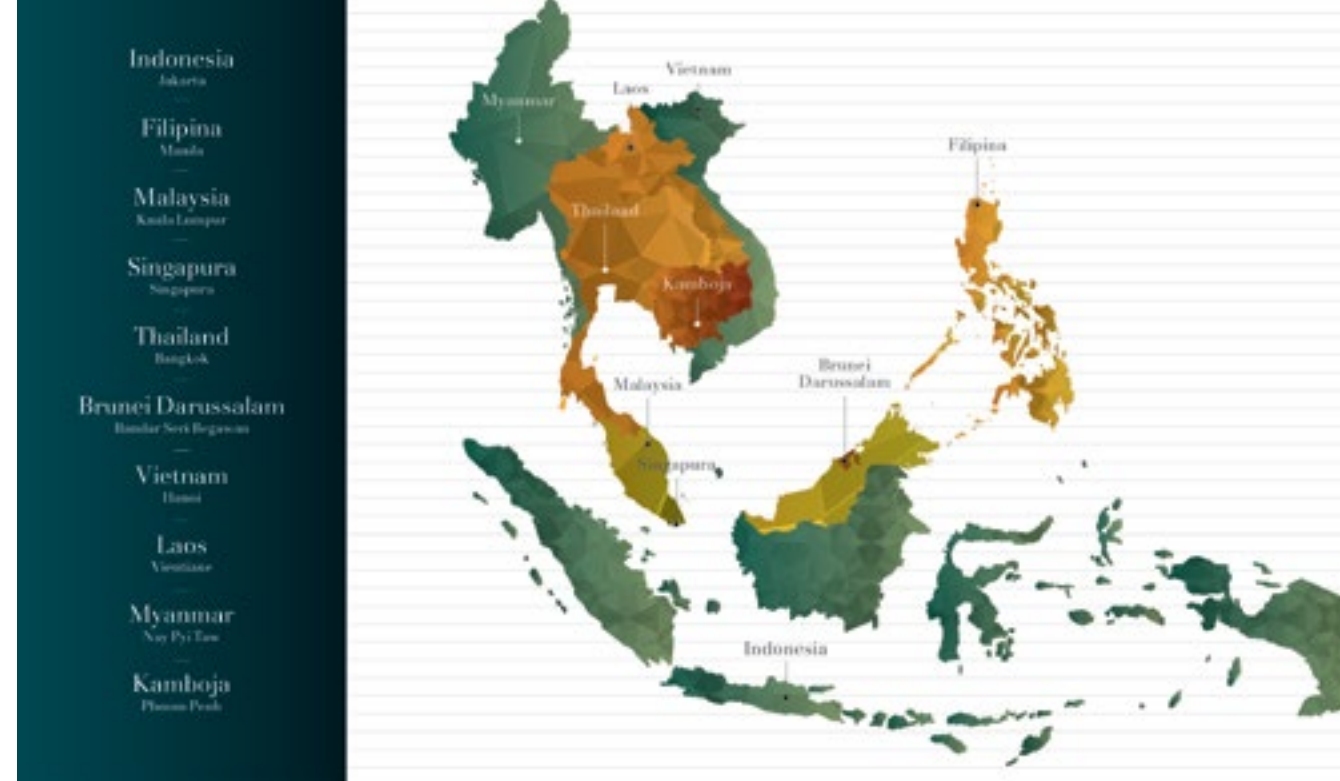
jaminan bagi negara-negara anggota ASEAN serta mitranya di kawasan bahwa ASEAN memiliki karakteristik yang tenang dan ramah (*benign*) serta berkomitmen terhadap prinsip tidak ikut campur tangan (*non-interference*) dalam politik dalam negeri negara lain.

Senafas dengan peran ASEAN dalam pembangunan arsitektur kawasan yang ditujukan untuk menjawab tantangan baru di kawasan, menghilangkan rendahnya rasa saling percaya (*trust deficit*) dan berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa secara damai serta menghadapi berbagai perubahan geopolitik di kawasan, maka Indonesia berkepentingan untuk menciptakan hasil-hasil yang konkrit dari berbagai pertemuan dan dapat memberikan ruang bagi penyelesaian berbagai agenda dan tantangan di kawasan. Oleh karena itulah, Indonesia telah memprakarsai suatu konsep pemikiran arsitektur keamanan kawasan berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan *EAS Declaration for Mutually Beneficial Relations* (*Bali Principles*) guna menghadapi berbagai tantangan kawasan ke depan. *Bali Principles* merupakan panduan tata hubungan antar negara di kawasan Asia Timur berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati, untuk mendukung pembangunan dalam mencapai kemakmuran. *Bali Principles* merupakan hasil dari KTT Asia Timur ke-6 (*East Asia Summit*) tahun 2011 di Bali.

Konsep pemikiran Indonesia pada hakekatnya dan dalam jangka panjang adalah memanfaatkan elemen-elemen TAC dan *Bali Principles* untuk disinergikan dengan berbagai inisiatif negara peserta EAS lainnya dalam rangka menyusun suatu instrumen hukum yang mengikat bagi kawasan yang lebih luas.

#### V. RESOLUSI DAN MANAJEMEN KONFLIK

Indonesia senantiasa mendukung upaya ASEAN dalam menjamin perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan termasuk manajemen



dan resolusi konflik. Hal tersebut direfleksikan dengan menjadi pemrakarsa pendirian *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*, sebuah lembaga penelitian dan peningkatan kapasitas di bidang promosi perdamaian dan rekonsiliasi konflik di kawasan. Pendirian AIPR disahkan secara resmi oleh Kepala-Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh bulan November 2012.

AIPR memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai salah satu negara penggerak proses perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan. Hal ini sejalan dengan berbagai prestasi Indonesia dalam melakukan fasilitasi dan atau mediasi berbagai konflik seperti pada konflik Kamboja-Viet Nam pada tahun 1988, Thailand dan Laos tahun 2011 dan di Mindanao, Filipina. Selain itu, keberhasilan penyelesaian konflik di dalam negeri seperti di Aceh, Maluku dan Poso juga menjadi modal Indonesia dalam mendorong upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan melalui AIPR.

Ke depan, Indonesia akan terus mendorong AIPR untuk tidak hanya menjadi lembaga penelitian namun juga dapat menjadi lembaga yang berperan aktif dalam mendorong penyelesaian damai dari konflik-konflik yang

terjadi di kawasan dan di tingkat global. AIPR juga akan menjadi lembaga yang penting dalam mendorong penyebaran budaya damai melalui penghormatan nilai-nilai toleransi dan moderasi sebagai kekuatan dalam mencapai harmoni, keamanan dan stabilitas di kawasan dan di luar kawasan.

#### VI. PERTAHANAN, PERDAMAIAN DAN STABILITAS KAWASAN

- a. *Confidence Building Measures*  
Dalam rangka meningkatkan *confidence building measures* di kawasan, ASEAN telah memajukan berbagai kerja sama pertahanan, terutama dalam bidang *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR), *Military Medicine* (MM), *Counter Terrorism* (CT), *Maritime Security* (MS), *Peacekeeping Operations* (PKO), *Humanitarian Mine Action* (HMA), dan *Cyber Security* (CS). Kerja sama tersebut dilakukan melalui kerangka *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus* (ADMM-Plus).





b. *ASEAN Peacekeeping Centers' Network (APCN)*

Wujud nyata komitmen ASEAN untuk turut aktif dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia adalah dengan dibentuknya *ASEAN Peacekeeping Centers' Network (APCN)*. APCN merupakan wadah kerja sama antar-*Peacekeeping Centers* (PKC/Pusat Misi Penjaga Perdamaian) di negara-negara ASEAN yang diwujudkan dalam bentuk *capacity building*, pertukaran informasi dan tenaga ahli. Sejak didirikan pada tahun 2011, APCN telah berperan besar dalam peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian negara-negara ASEAN dan berkontribusi menyukseskan misi-misi penjaga perdamaian PBB di seluruh dunia.

c. *ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC)*

Guna mewadahi kerja sama *penanggulangan ranjau* dan *Explosive Remnants of War (ERW)*, ASEAN telah menyepakati pembentukan *ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC)*. Aktivitas ARMAC dilakukan melalui pertukaran pengalaman, pelatihan, serta peningkatan kapabilitas. Markas ARMAC berlokasi di Kamboja dan telah diresmikan pada tanggal 25 Mei 2016

## B. Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Globalisasi telah membawa evolusi jejaring, perdagangan dan teknologi yang menghubungkan orang dan tempat di berbagai belahan dunia dalam sebuah proses yang tak terhentikan. Saat ini, dunia menyaksikan efek negatif yang menyertai globalisasi seperti perpindahan teroris dari satu kawasan ke kawasan lain dan tumbuhnya kejahatan lintas Negara. ASEAN dan negara-negara di kawasan bergerak cepat untuk menyatukan dan mengembangkan sebuah komunitas dan di saat yang bersamaan berjuang untuk bergerak mengimbangi dinamika dan berkembangnya ancaman terhadap keamanan.

ASEAN telah memiliki Rencana Aksi untuk Memberantas Kejahatan Lintas Negara (*Plan of Action to Combat Transnational Crime*) untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara secara terpadu. Terdapat delapan bidang prioritas dari PoA yaitu:

1. *counter terrorism,*
2. *illicit drug trafficking*
3. *trafficking in persons,*
4. *money laundering,*
5. *arms smuggling,*
6. *sea piracy,*
7. *international economic crime,*
8. *cybercrime*
9. *illicit trafficking in wildlife and timber,* dan
10. *people smuggling.*

Sepanjang 2015 -2016, beberapa capaian dalam pemberantasan kejahatan lintas negara adalah:

## I. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pencapaian utama di bidang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah ditandatanganinya *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) pada tanggal 21 November 2015 pada kesempatan KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. ACTIP merupakan pedoman utama yang bersifat mengikat bagi negara-negara ASEAN dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang di kawasan. Negosiasi ACTIP yang dilakukan selama bertahun-tahun, yakni 9 (sembilan) kali pertemuan kelompok kerja para ahli, membuahkan hasil maksimal. Indonesia merupakan salah satu negara pendorong utama pembentukan ACTIP. ACTIP telah resmi berlaku pada 8 Maret 2017 setelah 6 negara ASEAN meratifikasinya. Indonesia menjadi negara anggota ASEAN kesembilan yang meratifikasi ACTIP, setelah RUU tentang ACTIP disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 17 Oktober 2017.

## II. PENANGGULANGAN TERORISME

Selama tahun 2016, Indonesia juga telah secara aktif mendorong upaya dan kerja sama penanggulangan terorisme, termasuk

*violent extremism* dan radikalisasi melalui implementasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) dan instrumen internasional terkait lainnya secara efektif. ACCT disepakati pada tahun 2007 dan telah berlaku sejak tahun 2011.

Dalam kerangka *ASEAN Regional Forum*, pada pertemuan *15<sup>th</sup> ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* (ISM on CTTC) yang berlangsung tanggal 6-7 April 2017, fokus kerja sama diarahkan pada upaya untuk pemberantasan kejahatan lintas negara di laut yang mengancam keamanan dan keselamatan laut serta mengancam keberlangsungan jalur perdagangan, transportasi, komunikasi, dan lainnya.

## III. PEMBERANTASAN NARKOBA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG

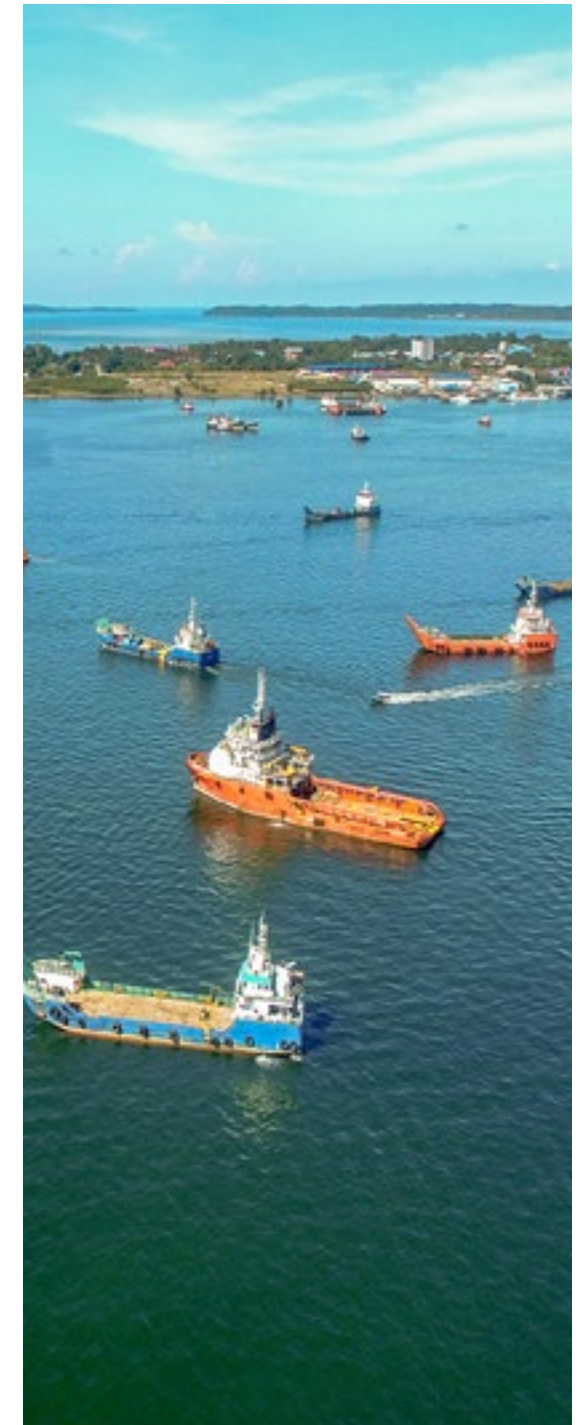
Indonesia memberikan perhatian serius pada penguatan kerja sama pemberantasan kejahatan perdagangan gelap narkoba di kawasan. Indonesia menjadi inisiator pembentukan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force* (ASITF) dengan menjadikan seaport sebagai daerah perbatasan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain airport. Indonesia memandang penting upaya bersama kawasan untuk membendung arus

dan memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui lalu lintas laut dan perairan. Hal ini juga ditujukan untuk memberikan manfaat langsung bagi upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Indonesia.

## C. Keamanan Maritim

Indonesia merupakan salah satu penggerak utama pemajuan kerja sama dan pembahasan isu-isu maritim dalam berbagai kerja sama baik di ASEAN maupun pada mekanisme ASEAN yang melibatkan negara Mitra Wicara, seperti *ASEAN Maritime Forum* (AMF), *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (AMM) dan *ASEAN Senior Officials Meeting* (SOM), *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) and *ADMM Plus*, dan *ASEAN Ministers' Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dibentuk pada tahun 2010 atas prakarsa Indonesia, yang merupakan salah satu *action line* yang dimandatkan *ASEAN Political Security Community Blueprint*.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan 6<sup>th</sup> AMF dan 4<sup>th</sup> EAMF yang dilaksanakan di Manado. Pada pertemuan tersebut, Indonesia secara khusus mengangkat pentingnya penanggulangan isu *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUUF), serta mengusulkan dan mendorong pengembangan pengaturan regional penanggulangan IUUF.



ASEAN akan terus mengupayakan untuk menjaga keamanan maritim di kawasannya.

2017  
ACTIP Resmi  
Berlaku

"ACTIP telah resmi berlaku pada 8 Maret 2017 setelah 6 negara ASEAN meratifikasinya."



# MATRIKS ISU KEMARITIMAN

Indonesia memandang penting upaya untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh meningkatnya tekanan pada sumber daya perikanan dan perdagangan global. Peningkatan tekanan pada sumber daya perikanan berakibat pada penurunan secara tajam sumber daya ikan, degradasi lingkungan, meningkatnya konflik diantara pengguna sumber daya serta meningkatnya *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang mengancam ketahanan pangan di ASEAN region.

Sebagai langkah lanjut pengarusutamaan isu *IUU Fishing* dan *building block* peningkatan kerja sama pencegahan serta pemberantasan *IUU Fishing* di kawasan, Indonesia berhasil menjadikan *IUU Fishing* sebagai salah satu isu yang perlu menjadi perhatian dalam kerja sama ARF di bidang keamanan maritim. Hal

ini terlihat dengan disebutkannya isu ini dalam *ARF Work Plan on Maritime Security 2015-2017* yang telah disahkan Pertemuan Tingkat Menteri ke-22 ARF di Kuala Lumpur, 6 Agustus 2015.

Pengarusutamaan isu ini di forum ARF juga terlihat dari masuknya isu *IUU Fishing* dalam *ARF Statement on Strengthening Cooperationon Marine Environmental Protection and Conservation* yang telah disahkan Pertemuan Tingkat Menteri ke-22 ARF di Kuala Lumpur, 6 Agustus 2015. Statement, antara lain, mendorong peserta ARF untuk mengurangi polusi dan sampah laut, membendung kenaikan kadar pengasaman laut, melestarikan area pantai dan laut, melestarikan ekosistem pantai, menghentikan penangkapan ikan yang melebihi batas persediaan, dan mencegah tindak *IUU Fishing*.



| No. | Isu                          | AMF/EAMF | AMM/SOM | ARF | ADMM/ADMM-Plus | AMMTC/SOMTC | ALAWMM/ASLOM | ATM/STOM/MTWG | AMAF/ASWGFI | M-ATM | ACCC | AMME | AMMST/COST/SCMSAT |
|-----|------------------------------|----------|---------|-----|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------|------|------|-------------------|
| 1   | Maritime Safety              | ●        | ●       | ●   | ●              |             |              | ●             |             |       |      |      |                   |
| 2   | Maritime Security            | ●        | ●       | ●   | ●              | ●           | ●            | ●             |             |       |      |      |                   |
| 3   | Transnational crime          | ●        | ●       | ●   | ●              | ●           | ●            |               |             |       |      |      |                   |
| 4   | HADR/SAR                     | ●        | ●       | ●   | ●              |             |              |               |             |       |      |      |                   |
| 5   | Environment and Conservation | ●        | ●       | ●   |                |             | ●            | ●             |             |       |      | ●    |                   |
| 6   | Marine Resources             | ●        | ●       |     |                |             |              |               | ●           |       |      | ●    | ●                 |
| 7   | Maritime Connectivity        | ●        |         |     |                |             |              | ●             |             | ●     | ●    |      |                   |
| 8   | CBM/PD                       | ●        | ●       | ●   | ●              |             |              |               |             |       |      |      |                   |
| 9   | Norms-Building               |          | ●       | ●   | ●              | ●           |              |               |             |       |      | ●    |                   |
| 10  | Maritime Domain Awareness    | ●        |         | ●   |                |             |              |               |             |       |      |      |                   |

Isu dan kerja sama maritim dalam kerangka ASEAN bersifat *cross-cutting* dan *overlapping*. Saat ini, sedikitnya terdapat 10 isu besar terkait maritim yang dibahas oleh 12 *sectoral bodies* ASEAN yang mencakup isu *maritime safety, maritime security, transnational crime, Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR) dan SAR, *environment and conservation, marine resources, marine resources, maritime connectivity, confidence building measures/preventive diplomacy, norms building*, dan *maritime domain awareness*.

Salah satu prestasi Indonesia pada kurun waktu ini adalah disepakatinya *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* pada KTT Asia Timur ke-10 di Kuala Lumpur pada November 2015, yang menjadi salah satu landasan utama kerja sama kawasan di 5 (lima) bidang yakni

- a. *sustainable marine economic development*;
- b. *promotion of peace stability, and security*;
- c. *addressing trans-boundary challenges*;
- d. *maritime connectivity*; dan
- e. *cooperation between research institution*.

Mengingat pengaturan di tingkat internasional masih bersifat sukarela dan tidak memiliki konsekuensi hukum bagi negara pihaknya, Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden RI pada KTT ASEAN ke-26, memandang perlu dibentuknya instrumen hukum di kawasan untuk memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Keperluan pembentukan *regional convention* juga semakin mendesak mengingat *The Sustainable Development Goals* (SDG) telah menetapkan pemberantasan praktik IUUF dengan target waktu 2020. Kemenko Maritim bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

dan kementerian lainnya akan memimpin proses pembentukan instrumen hukum tersebut.

## D. Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pada level regional, ASEAN memiliki *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang diresmikan oleh para Leaders pada KTT ASEAN ke-15, 23 Oktober 2009, Cha-Am Hua Hin, Thailand. AICHR merupakan lembaga HAM yang bersifat menyeluruh dan bertanggung jawab untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Sebagai bentuk keterbukaan AICHR kepada publik, maka AICHR telah mempublikasikan Laporan Tahunan tahun 2016 melalui laman khusus AICHR.

Indonesia secara aktif terlibat dan akan terus meningkatkan kontribusinya dalam upaya untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan melalui pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.



# PRAKARSA DAN CAPAIAN INDONESIA

## A. Laut China Selatan

Indonesia senantiasa mendorong finalisasi *Code of Conduct in the South China Sea* (COC) dan terus berkontribusi positif dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di tengah perkembangan dinamika global. Atas prakarsa Indonesia, ASEAN berhasil menyepakati *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region* pada pertemuan 49<sup>th</sup> *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* (AMM), di Vientiane, Laos, pada tanggal 24 Juli 2016. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen bersama ASEAN untuk menjaga perdamaian dan keamanan, serta menahan diri dan tidak melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

## B. Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ)

Penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir merupakan salah satu prioritas utama Indonesia di ASEAN. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat rawan dilewati dan disinggahi oleh kapal-kapal pengangkut senjata nuklir. Penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ diharapkan dapat mengikat negara pemilik senjata nuklir untuk mematuhi aturan main dan menjamin kawasan Asia Tenggara tidak menjadi sasaran dari senjata nuklir.

Indonesia telah menyusun sebuah *concept paper* untuk mendorong percepatan proses penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ. *Concept paper* ini berisi usulan penandatanganan dan ratifikasi bertahap dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi yaitu RRT dan kemudian negara NWS yang reservasinya paling bisa diterima. Indonesia akan terus mendorong pembahasan tindak lanjut dari matriks tersebut dan memastikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.



## C. Upaya Pemajuan dan Perlindungan HAM di Kawasan

Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya untuk memajukan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan melalui pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Berkaitan dengan visi ASEAN yang lebih berorientasi dan berpusat pada masyarakat dan merespon perkembangan yang terjadi, seperti dengan disahkannya dokumen *ASEAN Vision 2025*, Indonesia terus mendorong negara anggota ASEAN untuk dapat bersikap lebih terbuka terhadap penguatan

mandat dan fungsi *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), khususnya yang berkaitan dengan mandat perlindungan HAM.

Indonesia juga berhasil mendorong AICHR agar lebih mengoptimalkan perannya dalam pengarusutamaan HAM di ketiga pilar ASEAN. AICHR Indonesia merupakan salah satu inisiator kegiatan ini dan berhasil melaksanakan konsultasi reguler dengan *SOM on Transnational Crime* (SOMTC) untuk memastikan pendekatan HAM bagi para korban perdagangan orang di ASEAN.



Forum Konsultasi Lintas Sektoral AICHR digelar selama dua hari di Yogyakarta pada Agustus 2017 untuk membahas pendekatan HAM dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang | Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI

“

Menyikapi berbagai inisiatif yang mengemuka di tengah dinamika yang terjadi di kawasan, Indonesia akan terus berperan proaktif agar kepentingan nasional tetap dapat dikedepankan di tengah upaya memimpin proses pembentukan arsitektur keamanan di kawasan.

Indonesia juga mendorong keterbukaan AICHR kepada publik dan *civil society organisation* (CSO). Hal ini tercermin dari telah disahkannya *Guidelines on AICHR's Relations with CSO* dan hingga tahun 2017 AICHR telah memberikan status konsultatif kepada 16 CSO di ASEAN. Laporan Tahunan AICHR tahun 2016 juga telah dapat diakses di [aichr.org](http://aichr.org).

## D. Pembangunan Arsitektur Kawasan

Menyikapi berbagai inisiatif yang mengemuka di tengah dinamika yang terjadi di kawasan, Indonesia akan terus berperan proaktif agar kepentingan nasional tetap dapat dikedepankan di tengah upaya memimpin proses pembentukan arsitektur keamanan di kawasan. Pada KTT ke-29 ASEAN sesi *retreat* di Vientiane, Laos, 7 September 2016, Presiden RI juga mendorong penguatan arsitektur keamanan kawasan dan memastikan proses kemitraan yang dimotori ASEAN (*ASEAN-driven*) untuk menghindari kontestasi pengaruh

kekuatan-kekuatan besar (*power projection*) di kawasan.

Pada Pertemuan 5<sup>th</sup> *EAS Workshop on Regional Security Architecture* di Beijing, RRT, tanggal 27-28 Juni 2016, Indonesia mempresentasikan *Synthesis Paper on the Regional Security Architecture* yang menyatukan *concept paper* Indonesia, India, RRT, dan Rusia. Indonesia menyampaikan bahwa beberapa kesamaan yang ditemukan dalam ke-4 *paper* dimaksud juga menunjukkan bahwa terdapat elemen-elemen yang dapat diharmonisasikan dan perlunya diskusi untuk terus digulirkan guna memperkuat norma yang ada dalam mengatur hubungan dan interaksi antar negara, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan dialog keamanan yang lebih kuat.

Indonesia menekankan diperlukannya sebuah paradigma baru untuk mengatur hubungan antar negara guna mengatasi tantangan tradisional dan non-tradisional secara komprehensif, serta mengatasi *trust deficit*, *disputes* dan perubahan geopolitik di kawasan. Kedepannya, Indonesia merencanakan untuk

mengadakan suatu pertemuan *High Contracting Parties to the TAC* untuk melakukan *stock-taking* atas pelaksanaan dan pengaruh TAC dalam penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan sejak tahun 1976.

### E. Penguatan Kerja Sama Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF)

Indonesia telah memprakarsai pengajuan *draft ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate IUUF* untuk disahkan oleh para menteri luar negeri ARF. *Draft* ini merupakan *outcome* dari *ARF Workshop on Improving Fisheries Management* (Honolulu, tanggal 22-23 Maret 2016) dan *ARF Workshop on IUUF* (Bali, tanggal 20-21 April 2016) yang diselenggarakan Indonesia bersama Amerika Serikat dan Timor-Leste.

*Draft statement* mengandung elemen-elemen penting penanganan IUUF, antara lain, mengenai pengakuan adanya kaitan IUUF dengan *illegal activities*, perlunya negara meng-*exercise* tanggung jawabnya dalam mencegah IUUF (baik selaku *port states*, *flag states*, *market states*, maupun *coastal states*), perlunya peran *maritime law enforcement agencies*, serta penerapan *penal sanctions*.

*Draft statement* sedianya diajukan untuk disahkan oleh para Menteri Luar Negeri ARF pada 23<sup>rd</sup> ARF di Vientiane, Laos, tanggal 26 Juli 2016. Namun pada akhirnya, *draft Statement*

belum bisa disahkan karena hingga akhir proses negosiasinya belum dicapai konsensus. Meski demikian, Indonesia telah memastikan bahwa *latest draft statement* akan ditinjau kembali dalam pembahasan ARF di tahun 2017.

### F. Penguatan Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di Kawasan Melalui Pertemuan *Directors General of Immigration and Head of Consular Affairs* (DGICM)

Pertemuan Ke-20 DGICM yang telah diselenggarakan di Bali, 20 – 21 September 2016 mengesahkan prakarsa Indonesia, yakni *Joint Statement of the DGICM on the Prevention of the Movement of Foreign Terrorist Fighters*. Inti dari *Statement* ini antara lain peningkatan kerja sama antara pejabat imigrasi, penyediaan informasi, pengawasan paspor dan informasi biometrik.

### G. Penanganan Isu Keamanan Rakhine State

Pada penghujung tahun 2016, isu keamanan di Rakhine State kembali menghangat. Isu tersebut dimulai dengan serangan *Rohingya Solidarity Organization* (RSO) terhadap Markas Besar Pasukan Penjaga Perbatasan/*Border Guard Forces* (BGF) dan 2 (dua) pos milik BGF di 2 (dua) kota di *Rakhine State*, yaitu Buthidaung Tsp dan Maungdaw Tsp pada tanggal 9 Oktober 2016. Pemerintah Myanmar merespon serangan tersebut salah

satunya dengan melakukan penyisiran empat desa, yang mayoritas dihuni warga dari etnis Rohingya, pada 11 Oktober 2016. Diduga, penyisiran ini menimbulkan banyak korban dari warga sipil, yang menimbulkan kecaman keras kepada pemerintah Myanmar dari komunitas internasional, termasuk dari PBB.

Indonesia telah berperan secara aktif dalam upaya mengembalikan situasi yang kondusif di wilayah tersebut, baik secara bilateral maupun regional. Atas upaya diplomasi Menlu RI, Myanmar mengundang para Menlu ASEAN dalam suatu *ASEAN Foreign Ministers' Retreat* di Yangon, Senin 19 Desember 2016. Pada *Retreat* tersebut, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Myanmar atas inisiatif pelaksanaan *Retreat* tersebut, yang ditegaskan

oleh Menlu RI sebagai bentuk kedewasaan ASEAN sebagai suatu keluarga dan Masyarakat ASEAN. Indonesia berharap Myanmar dapat memberikan *update* berkala terkait situasi di Rakhine State. Selain menyampaikan keprihatinan atas kondisi keamanan dan kemanusiaan, Indonesia menegaskan pentingnya memberikan akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar salah satunya melalui mekanisme yang telah ada di ASEAN. Hal ini diusulkan Indonesia untuk dilakukan dengan memanfaatkan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Center). Indonesia sendiri telah memberikan bantuan kemanusiaan ke *Rakhine State*.



Bantuan Kemanusiaan RI untuk Rakhine State | Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI



## 2. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bagian utuh dari 3 (tiga) pilar Masyarakat ASEAN yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Untuk menjadikan Masyarakat ASEAN yang *people-centered* dan *people-oriented*, Masyarakat ASEAN harus dibangun secara kohesif dan seimbang di antara ketiga pilar. MEA juga merupakan sebuah proses integrasi ekonomi yang berkesinambungan. Pasca MEA 2015, proses integrasi ekonomi berlanjut dengan tahapan berikutnya yakni MEA 2025.

Dokumen *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang disahkan pada KTT ke-27 ASEAN (November 2015) menjadi panduan kerja sama ASEAN untuk 10 tahun ke depan. Fokus ASEAN dalam dekade ini adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi digital, *good governance* dan *green technology*. Adapun elemen sentral MEA yang menjadi pilar MEA 2025 adalah

- i. Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh;
- ii. ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis;
- iii. Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral;
- iv. ASEAN yang Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi dan Berpusat pada Masyarakat; dan
- v. ASEAN yang Mengglobal.

Untuk mengoperasionalkan 5 elemen sentral MEA 2025, badan-badan sektoral pilar ekonomi telah merancang berbagai langkah aksi. Pada KTT ke-28 dan ke-29 (6-8 September 2016) telah tercatat delapan belas langkah aksi

yang telah diadopsi badan sektoral yakni:

- i. *Strategic Action Plan for Trade in Goods 2016-2025*;
- ii. *Strategic Action Plan for Services 2016-2025*;
- iii. *2016-2025 Investment Work Programme*;
- iv. *ASEAN Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025*;
- v. *ASEAN Competition Action Plan 2016-2025*;
- vi. *ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection 2016-2025*;
- vii. *ASEAN Intellectual Property Rights (IPR) Action Plan 2016-2025*;
- viii. *ASEAN Community Statistical System (ACSS) Strategic Plan 2016-2025*;
- ix. *ASEAN Work Plan for Enhancing the Global Value Chain Agenda*;
- x. *Broad directions for Customs 2016-2025*;
- xi. *Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025*;
- xii. *ASEAN ICT Masterplan 2020*;
- xiii. *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025, Phase 1*;
- xiv. *The Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry (2016-2025)*;
- xv. *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025*;
- xvi. *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan (AMCAP) 2016-2025, Phase 1*;
- xvii. *ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (APASTI 2016-2025)*; dan
- xviii. *AEC 2025 Strategic Action Plans (SAPs) for Financial Integration 2016-2025*.

## PERKEMBANGAN KERJA SAMA PILAR EKONOMI ASEAN

### A. Kerja Sama Perdagangan Barang

Upaya untuk mewujudkan aliran bebas barang telah dimulai dari *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). AFTA yang berlaku sejak 1993, telah menghapus 99,65% dari seluruh tariff lines dibawah skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) AFTA untuk ASEAN 6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dan pengurangan sekitar 98,96% tarif menjadi antara 0-5% untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal dengan terminologi CLMV. Meskipun demikian masing-masing negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap mempertahankan tarifnya pada beberapa produk yang tergolong dalam *Sensitive List* (SL), *High Sensitive List* (HSL), dan *General Exception List* (GEL).

Upaya tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan *ASEAN Agreement on Custom* pada tahun 1997 dan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2009. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu kerangka komprehensif, serta menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. Indonesia telah meratifikasi ATIGA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

ASEAN secara keseluruhan telah mengeliminasi 96,01% pos tarif. Negosiasi perdagangan barang ASEAN dilakukan dalam *Coordinating Committee on ATIGA* (CCA). CCA membahas isu-isu terkait praktik perdagangan barang oleh tiap negara anggota ASEAN dan kesesuaiannya dengan ATIGA, seperti isu transposisi tarif, *non-tariff measures* (NTMs), dan *rules of origin* (ROO).

*Strategic Action Plan* (SAP) *Trade in Goods* (TIG) mengandung *outcome* untuk meliberalisasi tarif yang belum 0%, berdampak pada produk minuman beralkohol yang masih Indonesia taruh dalam *General Exclusion List* (GEL) dan produk beras dan gula dalam *Highly Sensitive List* (HSL). Indonesia masih memiliki 113 produk yang tarifnya tidak 0%. Indonesia berpandangan bahwa produk alkohol dan rokok tetap dikenakan bea masuk karena pertimbangan kesehatan, moral dan sosial, begitu juga dengan produk beras dan gula untuk menjamin stabilitas harga.

Untuk memfasilitas perdagangan di kawasan, ASEAN telah meluncurkan *ASEAN Solutions for Investments, Services, and Trade* (ASSIST) yang dapat digunakan secara langsung oleh pelaku usaha untuk menyampaikan keluhan atas *Non-Tariff Barriers* (NTB) ataupun kendala lain yang dihadapi ketika melakukan

hubungan bisnis dengan Negara Anggota ASEAN (*ASEAN Member States* atau AMS) lainnya. ASEAN juga memiliki *ASEAN Trade Repository* (ATR) yang mengkompilasi *National Trade Repository* masing-masing AMS. ATR ini berisikan kebijakan dan regulasi AMS terkait perdagangan barang. ASEAN juga telah meluncurkan *Tariff Finder* yang merupakan mekanisme online untuk mendapatkan informasi terkait preferensi tarif yang masuk dalam skema ATIGA ataupun *ASEAN + 1 Free Trade Agreement* (FTA).

## B. KERJA SAMA PERDAGANGAN JASA

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Sejak disepakatinya AFAS pada tahun 1995, liberalisasi jasa dilakukan melalui negosiasi ditingkat *Coordinating Committee on*

*Services* (CCS) dalam bentuk paket. Saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) *Package 10*. Sementara itu, khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara negosiasinya dilakukan di tingkat Menteri terkait lainnya (Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan). Perundingan liberalisasi jasa keuangan sedang menegosiasikan AFAS 7 sementara jasa transportasi sudah menandatangani AFAS ke-9.

Hingga Paket ke-9 AFAS, Indonesia telah memberikan komitmen sebanyak 99 subsektor

dengan rincian 54 subsektor telah memenuhi threshold paket AFAS 10 dan 45 subsektor belum mencapai *threshold* tersebut. Dari 45 subsektor, terdapat 16 subsektor yang berpotensi untuk memenuhi threshold AFAS paket 10 berdasarkan revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI). *Threshold* AFAS paket 10 adalah *foreign equity participation* (FEP) sebesar 70% dan limitasi national treatment (NT) maksimal 1, serta fleksibilitas 29 modes. Jumlah fleksibilitas yang diperbolehkan dalam setiap tahapan ditentukan tidak lebih dari 15% dari masing-masing Mode.

## PERPINDAHAN TENAGA KERJA TERAMPIL

Pergerakan tenaga kerja terampil di ASEAN diatur melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA). ASEAN saat ini telah memiliki 8 MRA yakni untuk profesi insinyur, arsitek, surveyor, dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata, dan akuntan. Total jumlah registrasi untuk *ASEAN Chartered Professional Engineer* (ACPE) per Mei 2017 adalah sebesar 2.552 dengan rincian 15 dari Brunei Darussalam; 53 dari Kamboja; 962 dari Indonesia; 11 dari Laos; 304 dari Malaysia; 299 dari Myanmar; 260 dari Filipina; 257 dari Singapura; 187 dari Thailand; 204 dari Vietnam. Selain itu, jumlah ACPE yang telah terdaftar di Malaysia adalah sebanyak 6 *Registered Foreign Professional Engineer* (RFPE) dengan rincian, 1 dari Myanmar, 1 dari Filipina, dan 4 dari Singapura; teregistrasi di Myanmar sebanyak 1 RFPE dari Singapura; dan teregistrasi di Singapura sebanyak 1 RFPE dari Myanmar.



Lokasi: Bangkok, Thailand





Adapun total jumlah registrasi untuk ASEAN Architects (AA) per Mei 2017 adalah sebanyak 417, dengan rincian 11 dari Brunei Darussalam; 4 dari Kamboja ; 145 dari Indonesia; 9 dari Laos; 39 dari Malaysia; 12 dari Myanmar; 68 dari Filipina; 86 dari Singapura; 26 dari Thailand; dan 17 dari Vietnam.

Sejumlah hakikat dari MRA adalah sebagai berikut:

- Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil.
- Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat.
- Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis. Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal. Dengan kata lain MRA tidak langsung memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi. Pengakuan tidak memberikan

jaminan bahwa akan ada akses pasar. Namun MRA merupakan langkah awal yang penting untuk mempromosikan perpindahan tenaga kerja terampil itu.

Perlu diingat MRA tidak otomatis akan membawa pergerakan tenaga profesional secara bebas diantara negara anggota ASEAN karena sesuai MRA, sifatnya *voluntary* dan masih harus dikomitmenkan oleh negara ASEAN satu sama lain. Terdapat 6 kriteria yang digunakan dalam MRA, yakni pendidikan, ujian, pendaftaran, lisensi, pengalaman, serta kode etik profesi.

Selain itu ASEAN juga mengatur pergerakan tenaga kerja profesional lainnya melalui penandatanganan *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (MNP)* pada November 2012. Kesepakatan ini memberikan jaminan hak dan aturan tambahan yang sudah diatur di AFAS tentang MNP dan juga memfasilitasi MNP dalam menjalankan perdagangan dalam jasa dan investasi. Perjanjian MNP hanya mengatur pergerakan tenaga kerja profesional dengan kategori sebagai berikut:

- *Business Visitor* yaitu pegawai dan/atau wakil dari satu perusahaan di negara ASEAN yang melakukan kunjungan dalam rangka negosiasi perjanjian bisnis serta investasi dan tidak diizinkan melakukan transaksi dagang selama kunjungan.
- *Contractual Service Supplier* yaitu natural person yang merupakan pegawai dari suatu perusahaan di negara ASEAN melaksanakan suplai jasa kepada perusahaan di negara ASEAN lainnya berdasarkan kontrak diantara kedua perusahaan tersebut. Suplai jasa yang dilakukan bersifat sementara.
- *Intra Corporate Transferee* yaitu natural person yang merupakan pegawai dari suatu perusahaan di negara ASEAN dan dipekerjakan sementara untuk melakukan suplai jasa pada investasi perusahaan tersebut di negara ASEAN lainnya. Dalam perjanjian pasal 3 butir e juga dijelaskan bahwa untuk kategori *Intra Corporate Transferee*, tingkat jabatan/posisi natural person yang dapat menikmati fasilitas *ASEAN MNP Agreement* adalah jabatan/posisi *executive*, *manager* dan *specialist*.
- Kategori *natural person* untuk *temporary*

*entry* dan *temporary stay* lainnya yang dikomitmenkan lebih lanjut sesuai *Schedule of Commitments* dari masing-masing AMS

Pelaksanaan komitmen liberalisasi dari setiap negara anggota ASEAN untuk *ASEAN MNP Agreement* diatur dalam *Schedule of Commitment (SoC)* masing-masing negara. Implementasi dari perjanjian hanya berlaku untuk sektor-sektor pekerjaan yang dikomitmenkan ke dalam SoC dimaksud dan tidak berlaku untuk sektor-sektor yang tidak dikomitmenkan (*positive list*). Sesuai pasal 2 ayat 3, perjanjian MNP menegaskan bahwa setiap negara anggota ASEAN tetap memiliki otoritas untuk menerapkan peraturan nasional masing-masing dalam melaksanakan implementasi perjanjian. Bagi Indonesia, hukum mengenai tenaga kerja asing di atur di dalam UU 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. MNP juga menegaskan bahwa perpindahan tenaga kerja profesional di ASEAN, hanya dapat dilakukan melalui kontrak kerja sama antar badan hukum (*juridical persons*) di ASEAN atau melalui investasi badan hukum satu negara ASEAN di negara ASEAN lainnya.

---

## C. Investasi

Kerja sama investasi di ASEAN dipandu oleh *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang telah berlaku (*entry into force*/EIF) mulai tanggal 29 Maret 2012. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan kawasan investasi ASEAN yang liberal dan transparan sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. ACIA memuat empat pilar kerja sama investasi ASEAN, yakni liberalisasi, proteksi, fasilitasi, dan promosi. Prinsip utamanya adalah keterbukaan/transparansi, perlakuan yang sama, dan *international best practices*. Indonesia telah meratifikasi ACIA tanggal 8 Agustus 2011 melalui Perpres No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*.

Forum kerja sama investasi di ASEAN berada di bawah *ASEAN Investment Area (AIA) Council* yang merupakan *Ministerial Body* yang berada dibawah koordinasi *ASEAN Economic Ministers* yang bertanggung jawab untuk mengawal implementasi ACIA. Dalam melaksanakan tugasnya AIA dibantu oleh *Coordinating Committee on Investment (CCI)*.

Negara-negara ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) tetap menjadi sumber utama dalam intra-ASEAN FDI, dengan rata-rata *share* sebesar 97.6% sejak tahun 2008-2016. *Coordinating Committee on Investment (CCI)* telah menyusun *Protocol to Amend ACIA*. Indonesia dalam hal ini, telah meratifikasi *Protocol to Amend ACIA* tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui

Perpres No. 92 Tahun 2015 tentang Pengesahan *Protocol to Amend ACIA*.

## D. ASEAN Single Window

Pada tanggal 9 Desember 2009, Negara Anggota ASEAN (*ASEAN Member States* atau AMS) menandatangani perjanjian pembentukan *ASEAN Single Window (ASW)*. ASW dimaksudkan untuk mendukung integrasi ekonomi kawasan, khususnya dalam fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*) dan memperlancar arus pergerakan perdagangan barang. ASW merupakan *platform* yang terintegrasi dengan *National Single Window* masing-masing AMS guna memperlancar pertukaran data kepabean secara elektronik untuk pengurusan perijinan dan dokumen lainnya.

Indonesia beserta Malaysia, Singapura, dan Thailand telah melakukan pertukaran data secara langsung untuk formulir elektronik D ATIGA melalui ASW. Pengembangan ASW mendapat dukungan dari US-ACTI (*ASEAN Connectivity for Trade and Investment*), termasuk program-program *capacity-building* untuk negara-negara yang membutuhkannya, khususnya negara CLM.

## E. Kerja Sama Jasa Keuangan

*Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance* yang ditandatangani di

---

Menteri Perdagangan, Enggartiaso Lukita bersama Sekretaris Jenderal, Srie Agustina, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda serta Jajaran Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan berfoto bersama dalam acara Penutupan Trade Expo Indonesia 2016 yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran. Minggu (16/10). | Sumber Foto: Kementerian Perdagangan Indonesia

---

Thailand pada tahun 1997, merupakan kerangka dasar peningkatan kerja sama ASEAN di bidang keuangan. Selanjutnya, perundingan jasa keuangan dilakukan oleh *Working Committee on ASEAN Financial Service Liberalisation (WCFSL)* AFAS. Kerja sama keuangan di ASEAN ditujukan untuk membangun *financial stability, financial inclusiveness*, dan *financial safety net* yang dapat menopang *ASEAN Economic Community*.

Pada tahun 2011, para Pemimpin ASEAN mengamanatkan promosi keuangan inklusif. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2012 Indonesia telah menyelenggarakan *the 1<sup>st</sup> ASEAN Conference on Financial Inclusion*,



*ASEAN Financial Literacy Conference* di tahun 2013, serta menginisiasi pembentukan *WC on Financial Inclusion* tahun 2016.

Untuk memperkuat kerja sama dan integrasi sektor keuangan, disepakati untuk menyelenggarakan pertemuan *Joint ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM)*. Pertemuan *Joint AFMGM* pertama diselenggarakan di tahun 2015. Di sela sela pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tanggal 3 Mei 2016, telah ditandatangani *Protocol to Implement the Seventh Package of Financial Services Commitments*.



---

## F. Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM)

Salah satu bentuk kerja sama jasa keuangan di ASEAN adalah melalui *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) terbentuk pada 24 Maret 2010. CMIM adalah inisiatif ASEAN+3 dengan dua obyektiif utama, yakni menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek melalui *self-managed reserve pooling arrangement* (*pooling fund*), dan sebagai suplemen atas mekanisme keuangan internasional yang sudah berjalan. Pada bulan April 2011, *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (AMRO) didirikan sebagai *regional monitoring*

*and surveillance unit* yang mendukung implementasi dari CMIM.

Pada pertemuan ASEAN+3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral bulan Mei 2014, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menegaskan komitmen untuk memperkuat peran CMIM sebagai jaring pengaman keuangan regional. Lebih lanjut, CMIM didorong untuk menjalin kerja sama dengan institusi keuangan multilateral seperti IMF, di bidang pengawasan, pengaturan

dukungan likuiditas, serta pembangunan kapasitas. Pada tataran nasional, Indonesia berupaya menyejajarkan prosedur CMIM dengan nasional guna memperkuat efektivitas dan efisiensi manajemen krisis nasional.

Sejumlah kegiatan CMIM tahun 2016 diantaranya peningkatan porsi keterkaitan (*delinked portion*) dengan IMF, *Test Run* di tahun 2016 untuk fasilitas resolusi krisis yang dikaitkan dengan program IMF, penentuan indikator kualitatif untuk *CMIM Precautionary*

*Line* (CMIM-PL) berisi data indikator kunci ekonomi dan keuangan negara pihak ASEAN+3, dan *periodic review* dari perjanjian CMIM.

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Indonesia telah menandatangani perjanjian membentuk *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office* (AMRO), di Washington D.C. Amerika Serikat. *AMRO Agreement* mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2016, dan AMRO resmi menjadi sebuah organisasi internasional. AMRO dibentuk sebagai unit pengawas independen



Lokasi: Wat Phra Singh di Chiang Mai, Thailand.



ASEAN+3 untuk mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan ASEAN+3 serta mendukung implementasi CMIM. AMRO juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan institusi keuangan regional dan multilateral, termasuk dengan *Asian Development Bank* (ADB), IMF, dan *Bank for International Settlements* (BIS), khususnya di bidang yang akan meningkatkan kapabilitas institusi AMRO.

## G. KERJA SAMA KONEKTIVITAS ASEAN

Kerja sama peningkatan konektivitas ASEAN dilakukan dalam kerangka *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025 yang telah diadopsi pada KTT ke-28 ASEAN pada tanggal 6 September 2016 di Laos. Menindaklanjuti adopsi ini, pada tanggal 10 Januari 2017 telah diselenggarakan *Stand-Alone ACCC Meeting on the MPAC 2025 Implementation Arrangements* di Sekretariat ASEAN, Jakarta. MPAC 2025 ini menggantikan MPAC 2010 yang memuat memuat tiga pilar utama, yaitu

- konektivitas fisik/infrastruktur (*physical*),
- kelembagaan (*institutional*), dan
- antarmasyarakat (*people-to-people*).

MPAC merupakan solusi ASEAN menghadapi tantangan masih kurang terhubungnya antarnegara anggota dalam proses pembangunan Masyarakat ASEAN pada tahun 2025.

Dalam rangka merealisasikan MPAC telah dibentuk beberapa mekanisme guna memonitor dan mendukung implementasinya. Mekanisme dimaksud di antaranya adalah ASEAN *Connectivity Coordinating Committee* (ACCC), *National Coordinators*, dan Sekretariat ASEAN.

ACCC bertugas untuk mengawasi implementasi MPAC dan membangun kemitraan dengan Mitra Wicara dan organisasi/badan internasional dalam merealisasikan konektivitas ASEAN. Dalam kaitan itu, perwakilan Indonesia sebagai anggota ACCC dijabat oleh Wakil Tetap/Duta Besar RI untuk ASEAN.

Adapun lima *strategic area* yang menjadi fokus agenda MPAC 2025, yaitu:

### SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengoordinasikan sumber daya untuk mendukung seluruh siklus proyek infrastruktur di ASEAN, termasuk persiapan proyek, peningkatan produktivitas infrastruktur, dan *capacity building*. Strategi ini juga mencakup pertukaran pengetahuan mengenai model “*smart urbanization*” di negara-negara anggota ASEAN yang secara bersamaan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang baik.

### DIGITAL INNOVATION

Nilai teknologi digital di ASEAN berpotensi mencapai US\$ 625 miliar pada tahun 2030 (atau sekitar 8 persen dari perkiraan GDP ASEAN tahun 2030), yang berasal dari peningkatan efisiensi, produk dan jasa baru, dan lain-lain. Dalam rangka merealisasikan potensi tersebut, dibutuhkan penyusunan kerangka regulasi layanan jasa digital baru (seperti manajemen data dan jasa keuangan digital); pertukaran *best practices* untuk *open data*; dan peningkatan akses teknologi digital oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

### SEAMLESS LOGISTICS

Kemajuan konektivitas ASEAN memerlukan sistem logistik yang baik. Meskipun demikian, efisiensi logistik belum meningkat sesuai target MPAC, dengan ukuran waktu dan biaya transportasi yang dibutuhkan. Salah satu tantangan dasar adalah permasalahan koordinasi antarinstansi pemerintah dan kurangnya pertukaran *best practice*.

Oleh karena itu, terdapat kesempatan untuk menciptakan mekanisme yang mendukung kolaborasi lebih baik di antara perusahaan logistik, institusi pendidikan, dan negara-negara anggota ASEAN. Mekanisme tersebut dapat membantu

- mengidentifikasi *bottlenecks* di wilayah-wilayah kunci *supply chain* kawasan;
- mengumpulkan dan bertukar *best*

*practices* tentang bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan di kawasan; dan

- mengidentifikasi area kebijakan penting yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

### REGULATORY EXCELLENCE

Terdapat kebutuhan untuk menanamkan *good regulatory practice* (GRP) dalam persiapan, penerapan, dan implementasi peraturan, regulasi, dan prosedur di kawasan. Tujuan strategi ini adalah untuk mendukung implementasi kebijakan kunci pada agenda konektivitas ASEAN, terutama pada harmonisasi standar, pengakuan bersama dan regulasi teknis, serta penanganan distorsi perdagangan non-tarif.



Peresmian jalur RORO Bitung-General Santos-Davao semakin mempermudah konektivitas transportasi laut di ASEAN.



---

## PEOPLE MOBILITY

Pembatasan berpergian bagi warga negara ASEAN di dalam kawasan merupakan masa lalu. Meskipun demikian, masih ada peluang-peluang untuk meningkatkan mobilitas di ASEAN. Peluang-peluang tersebut termasuk memfasilitasi perjalanan wisata dengan mengatasi kurangnya informasi mengenai opsi perjalanan dan menyediakan mekanisme yang lebih sederhana dalam pengajuan permohonan visa. Selain itu, terdapat peluang untuk memperkuat mobilitas keterampilan di kawasan dengan menyusun kerangka kualifikasi pada pekerjaan kejuruan yang penting, serta untuk mendorong mobilitas antarmahasiswa di universitas seluruh ASEAN.

Saat ini, masih terdapat beberapa *initiative* MPAC 2010 yang dilanjutkan hingga MPAC 2025, termasuk jalur pelayaran laut *Roll-on/Roll-off* (RoRo). Adapun perkembangan terakhir implementasinya, yaitu:

### a. Dumai—Malaka

Pengembangan infrastruktur di pelabuhan Dumai sudah rampung dan siap untuk mengoperasionalkan rute Dumai-Malaka. Malaysia di lain pihak berkomitmen akan mengoperasionalkan rute Dumai-Malaka karena rute tersebut sejalan dengan *Malaka Development Master Plan*.

### b. Belawan—Penang—Phuket *Triangle Route*

Indonesia tetap berkomitmen untuk melakukan pembangunan rute Belawan—Penang—Phuket *Triangle Route*. Malaysia menyampaikan bahwa hambatan pengembangan rute tersebut adalah kekurangan infrastruktur dan fasilitas sehingga membutuhkan investasi yang besar.

### c. Davao/General Santos—Bitung

Jalur pelayaran laut Bitung-Davao/General Santos telah diluncurkan oleh Presiden Filipina dan Presiden RI di sela-sela KTT ke-12 BIMP-EAGA di Davao, Filipina pada tanggal 30 April 2017

## H. KERJA SAMA TRANSPORTASI ASEAN

*Kuala Lumpur Transport Strategic Plan* (KLTSPP) disepakati dan diadopsi pada Pertemuan ke-21 *ASEAN Transport Ministerial / ATM* (November 2015) sebagai lanjutan dari *ASEAN Strategic Transport Plan / Brunei Action Plan* (BAP). KLTSPP merupakan dokumen pedoman kebijakan regional berisi 30 target spesifik, 78 aksi dan 221 titik capaian di bidang transportasi udara, darat, maritim, sustainable transport serta fasilitasi transportasi. Pada pertemuan ke-22 ATM bulan November 2015, para Menteri Transportasi ASEAN menyetujui dan menyepakati:

- ASEAN Intelligent Transport System (ITS) Policy Framework 2.0;*
- Framework of Cooperation for Near Coastal Voyages (NCV) Certificates of Competency;* dan
- TOR for the ASEAN-US Aviation Cooperation.*

## TRANSPORTASI UDARA

Dalam bidang kerja sama transportasi udara, *ASEAN Open Sky Policy* merupakan kesepakatan untuk membuka hak lintas dan angkut udara (penumpang dan barang) antar sesama anggota negara ASEAN dengan tujuan

akhir membentuk *ASEAN Single Aviation Market* (ASAM). *ASEAN Open Sky* hanya menegosiasikan hak angkut udara (*Freedoms of the Air*) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5.

## TRANSPORTASI LAUT

Kerja sama transportasi laut di ASEAN ditujukan untuk membentuk *ASEAN Single Shipping Market* serta perwujudan jaringan kapal angkut antar pulau atau RORO dengan 3 jalur prioritas, yaitu Dumai—Malaka, Belawan—Penang—Phuket *Triangle Route*, Davao/General Santos—Bitung.

## TRANSPORTASI DARAT DAN TRANSPORT FACILITATION

Isu utama yang dibahas adalah perwujudan *ASEAN Highway Network* (AHN) dan *Singapore-Kunming Rail Link* (SKRL). Ruas jalan di Indonesia yang termasuk AHN adalah ruas jalan Merak-Cikampek, Cikampek-Semarang, Semarang-Banyuwangi, dan Gilimanuk-Denpasar.

## I. KERJA SAMA ENERGI ASEAN

Kerja sama energi di kawasan ASEAN tertuang dalam *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation* (APAEC). Tema APAEC 2016-2025 Phase 1 adalah “*Enhancing Energy Connectivity and Market Integration in ASEAN to Achieve Energy Security, Accessibility, Affordability and Sustainability for All*” dengan target yang ingin dicapai 7 (tujuh) programme area:

- ASEAN Power Grid* (perdagangan listrik);
- Trans ASEAN Gas Pipeline* (konektivitas ketahanan energi dan aksesibilitas jaringan pipa);
- Coal and Clean Coal Technology / CCT* (meningkatkan citra batubara);
- Energy Efficiency and Conservation* (mengurangi intensitas energi sebesar 20% tahun 2020 basis tahun 2005);
- Renewable Energy / RE* (target aspirasi *Renewable Energy* sebesar 23% tahun 2025);
- Regional Energy and Policy Planning* (profil energi yang lebih baik dalam kerangka internasional); dan
- Civilian Nuclear Energy* (meningkatkan kemampuan dalam bidang energi nuklir).

Dalam kerja sama *ASEAN Power Grid*, ASEAN berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan proyek prioritas *ASEAN Power Grid*, antara lain Proyek APG Sarawak-Kalimantan Barat yang telah berhasil dilaksanakan pada 20 Januari 2016, serta pelaksanaan *Laos-Thailand-Malaysia-Singapura Power Integration Project* (LTMS-PIP) tahun 2018. Pada Pertemuan ke-34 AMEM di Nay Pyi Taw, Myanmar, 19-23 September 2016 telah dilakukan penandatanganan MOU LTMS-PIP *phase 1* oleh tiga negara yakni Laos, Thailand dan Malaysia. Sementara Singapura akan ikut terlibat pada fase berikutnya.

Terkait dengan kerja sama Trans ASEAN *Gas Pipeline*, Total konektivitas jaringan pipa





gas (*gaspipeline*) saat ini menjadi 3.673 km. Dalam memenuhi kebutuhan gas di ASEAN, konektivitas pengiriman gas dilakukan secara bilateral maupun multilateral dan pengiriman *Liquefied Natural Gas* (LNG) melalui *virtual pipeline* berupa *LNG Storage* dan fasilitas *regasification*.

Untuk mendorong operasionalisasi ASEAN *Petroleum Security Agreement Coordinated Emergency Response Measures* (APSA CERM), akan dilakukan kajian terhadap APSA disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Kajian ini akan menyebabkan beberapa revisi pada APSA.

## I. Kerja Sama Ketahanan Pangan ASEAN

Pada tahun 2009, para Pemimpin ASEAN menyetujui *Statement on Food Security in the ASEAN Region* dengan komitmen utama: ketahanan pangan sebagai “*a matter of permanent and high priority policy*”.

Kerangka utama kerja sama ketahanan pangan ASEAN kemudian dituangkan dalam ASEAN *Integrated Food Security Framework* (AIFS), yang diuraikan secara lebih teknis dalam *Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region* (SPA-FS). Melengkapi kerangka tersebut, ASEAN+3 memiliki project *ASEAN Food Security Information System* (AFSIS) dan menyetujui ASEAN *Plus Three Comprehensive Strategy on Food Security and Bioenergy Development* beserta *Strategic Plan of Action on Food Security* (SPA-FS) 2011-2013. Pada Juni 2012 dimulai pelaksanaan ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (APTERR) untuk menjaga cadangan beras dalam keadaan darurat. APTERR mempunyai cadangan beras sebanyak 787 ribu ton, yang akan dimanfaatkan jika terjadi bencana alam. Pada Pertemuan ke-36 ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF) di Myanmar, September 2014, menyetujui SPA-FS fase kedua yakni untuk tahun 2015-2019. Selanjutnya pada Pertemuan AMAF ke-37, September 2015, ASEAN telah menyetujui rencana strategis, Kerjasama ASEAN dibidang Pangan,

Pertanian, dan Kehutanan tahun 2016-2025, dengan visi “Pertanian dan Kehutanan yang kompetitif, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, dan terintegrasi dengan ekonomi global, yang berdasarkan pasar tunggal, berbasis produksi yang berkontribusi kepada ketahanan pangan, nutrisi dan kesejahteraan komunitas ASEAN”. Untuk mengukur implementasi *SPA-Food, Agriculture and Forestry 2016-2025*, Pertemuan Special SOM AMAF ke-37 (Agustus 2016) menyetujui pengembangan *Key Performance Indicators* (KPIs) of the *SPA-Food, Agriculture and Forestry 2016-2025*. Selain itu juga disepakati *Strategic Plan of Action* untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

## J. Kerja Sama Perikanan ASEAN

Dalam rangka mewujudkan kerja sama perikanan yang komprehensif, kerangka kerja sama perikanan dibawah pilar ekonomi ASEAN diatur dalam 3 instrumen. Pertama, *Southeast Asia Fisheries Development Center* (SEAFDEC), yang dibentuk tahun 1967, dengan tujuan mendorong pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan. Kedua, ASEAN *Fisheries Consultative Forum* (AFCF), dibentuk Oktober 2008, menggantikan ASEAN *Regional Fisheries Management Mechanism* (ARFMM) di bawah kerangka ASEAN *Working Group on Fisheries/ ASWGF*i (dibawah koordinasi Pertemuan Menteri Pertanian ASEAN/AMAF). Terakhir, ASEAN juga menjalin kerja sama dengan SEAFDEC, di bawah payung “ASEAN-SEAFDEC *Strategic Partnership* (ASSP)”. Konsep *Strategic Plan of Action* (SPA) for ASEAN *Cooperation on Fisheries* (2016-2020)

telah disetujui pada ASEAN *Sectoral Working Group on Fisheries* (ASWGF*i*) (Juni 2016) lalu disahkan pada pertemuan *Special Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry* (Special SOM AMAF) (22-25 Agustus 2016).

Berikut merupakan capaian kerja sama perikanan ASEAN sejauh ini:

- Regional Guidelines for Preventing the entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing into the Supply Chain.*
- ASEAN Catch Documentation Scheme* (ACDS).
- Regional Fishing Vessel Record* (RFVR).
- ASEAN Good Aquaculture Practices* (GAqP).
- Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Combating IUUF and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products.*







Lokasi: Pasar Terapung di Banjarmasin, Indonesia

Forum kerja sama perikanan di ASEAN saat ini hanya ada di tingkat *working group*. Untuk memberikan bobot politis yang lebih tinggi bagi kerja sama penanggulangan *IUU Fishing*, diperlukan forum pembahasan dengan tingkat yang lebih tinggi. Indonesia terus mendorong pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*) di tingkat ASEAN. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan langkah kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi IUUF dan *over-fishing*. Indonesia juga mendorong pembangunan sistem IUUF untuk pengawasan dan sertifikasi produk perikanan guna menghindari produk hasil IUUF masuk dalam rantai pasok regional.

## K. Kerja Sama UMKM ASEAN

Kerja sama ASEAN di bidang Usaha Kecil dan Menengah telah dirintis sejak tahun 1985 melalui pembentukan *ASEAN Working Group on Small and Medium Enterprises Agencies*. Kerja sama UMKM ASEAN dipandu oleh *ASEAN Strategic Action Plan for SME Development* (SAP SMED) 2012–2015. Di ASEAN, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dengan statistik:

- i) jumlah total mencapai 96% dari seluruh perusahaan di ASEAN; ii) kontribusi penyerapan tenaga kerja sekitar 50–97%; iii)

kontribusi terhadap PDB sekitar 30–60%, dan; iv) kontribusi terhadap ekspor sekitar 19–31%.

Secara umum, UMKM di ASEAN memiliki tantangan utama, yaitu akses kepada keuangan/permodalan, teknologi, dan pasar. Di Indonesia, rendahnya semangat kewirausahaan dan kemampuan manajerial menjadi juga tantangan lainnya.

Pada Pertemuan ke-47 *ASEAN Economic Ministers' Meeting* (AEM) bulan Agustus 2015, para Menteri Ekonomi telah mengesahkan *ASEAN Strategic Action Plan for SME Development* (SAP SMED) 2016-2025 (SAP SMED 2025) yang disahkan pada KTT ke-27, November 2015. SAP SMED 2025 ditargetkan pada peningkatan produktifitas, teknologi dan inovasi, akses keuangan, akses pasar dan internasionalisasi, kebijakan dan peraturan, serta wirausaha dan kapasitas SDM.

Pada Pertemuan Pertama *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (ACCMSME) (Singapura, 30 Mei - 3 Juni 2016), ASEAN membahas implementasi *ASEAN Strategic Action Plan for SME Development* (SAP SMED) 2016-2025 dan kerjasama dengan badan terkait dan organisasi multilateral. *The Second ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises* (the 2nd ACCMSME) pada 21 - 25 November 2016 di Bandar Seri Begawan menghasilkan *ASEAN Strategic Action Plan for SME Development* (SAP SMED) 2016-2025. Program kunci yang dikoordinir oleh Indonesia adalah proyek *ASEAN Business Incubator Network* (ABINet) atas dukungan *Japan-ASEAN Incubator Fund* (JAIF) yang akan dimulai Juni 2017 – Mei 2019. Diharapkan dapat mendorong kemajuan pengembangan UMKM inovatif pemula di kawasan ASEAN melalui inkubator bisnis dan teknologi.



Kementerian Luar Negeri mendorong UKM Indonesia mampu menembus pasar ASEAN dengan menggelar CEO Forum 2017: *Sharing of Success Stories, Experiences and Best Practices*, menghadirkan narasumber pengusaha Indonesia yang telah go ASEAN seperti dari Ciputra Group, Martha Tilaar Group, Alfamart, PT. Dua Kelinci dan Kebab Turki Baba Rafi.



## L. Kerja Sama Pariwisata ASEAN

Kerja sama ASEAN di bidang pariwisata diatur dalam *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)* 2016 - 2025. ATSP mengusung visi *ASEAN as single destination*, yang akan memberikan kontribusi signifikan kepada *socio-economy* masyarakat ASEAN dengan tagline “*One Community Towards Sustainability*”. *Target outcomes* kerja sama pariwisata ASEAN adalah menjadikan ASEAN sebagai tujuan pariwisata yang berkualitas tinggi yang mampu menawarkan pengalaman ASEAN yang unik, beragam, serta memegang teguh nilai kebudayaan, pembangunan berkelanjutan serta

pembangunan sektor Pariwisata yang inklusif (*sustainable, balanced and inclusive tourism*).

Untuk mendukung pergerakan *tourism professionals*, ASEAN telah menandatangani *Agreement on the Establishment of Regional Secretariat on the Implementation of MRA TP* di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015. Sekretariat Regional ini akan berlokasi di Jakarta dengan fokus pada program *capacity building* untuk *tourism professionals* di ASEAN dengan melakukan *training*, uji

kompetensi, dan sertifikasi. Selain itu, *ASEAN TP Registration System/ATPRS* ([www.atprs.org](http://www.atprs.org)) telah secara resmi diluncurkan di Jakarta pada 9 Agustus 2016. ATPRS merupakan media untuk memfasilitasi pendaftaran para *tourism professionals* dan pemangku kepentingan MRA-TP terkait lainnya. Indonesia sedang dalam tahap akhir proses ratifikasi *Agreement on the Establishment of the ASEAN Regional Secretariat on the Implementation of MRA TP* melalui Peraturan Presiden (Perpres).

## M. Kerja Sama Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

Dokumen *ASEAN ICT Masterplan (AIM)* 2015 disahkan pada pertemuan ke-10 *ASEAN Telecommunication and IT Ministers Meeting (TELMIN)* pada Januari 2011. Dokumen tersebut mencakup 6 *strategic thrust*, yakni:

(i) transformasi ekonomi, (ii) pendekatan dan pemberdayaan masyarakat, (iii) inovasi, (iv) pengembangan infrastruktur, (v) peningkatan SDM, dan (vi) penghubung kesenjangan digital.

Implementasi AIM 2015 dikoordinir oleh TELMIN dengan melibatkan *ASEAN Telecommunications and IT Senior Officials Meeting (TELSOM)* dan *ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC)* dalam mendukung pembuatan kebijakan. Selain itu, juga dibentuk *ASEAN ICT Center* untuk mengawasi pelaksanaan seluruh program AIM 2015.

Selama periode 2011-2015, terdapat 29 langkah

Lokasi: Pulau Padar, Flores Indonesia



Lokasi: Candi Borobudur, Magelang, Indonesia

“

Untuk mendukung pergerakan *tourism professionals*, ASEAN telah menandatangani *Agreement on the Establishment of Regional Secretariat on the Implementation of MRA TP* di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015.



aksi dan 87 proyek AIM 2015 yang telah selesai diimplementasikan. Pasca 2015, telah diadopsi *ASEAN ICT Masterplan* (AIM) 2020 pada Pertemuan TELMIN ke-15 bulan November 2015. AIM 2020 mengedepankan aspek-aspek

**(i) ICT in the Single Market, (ii) New Media and Content**, dan **(iii) Information Security and Assurance**, tanpa mengabaikan 6 *strategic thrust* yang tertera dalam dokumen AIM 2015.

Pada pertemuan TELMIN ke-16 bulan November 2016, disahkan sejumlah dokumen diantaranya:

**(i) ASEAN Personal Data Protection Framework**, **(ii) ASEAN Framework on Security**, dan **(iii) Brunei Darussalam Declaration**.  
Pada Pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan beberapa proposal kegiatan diantaranya **(i) ASEAN Cyber Wellness Training of Tutors** dan **(ii) Framework for Infrastructure Investment to Balance Policy Goals of Broadband Development and OTT Expansion**.

## N. Kerja Sama Sains, Teknologi, dan Informasi

Kerja sama ASEAN di bidang sains dan teknologi pertama kali dicetuskan pada pertemuan *Ad-hoc Committee on Science and Technology* di Jakarta tanggal 27-29 April 1970. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa tujuan kerja sama ASEAN di bidang sains dan teknologi yakni:

- f. menginisiasi dan mengintensifkan kerja sama regional dalam bidang sains
- g. menghasilkan dan mempromosikan

- pengembangan tenaga ahli dan tenaga kerja dalam bidang sains dan teknologi di kawasan ASEAN
- h. memfasilitasi dan mempercepat transfer perkembangan sains dan teknologi antar negara anggota ASEAN serta dari negara industri maju ke kawasan ASEAN
- i. memberikan dukungan dan bantuan dalam aplikasi hasil penelitian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efektif di kawasan ASEAN
- j. memberikan dukungan terhadap implementasi program ASEAN

Pada tahun 1971, *ad hoc meeting* tersebut diinstitusionalisasikan menjadi *ASEAN Permanent Committee on Science and Technology* (PCOST). Pada tahun 1978, PCOST berubah nama menjadi *ASEAN Committee on Science and Technology* (COST).

Untuk mendorong pengembangan sains dan teknologi, COST membentuk *ASEAN Plan of Action on Science and Technology* (APASTI). APASTI untuk periode 2016-2025 telah disahkan pada bulan November 2015 oleh *16<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology*. Visi APASTI 2016-2025 adalah *A Science, Technology and Innovation-enabled ASEAN, which is Innovative, competitive, vibrant, sustainable and economically integrated*.

- Adapun tujuan APASTI 2016-2025 adalah:
- 1. Sains, teknologi, dan inovasi (STI) menjadi solusi tantangan utama dari abad saat ini;
  - 2. Ekonomi kawasan yang terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan privat terutama UMKM dan percepatan mobilisasi tenaga ahli;
  - 3. Kesadaran yang tinggi terhadap sains, teknologi, dan inovasi dan dampak

- menguntungkan dari STI pada tingkat dasar (*bottom of the pyramid*);
- 4. Perekonomian yang didorong oleh inovasi dengan enkulturasi STI dan sistem yang menumbuhkan dan memberlanjatkan STI melalui penguatan teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya ahli pemuda, wanita, sektor privat;
- 5. Kolaborasi R&D yang aktif, komersialisasi teknologi dan kewirausahaan serta jaringan *centre of excellence*;
- 6. Sistem manajemen STI yang terpadu dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 untuk mendukung inovasi ASEAN mencapai pasar global yang mempromosikan inovasi, integrasi, dan memperkecil kesenjangan pembangunan antar negara anggota ASEAN.

Untuk mencapai tujuan tersebut, COST memiliki 4 *thrust* yakni:

**Thrust 1:** Meningkatkan kolaborasi strategis antar akademisi, institusi penelitian, jejaring *centres of excellence*, dan sektor privat untuk menciptakan ekosistem yang efektif untuk pengembangan kapabilitas, transfer teknologi, dan komersionalisasi.

**Thrust 2:** Meningkatkan mobilitas ilmuwan dan peneliti, konektivitas *people-to-people* dan memperkuat keterlibatan wanita dan pemuda dalam STI.

**Thrust 3:** Membentuk sistem yang inovatif, dan kemitraan strategis dengan mitra dialog dan mitra lainnya untuk memperkuat perusahaan yang bergerak dibidang STI untuk mendukung UMKM, memperkuat penciptaan ilmu, dan aplikasi STI untuk meningkatkan daya saing.

**Thrust 4:** Meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat enkulturasi STI untuk meningkatkan kerja sama sains dan teknologi di ASEAN.

Pada tahun 2016, COST yang semula berada di bawah pilar sosial budaya dipindah ke pilar ekonomi. Perpindahan ini didasarkan pada upaya memajukan perekonomian yang perlu disokong dengan Sains, Teknologi, dan Inovasi (STI). Capaian COST selama tahun 2016 diantaranya adalah peluncuran *Exchange Programme for Young ASEAN Officials di bawah Sakura Science Plan, Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform* (JASTIP) dan *Young Southeast Asian Leaders Initiative* (YSEALI). Selain itu, COST juga telah melaksanakan *7<sup>th</sup> ASEAN Plus Three Teacher Workshop and Student Camp* dan *5<sup>th</sup> ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey* yang bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi siswa berbakat sains beserta pembimbingnya. Pada tahun yang sama, 2 pelajar dari Indonesia dan Singapura berhasil mendapatkan *1<sup>st</sup> Da Vinci Science Award and Scholarship* yang merupakan salah satu inisiatif dari *ASEAN Plus Three Center for the Gifted in Science* (ACGS).

---

### 3. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN+1

Dalam upaya mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan ekonomi global, ASEAN telah melakukan serangkaian kerja sama dengan beberapa mitra wicara dalam bentuk kerja sama FTA+1.

#### A. ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)

Kerja sama ekonomi ASEAN-Australia-Selandia Baru dilakukan kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area Agreement* (AANZFTA). Proses negosiasi AANZFTA dimulai pada tahun 2005 dan ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. AANZFTA secara signifikan telah meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi para pihak. Volume perdagangan ASEAN dengan Australia pada tahun 2015 mencapai USD 51,79 milyar sedangkan dengan New Zealand mencapai USD 8,46 milyar. AANZFTA juga dipandang sangat penting untuk mendekatkan hubungan *people-to-people* kedua negara.

Di bidang *Economic Cooperation*, sampai dengan akhir Desember 2015 terdapat 34 proyek dari 59 proyek *Economic Cooperation Work Programme* (ECWP) yang telah dilaksanakan, dan 7 proyek yang sedang dalam proses implementasi serta 6 proyek *substantially completed*. Total pendanaan seluruh kegiatan (Januari-Desember 2015)

sebesar AUD 4.3 juta, menggunakan anggaran *AANZFTA Economic Cooperation Support Programme* (AECSP).

#### B. ASEAN-China FTA (ACFTA)

Pada Pertemuan ke-16 *ASEAN-China Summit* tanggal 9 Oktober 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN dan RRT menyambut inisiatif untuk melakukan *upgrading* ASEAN – China FTA. Adapun latar belakang dari *upgrading* ASEAN-China FTA tersebut adalah untuk meningkatkan ACFTA guna dapat merespon perkembangan arsitektur ekonomi dunia. Perundingan *upgrading* ACFTA telah dilaksanakan sebanyak 4 putaran, dengan perundingan terakhir di Beijing pada tanggal 26-30 Oktober 2015. Pertemuan berhasil menyelesaikan *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements thereunder*.

*Protocol to upgrade* ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan RRT di sela-sela pelaksanaan *ASEAN Summit* di Kuala Lumpur pada tanggal 22 November 2015. Protokol ini meliputi beberapa elemen penting dalam kerjasama ekonomi kedua pihak yaitu perdagangan barang (kepabeanan dan fasilitas perdagangan), jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi teknik. Protokol ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasar



Lokasi: The Bund, Shanghai





dan menyeimbangkan neraca perdagangan kedua pihak. Hal ini terutama karena telah disepakatinya pelonggaran persyaratan asal barang (ROO) oleh RRT bagi sejumlah produk ekspor unggulan ASEAN seperti tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk kayu, furnitur, kertas dan produk kertas, produk kimia dasar dan hilir, bijih besi, pupuk, plastik dan produk plastik, besi baja, produk logam, otomotif, pesawat, dan alas kaki. Protokol tersebut mulai *entry into force* pada tanggal 1 Juli 2016 dan Indonesia saat ini sedang dalam proses ratifikasi Protokol dimaksud.

Indonesia mendorong realisasi target perdagangan dua arah sebesar USD 1 triliun dan target total investasi sebesar USD 150 milyar pada tahun 2020, dengan fokus utama penyeimbangan neraca perdagangan baik antara RRT-ASEAN maupun RRT dengan masing-masing negara anggota ASEAN.

### C. ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA)

Perundingan *ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement* (AHKFTA) bergulir sebagai pelaksanaan dari amanat pemimpin ASEAN pada KTT ke-23 (Oktober 2013). Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat melakukan negosiasi AHKFTA berdasarkan permintaan Hong Kong untuk mengakses *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Sampai saat ini, ASEAN dan Hong Kong telah melaksanakan sembilan putaran perundingan. AHKFTA diharapkan akan ditandatangani pada tahun 2017. Indonesia mengharapkan adanya nilai tambah dan *balanced outcome* pada AHKFTA untuk memastikan manfaat dari perjanjian. Hal ini dapat ditempuh melalui kerja sama *capacity*

*building* dan sektor jasa utamanya di sektor finansial/perbankan ataupun *Movement of Natural Person* (MNP).

### D. ASEAN-India FTA (AIFTA)

*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India* ditandatangani para Pemimpin ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003. Kerja sama ini dilanjutkan penandatanganan *AIFTA Trade In Goods (TIG) Agreement* (Agustus 2009), berlaku efektif bagi India, dan ASEAN kecuali Laos dan Kamboja. Total nilai perdagangan ASEAN dengan India mengalami peningkatan yang signifikan dari USD 37.2 milyar di tahun 2007 menjadi USD 58,715 milyar di tahun 2015. Surplus neraca perdagangan ASEAN-India juga mengalami peningkatan dari USD 12.4 milyar menjadi USD 19.75 milyar di tahun 2015.

Di bidang perdagangan jasa dan investasi, ASEAN dan India telah menandatangani *ASEAN-India Trade in Services Agreement* dan *ASEAN-India Investment Agreement*

pada *ASEAN Economic Ministers Meeting* ke-46 secara *ad-referendum*. Indonesia, saat ini masih dalam proses penyelesaian prosedur domestik untuk meratifikasi kedua perjanjian tersebut. Untuk proses ratifikasi *ASEAN-India Investment Agreement*, Indonesia memutuskan untuk menunda seiring dengan revisi *Bilateral Investment Treaty*.

Pertemuan ke-19 ASEAN India SOM di New Delhi bulan April 2017 mencatat bahwa hingga Maret 2017 tercatat 21 prioritas kerja sama tahun 2016-2018 yang telah tercapai. Lebih lanjut, India menyampaikan kembali peningkatan kontribusi India sebesar US\$ 50 juta pada *ASEAN-India Fund* yang fokus pada proyek di bidang otomotif, keanekaragaman hayati, kesehatan, kepemudaan dan pembangunan kawasan Mekong-Gangga.

Dengan jumlah penduduk kedua pihak yang mencapai lebih dari 1,8 milyar dan kombinasi GDP lebih dari USD 3.8 triliun, AIFTA memberikan manfaat besar mendorong

integrasi ekonomi di kawasan. FTA antara ASEAN dengan India yang berlaku efektif sejak Januari 2010 telah membantu meningkatkan akses pasar produk Indonesia untuk masuk ke pasar India. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan RI, meskipun volume perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2015 mencapai USD 14,45 milyar, menurun 4,27% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar USD 16,2 milyar, namun surplus Indonesia meningkat dari USD 8,29 milyar (2014) menjadi USD 8,97 milyar (2015).

### E. ASEAN-Japan







Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* diusulkan pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 saat Keketuaan Indonesia. | Sumber Foto: [www.officialgazette.gov.ph](http://www.officialgazette.gov.ph)

## Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

Landasan pembentukan perdagangan bebas ASEAN dan Jepang adalah *Joint Declaration of the Leaders of the Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan* yang ditandatangani pada tanggal 5 Nopember 2002, serta *Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan* yang ditandatangani tanggal 8 Oktober 2003.

Dalam KTT ASEAN-Japan ke-8, para pemimpin ASEAN dan Jepang menyepakati Perjanjian Kerjasama Ekonomi ASEAN-Jepang (AJCEP) dan mulai dilakukan negosiasi pada bulan April 2005 dan ditandatangani pada bulan Maret dan April 2008 secara *ad-referendum*. Perjanjian tersebut telah berlaku efektif per 1 Desember 2008.

AJCEP merupakan perjanjian ekonomi antara ASEAN dan Jepang yang bersifat komprehensif serta mencakup bidang perdagangan barang, jasa, investasi, *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Technical Barriers to Trade (TBT)* dan kerjasama ekonomi. Indonesia telah meratifikasi perjanjian AJCEP melalui Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pengesahan Persetujuan AJCWP.

## F. ASEAN-Korea FTA (AKFTA)

Pembentukan *ASEAN-ROK Free Trade Agreement (AKFTA)* disepakati pada KTT ASEAN di Bali, Oktober 2003. Negosiasi AKFTA dimulai pada awal 2005 dan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* antara ASEAN-ROK ditandatangani pada 13 Desember 2005. Perjanjian tersebut disepakati untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas

melalui mekanisme menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea.

Tujuan AKFTA antara lain adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam-CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara negara anggota.

Implementasi nyata AKFTA diharapkan dapat mendorong pencapaian target perdagangan dua arah sebesar USD 200 miliar pada tahun 2020.

## G. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Pada KTT ASEAN ke-19 tahun 2011 saat Keketuaan Indonesia, para Pemimpin ASEAN sepakat untuk mengkonsolidasikan perjanjian *ASEAN Free Trade Agreement + 1 (FTA +1)* yang telah ada dan membentuk *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Usulan pembentukan RCEP disambut baik oleh Mitra FTA/*ASEAN FTA's Partners/AFIP*

(Australia, India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, dan Tiongkok) dan diluncurkan di sela-sela KTT ASEAN ke-21 tahun 2012. Perundingan dimulai pada tahun 2013 dan awalnya direncanakan tuntas pada tahun 2015.

Dalam perkembangannya, negosiasi RCEP tidak dapat diselesaikan pada tahun 2015 dan untuk itu para Kepala Negara/Pemerintahan RCEP telah mengeluarkan *Joint Statement* di sela-sela KTT Asia Timur ke-10 pada bulan November 2015, yang antara lain menugaskan para Menteri dan negosiator untuk menuntaskan negosiasi pada tahun 2016. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dipenuhi, dan untuk itu para Kepala Negara/Pemerintahan RCEP pada tahun 2016 mengeluarkan *Joint Statement* yang meminta mengintensifkan negosiasi menuju swift conclusion perjanjian RCEP.

Perundingan RCEP telah dilaksanakan sebanyak 18 putaran, dengan perundingan terakhir yang dilaksanakan di Pasay City, Filipina pada tanggal 2-12 Mei 2017. Hingga saat ini perundingan telah berhasil menyelesaikan dua *Chapters*, yaitu *Chapter on Economic and Technical Cooperation* dan *Chapter on Small and Medium Enterprises*. RCEP memiliki arti penting dan potensi besar karena

(i) dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan di kawasan, (ii) merupakan upaya menuju integrasi ekonomi yang lebih luas di kawasan, (iii) mencakup lebih dari setengah jumlah penduduk dunia, (iv) penyumbang 30% dari output dan nilai perdagangan dunia, (v) integrasi pasar ASEAN diperkuat dengan integrasi RCEP, dan (vi) upaya menuju integrasi ekonomi yang lebih luas di kawasan.



# MASYARAKAT SOSIAL BUDAYA ASEAN

Sejak ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 hingga disahkannya *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) sebagai dokumen kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN, ASEAN telah menunjukkan evolusinya dari masa ke masa. Pada 8 Agustus 2017, ASEAN genap berumur 50 tahun dan di ulang tahun emasnya, berbagai capaian dan juga tantangan memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional.

Masyarakat ASEAN telah terbentuk pada 31 Desember 2015. Pada Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, hal ini ditandai dengan implementasi Cetak biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang berjumlah 339 *action lines* yang telah tercapai 100%. Hal ini disampaikan oleh Sekjen ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 21-22 November 2015. KTT ke-27 juga mengesahkan Cetak biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 yang mempunyai karakteristik dan elemen-elemen yaitu:

- engages and benefits people;*
- inclusive;*
- sustainable;*
- resilient;* dan,
- dynamic.*

Melalui visi ASEAN 2025, diharapkan agar masyarakat ASEAN dapat tinggal di kawasan yang aman, damai, dan sejahtera, terintegrasi dan mampu mempertahankan mekanisme



*Menlu RI dan Dirjen Kerja Sama ASEAN meninjau persiapan Parade ASEAN 50 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan ulang tahun emas ASEAN*

ASEAN-led dan juga ASEAN sebagai *driving force*.

Beberapa perkembangan dari kerja sama bidang di Pilar Sosial Budaya sebagai berikut:

## A. PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Hampir setengah dari total populasi ASEAN yang berjumlah 600 juta adalah perempuan. Untuk itu, sangatlah penting agar hak mereka dapat terlindungi.

Dalam upaya untuk pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak, ASEAN menghadapi berbagai tantangan dalam bidang kerja sama ini diantaranya adalah kekerasan domestik dan seksual pada perempuan dan anak, eksploitasi pada perempuan dalam bentuk *human trafficking, abuse, and discrimination in migration*.

## B. ASEAN COMMITTEE ON WOMEN (ACW)

ACW merupakan badan sektoral yang didirikan pada tahun 1976 untuk melakukan implementasi, koordinasi, dan pengawasan prioritas-prioritas kawasan ASEAN terkait isu-isu perempuan pada tingkat-tingkat yang bervariasi dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial. ACW tersebut beranggotakan pejabat level *senior official* dari masing-masing negara anggota ASEAN.

ACW ikut terlibat dalam proses pembuatan konsep *the Declaration on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region* dan mengawasi pembentukan *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC).

Pada perkembangan saat ini, ada pertemuan ACW ke-15 yang berlangsung pada bulan Oktober 2016 di Singapura, *ACW Work Plan 2016-2020* difinalisasi. Rencana *work plan* tersebut menekankan pada kepemimpinan perempuan, *non-gender stereotyping* dan perubahan norma sosial, pengarusutamaan gender di antara tiga pilar Masyarakat ASEAN, eliminasi kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan hak ekonomi perempuan, dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan pada situasi-situasi yang rentan.

Komitmen ASEAN dalam memajukan hak-hak perempuan dan anak di kawasan berdasarkan CEDAW dan CRC ditunjukkan dengan pembentukan badan konsultatif *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC) pada *16<sup>th</sup> ASEAN Summit* pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Tiap negara anggota

ASEAN diharuskan untuk menunjuk 2 (dua) wakil pada ACWC, yang terdiri dari satu Wakil untuk Hak Perempuan dan satu wakil untuk Hak Anak dengan masa tugas tiga tahun untuk setiap Wakil.

Kemudian, ACWC juga menjadi badan yang bertugas untuk mengawasi jalannya implementasi *ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence against Children* (DEVAW/VAC). Deklarasi tersebut diadopsi pada Pertemuan KTT ASEAN ke-23 di Bandar Seri Begawan tanggal 9 Oktober 2013.

Sebagai bentuk kepedulian ASEAN pada isu perlindungan perempuan dan anak ASEAN, maka pada tahun 2004, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadopsi *the Declaration on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region*. Secara individual, AMS telah mengikatkan pada *the Convention on the Rights of the Child* (CRC) and *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Pada Pertemuan *23<sup>rd</sup> ASEAN Summit* di Bandar Seri Begawan tanggal 9 Oktober 2013, juga telah diadopsi *ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence against Children* (DEVAW/VAC).

Dalam perkembangannya, dirasa perlu untuk menyusun suatu *guideline* yang dapat digunakan oleh para stakeholders terkait dalam menangani kasus perdagangan manusia terutama korban *trafficking* perempuan. Terkait dengan hal ini, dalam pertemuan ACWC ke-10 di Jakarta pada 25-27 Februari 2015 mengadopsi *Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons*. *Guideline* tersebut dapat dijadikan



Para Finalis Duta Muda ASEAN-Indonesia 2017 diharapkan menjadi agen diseminasi informasi dan menularkan semangat ASEAN kepada masyarakat dan kaum muda Indonesia

panduan bagi para penegak hukum, pekerja sosial, petugas kesehatan, penyedia jasa, LSM, dan pihak terkait lainnya yang menangani kasus perdagangan manusia serta meningkatkan akses keadilan bagi korban *trafficking* perempuan.

Lebih lanjut, sebagai implementasi dari DEVAW/VAC, para Pemimpin mengesahkan *ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination of Violence Against Women* dan *ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination Against Children* pada KTT ke-27 ASEAN. Untuk memaksimalkan peran ACWC, saat ini tengah diimplementasikan *ACWC Work Plan* (2016-2020) yang disahkan pada pertemuan ACWC ke-13 pada 3-5 Oktober 2016 di Singapura. Program kerja lima tahun ini, terdiri dari 16 thematic areas yaitu:

- i. *strengthening institutional capacity of ACWC;*
- ii. *elimination of violence against women and children;*
- iii. *the right of children to participate in all affairs that affect them;*
- iv. *trafficking in women and children;*

- v. *promotion and protection of the rights of women and children with disabilities;*
- vi. *Child Protection System: Comprehensive / Integrative Approach for Children in Need for Special Protection (e.g. victims of abuse and neglect, trafficking, child labour, children affected by statelessness, undocumented migrant children, HIV/AIDS, natural disaster, conflicts, and children in juvenile justice system / children in conflict with the law);*
- vii. *the right to early childhood and quality education;*
- viii. *promoting implementation of international, ASEAN and other instruments related to the rights of women and children;*
- ix. *gender equality in education (textbook, curriculum, equal access);*
- x. *social impact of climate change on women and children;*
- xi. *strengthening economic rights of women with regards to feminization of poverty, women's rights to land and property;*
- xii. *adolescent physical and mental health;*
- xiii. *gender perspective in policies, strategies and programs for migrant workers;*

- xiv. *gender mainstreaming;*
- xv. *women participation in politics and decision making, governance and democracy, and*
- xvi. *early marriage.*

### C. KEPEMUDAAN

Sebagai bentuk upaya ASEAN untuk meningkatkan *people to people contact* dan *ASEAN Awareness*, salah satunya adalah melalui pemberdayaan pemuda ASEAN. Sehubungan dengan hal ini, kerja sama ASEAN di bidang kepemudaan secara kelembagaan dimulai pada saat diselenggarakan Konferensi Pemuda ASEAN, September 1975 melalui pembentukan *Committee for ASEAN Youth Cooperation* (CAYC) yang berstatus *Non-Governmental Organization* (NGO). Pada tahun 1998 CAYC berubah menjadi *ASEAN Senior Officials Meeting on Youth* (ASY) dan pada tahun 2004 ditingkatkan menjadi *ASEAN Senior Officials Meeting on Youth* (SOMY).

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan *people-to-people contact* serta untuk membangun sebuah masyarakat yang saling peduli dan berbagi (*a caring and sharing society*), pertemuan ke-8 *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* mengadopsi *Bandar Seri Begawan Declaration on Youth Volunteerism and entrepreneurship* yang diantaranya adalah penegasan *youth volunteerism* dan *entrepreneurship* sebagai elemen penting dalam upaya mewujudkan Masyarakat ASEAN.

Dalam perkembangannya, ASEAN memandang penting agar dapat disepakati sebuah acuan yang dapat dijadikan dasar untuk menilai perkembangan pemuda di ASEAN. Acuan ini disebut *ASEAN Youth Development Index*

dan terdiri dari beberapa indikator tolak ukur meliputi:

- iv. *Education and Leadership;*
- v. *Health and Resilience;*
- vi. *Entrepreneurship and Employment;*
- vii. *Awareness and Participation;*
- viii. *Values and Identity.*

ASEAN YDI diharapkan dapat difinalisasi pada 2018. Pertemuan SOMY ke-8 pada 24-26 Agustus 2016 mengadopsi secara prinsipil *ASEAN Work Plan on Youth 2016-2020*. *Work Plan* ini dijadikan dasar untuk melaksanakan kerja sama di bidang kepemudaan.



Westra Tanribali (Juara I) dan Scholastika Asyana (Juara II) Final Duta Muda ASEAN Indonesia 2017.

### D. APARATUR SIPIL NEGARA

Kerja sama ASEAN di bidang kepegawaian dan administrasi telah dimulai pada tahun 1981 dengan dibentuknya *ASEAN Conference on ASEAN Reform of Civil Service* (ACRCS). Dalam prosesnya, ACRCS diubah dari organisasi yang berada di luar mekanisme ASEAN menjadi salah satu badan sektoral ASEAN dengan nama *ASEAN Conference on Civil Service Matters* (ACCSM).



Kerjasama kepegawaian yang semula bertumpu pada *country driven*, diarahkan menjadi lebih bersifat *ASEAN driven*. *Corporate Culture* dan *Good Governance* di lingkungan institusi pemerintahan akan terus diperkuat. Untuk mengimplementasikan komitmen tersebut, ASEAN sepakat membentuk forum konsultasi mengenai isu-isu *Good Governance*, yang pertemuannya akan dilaksanakan secara bergiliran dan berkesinambungan. ASEAN juga terus berkolaborasi dan saling bertukar pengalaman dengan negara-negara *Plus Three* (RRT, Jepang dan Korea), dalam upaya meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas kerja para pegawai.

Sebagai bentuk komitmen ASEAN untuk mengimplementasikan reformasi di bidang *civil-service* dan memperkuat mekanisme *engagement* publik, *ASEAN Heads of Civil Service* menandatangani *the Putrajaya Joint Declaration on ASEAN Post-2015 Priorities Towards an ASEAN Citizen-Centric Civil Service*. Deklarasi ini mengakui pentingnya *good governance* di dalam mempromosikan *sustainable development* di ASEAN. Lebih lanjut, deklarasi dimaksud memberikan dorongan pada AMS untuk secara kolektif maupun secara individual untuk memperkuat *good governance*, integritas dan kerja sama di bidang *civil service*, *capacity building*, kerjasama teknis, dan mempromosikan nilai-nilai profesionalisme di bidang *civil services*.

Sebagai acuan kerja samanya, ASEAN telah menyusun *ACCSM Work Plan 2016-2020* diadopsi oleh pertemuan *the 18<sup>th</sup> Heads of Civil Service meeting for the ACCSM* pada 17



Para atlet Paralympic turut serta dalam meramaikan Parade ASEAN 50 | Sumber Foto: Setditjen KSA

November 2016 di Manila, Filipina, dan sebagai acuan dalam kerja sama dengan negara-negara *Plus Three*, Pertemuan ini juga mengadopsi *ACCSM+3 Work Plan 2016-2020*.

## E. OLAH RAGA

Olah Raga merupakan salah satu sarana bagi ASEAN dan juga *instrument* yang efektif untuk mempromosikan *people-to-people contact* di ASEAN. Badan Sektoral ASEAN di bidang Olah Raga dibentuk pada pertemuan *ASEAN Summit* ke-16 di Ha Noi, Viet Nam pada April 2010 untuk mempromosikan kerja sama di bidang olah raga di dalam ASEAN. Pertemuan tingkat Menteri di bidang Olah Raga dibentuk pada pertemuan ASEAN ke-18 pada 7-8 Mei 2011 di Jakarta, Indonesia.

Tahun 2013 merupakan tahun yang dideklarasikan sebagai *Sport Industry Year* untuk menggarisbawahi pencapaian ASEAN di bidang olah raga serta sebagai bentuk penghargaan pada industri olah raga di ASEAN. Di tahun ini pula, diadopsi *Vientiane Declaration on Sports Cooperation in ASEAN* oleh pertemuan ke-2 *ASEAN Ministerial*

*Meeting on Sports* sebagai bentuk ekspresi Menteri ASEAN di bidang Olah Raga yang menggarisbawahi kerja sama dan komitmen ASEAN di bidang olah raga.

## F. PENGENDALIAN PENYEBARLUASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Isu penyalahgunaan narkoba di masyarakat telah menjadi keprihatinan di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan ASEAN. Hal ini antara lain dipicu oleh kemajuan di bidang transportasi dan teknologi yang mendukung maraknya lalu lintas perdagangan di tingkat global, termasuk peredaran berbagai bentuk *new synthetic drugs*.

Menanggapi isu ini, ASEAN meningkatkan komitmennya untuk mempererat kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mencanangkan program ASEAN Bebas dari Narkoba tahun 2015 (*Drug-Free ASEAN by 2015*) melalui diadopsinya *ASEAN Leaders' Declaration on Drug-Free ASEAN 2015* oleh Para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-20 ASEAN di Phnom Penh. Untuk memperkuat mekanisme ASEAN di bidang penyebaran penyalahgunaan narkoba, Para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-26 tanggal 27-28 April 2015 mengesahkan pembentukan AMMDM (*ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters*) sebagai pertemuan tahunan ASEAN tingkat menteri yang menangani isu narkoba guna mengintensifkan upaya mencapai *Drug-Free ASEAN*; memperkuat kerjasama dan memonitor perkembangan *cross-cutting issues* terkait narkoba; dan memberikan arahan strategis kepada *ASEAN Senior Official Meeting on Drugs Matters* (ASOD) dalam meningkatkan kerjasama di ASEAN dan dengan Mitra Wicara

ASEAN. Isu ini juga telah berada di bawah lingkup Pilar Polkam ASEAN. *ASEAN Work Plan on Securing Communities Againsts Illicit Drugs 2016-2025* telah diadopsi pada pertemuan *the 5<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD) di Singapura, 19-20 Oktober 2016. *Work Plan* ini memberikan panduan kerja spesifik untuk menanggulangi *illicit drugs activities* dan mengurangi dampak negatif di masyarakat.

## G. PENDIDIKAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang kerja sama yang menjadi perhatian khusus negara anggota ASEAN. Indonesia dan juga AMS lainnya turut berpartisipasi aktif di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN dan juga daya saing SDM AMS melalui mekanisme kerja sama badan sektoral ASEAN *Senior Officials Meeting on Education* (SOM-ED) dan *ASEAN Education Ministers Meeting* (ASED).

Kemajuan kerja sama ASEAN di bidang pendidikan, antara lain ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerja sama bidang pendidikan melalui *Cha-Am Hua Hin*



*Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community* pada KTT ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand tanggal 23-25 Oktober 2009. Deklarasi tersebut ditujukan sebagai persiapan menuju Masyarakat ASEAN 2015. Penguatan kerja sama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, baik di tingkat regional maupun global. Dalam memperkuat pemahaman mengenai ASEAN, ASEAN telah menyusun *ASEAN Curriculum Sourcebook* sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan di negara-negara anggota ASEAN untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai ASEAN di kalangan siswa.

Beberapa inisiatif yang diimplementasikan oleh Pemri antara lain adalah,

- i. implementasi *ASEAN Credit Transfer System* (ACTS);
- ii. fasilitasi Kemlu dalam pembentukan Pusat Studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia;
- iii. komitmen Indonesia dalam

mengimplementasikan *Plan of Action to Implement the Phnom Penh Declaration on the EAS Development Initiative* (2014-2015) khususnya di bidang standardisasi mekanisme pengajaran, *vocational* dan *technical training*, mobilitas pelajar dan *interoperability* mekanisme kualifikasi nasional dan regional; dan,

- iv. bersama *Plus Three Countries* mengimplementasikan inisiatif *East Asia Vision Group II* (EAVG II) diantaranya adalah rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur.

## H. KERJA SAMA KEBUDAYAAN DAN PENERANGAN ASEAN

Kerja sama di sektor kebudayaan semakin berkembang sejak dibentuknya *subsidiary body* dengan nama *ASEAN Committee on Culture and Information* (ASEAN COCI) pada tahun 1978. Badan *sectoral* ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama yang efektif di bidang kebudayaan dan penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN.



Dalam memperkuat pemahaman mengenai ASEAN, ASEAN telah menyusun *ASEAN Curriculum Sourcebook* sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan di negara-negara anggota ASEAN untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai ASEAN di kalangan siswa.



Di bidang kebudayaan telah diadakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan *workshop* dan *symposium* di bidang seni dan budaya seperti *ASEAN Culture Week*, *ASEAN Youth Camp*, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, *best of ASEAN Performing Arts Series*, *ASEAN City of Culture*, *ASEAN Cultural Heritage City*, *ASEAN Small and Medium-sized Cultural Entreprises*, dan pendokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara anggota ASEAN. Secara formal, kerja sama kebudayaan ASEAN dibahas pada *Senior Official Meeting on Culture and Arts* (SOMCA) dan *ASEAN Ministers Meeting on Culture and Arts* (AMCA).

Di bidang informasi berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain pertukaran berita di antara negara-negara anggota ASEAN yang ditayangkan pada televisi nasional di masing-masing negara anggota ASEAN (*ASEAN TV News*), *ASEAN Digital Broadcasting Cooperative Initiative*, penayangan berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional. Secara kelembagaan, kerja sama informasi ASEAN dilaksanakan melalui *Senior Official Responsible for Information* (SOMRI) dan *ASEAN Ministers Responsible on Information* (AMRI).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama di bidang kebudayaan di ASEAN diantaranya adalah dengan disusunnya *ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts 2016-2025* yang merupakan implementasi dari salah satu tujuan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) *Blueprint* yaitu untuk meningkatkan solidaritas dan kesatuan kawasan ASEAN dengan membangun identitas yang sama yang mendukung pengertian bersama dan rasa saling

menghormati di antara masyarakat ASEAN. *Strategic Plan* ini diantaranya mendukung kegiatan konservasi, pelestarian dan perlindungan warisan budaya ASEAN.

Di bidang penerangan, ASEAN mempunyai *ASEAN Communication Master Plan* yang diantaranya berisi kegiatan-kegiatan translasi konten multimedia, diseminasi *cross-pillar information* terkait ekonomi dan politik Masyarakat ASEAN, memunculkan cerita sukses Masyarakat ASEAN, dan menggunakan media budaya sebagai *platform* untuk menyampaikan pesan yang bersifat *cross-sectoral*.

Salah satu dimensi dari *Master Plan on ASEAN Connectivity* adalah untuk meningkatkan konektivitas *people-to-people* di ASEAN melalui strategi nomor 1 yaitu untuk memfokuskan pemahaman mendalam sosial dan budaya intra-ASEAN. Kegiatan di bawah strategi nomor 1 ini adalah diantaranya perkembangan dan sosialisasi *the ASEAN Curriculum Sourcebook*, penyusunan *ASEAN Studies Course* untuk mahasiswa, disusunnya *multimedia tools* untuk *ASEAN Awareness*, *ASEAN Spotlight*, dan forum di media sosial.

## I. LINGKUNGAN HIDUP

Kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup berkembang dengan sangat dinamis. Kerjasama di bidang lingkungan hidup berada di bawah *ASEAN Senior Officials on the Environment* (ASOEN) yang melakukan pertemuan sekali dalam setahun. ASOEN melaporkan perkembangan kerjasama lingkungan di ASEAN pada *ASEAN Ministerial Meeting on Environment* (AMME) yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. ASOEN terdiri dari



beberapa *working group* yaitu *ASEAN Working Group on Climate Change* (AWGCC), *Nature Conservation and Biodiversity* (AWGNCB), *Coastal and Marine* (AWGCM), *Environmental Education* (AWGEE), *Environmentally Sustainable Cities* (AWGESC), *Water Resources Management* (AWGWRM) dan *Chemical and Waste* (AWGCW).

Tiga isu yang menjadi perhatian utama dalam kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup adalah masalah pencemaran kabut asap (*haze*), konservasi keanekaragaman hayati, dan masalah perubahan iklim. Dalam menangani isu pencemaran kabut asap, Indonesia telah meratifikasi AATHP melalui UU no. 26 tahun 2014 pada 14 Oktober 2014. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk mengintensifkan kerja sama penanggulangan asap lintas batas dalam kerangka ASEAN.

Di bidang konservasi keanekaragaman hayati, Indonesia memperoleh dukungan dari seluruh negara anggota ASEAN untuk menjadi tuan rumah *ASEAN Coordinating Centre on Transboundary Haze Pollution Control* (ACC THPC) pada pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Environment* (AMME) tahun 2015 di Hanoi. Saat ini tengah diupayakan pendirian dan operasionalisasi. ACC THPC berfungsi sebagai fasilitator negara anggota ASEAN untuk kerja sama dan koordinasi dalam penanganan isu asap lintas batas. Kerja sama berupa pengawasan, penilaian, pencegahan, dan penanganan bersama dengan otoritas nasional

dari masing-masing negara yang membutuhkan bantuan atau yang menangani permasalahan isu polusi asap lintas batas. ASEAN juga telah mengakui 4 (empat) taman nasional di Indonesia sebagai *ASEAN Heritage Park* (AHP) yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci-Seblat, Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Way Kambas.

Di bidang perubahan iklim, sebagai kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim, ASEAN melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia secara khusus telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat efek gas rumah kaca sampai 26% pada tahun 2020. Para Pemimpin ASEAN juga menunjukkan komitmennya di dalam merespon isu *climate change* melalui *ASEAN Leader's Statement on Joint Response to Climate Change* yang diantaranya

- i. mendorong *ASEAN Climate Change Initiative* untuk secara aktif menyediakan media konsultatif untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama regional dalam mengatasi isu *climate change*;
- ii. mengurangi emisi rumah kaca sesuai dengan *scenario* untuk kawasan Asia Tenggara;
- iii. untuk melaksanakan *assessment* pada efek perubahan iklim, tingkat kerentanan, dan opsi adaptasi perubahan iklim untuk kawasan Asia Tenggara; dan,

- iv. berpartisipasi pada kerja sama di bidang R&D dan *knowledge sharing* di bidang perubahan iklim dan *food security*.

## J. PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Tsunami Samudera Hindia pada tahun 2004 merupakan titik balik bagi ASEAN untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemampuannya dalam merespon bencana dalam skala besar. Kerja sama ASEAN di bidang penanggulangan bencana telah dimulai sejak tahun 1976 dengan dideklarasikannya *ASEAN Declaration on Mutual Assistance*

*on Natural Disasters* di Manila, Filipina, yang diikuti dengan pembentukan *ASEAN Committee on Disaster Management* (ACDM) pada tahun 2003. Sebagai respon terjadinya Tsunami Samudera Hindia, pada tanggal 26 Juli 2005 para Menlu ASEAN menandatangani *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER) yang berisikan kesepakatan menyeluruh mengenai berbagai aspek dalam penanggulangan bencana. AADMER berlaku secara efektif pada tanggal 24 Desember 2009. Indonesia meratifikasi AADMER melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2008 pada tanggal 15 Mei 2008.

Lokasi: Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Indonesia



Salah satu bentuk komitmen ASEAN untuk memperkuat kapabilitas ASEAN dalam respon tanggap bencana adalah dengan dibentuknya AHA Centre (*ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management*) pada tanggal 17 November 2011 melalui penandatanganan *Agreement on the Establishment of AHA Centre* oleh Para Menlu ASEAN pada KTT ASEAN ke-19 di Bali, Indonesia. AHA Centre berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap AHA Centre dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat koordinasi utama dalam penanggulangan bencana di kawasan, *Host Country Agreement* antara Pemri dengan AHA Centre telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta.

ASEAN juga menunjukkan perhatiannya pada penguatan mekanisme penanggulangan bencana melalui *ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region* yang telah ditandatangani oleh para

Pemimpin ASEAN pada KTT ke-28 ASEAN tanggal 6 September 2016 di Vientiane, Laos.

Deklarasi ini bertujuan untuk mencapai respon yang lebih cepat, memobilisasi sumber daya yang lebih besar, dan membangun koordinasi yang lebih kuat guna memastikan respon kolektif ASEAN terhadap bencana.

Dalam kerangka kerja sama *East Asia Summit* (EAS), para Pemimpin EAS mengesahkan *Indonesia-Australia Paper: 'A Practical Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response'* (November 2011) yang menjadi landasan bagi banyak kegiatan EAS dalam upaya peningkatan respon cepat tanggap terhadap bencana. Indonesia dalam hal ini berperan aktif dalam menginisiasi berbagai kegiatan antara lain:

- d. *Indonesia-Australia EAS Rapid Disaster Response Workshop* (Darwin, Australia, 2013);
- e. *Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercises* (Padang, Indonesia, 2013 dan

2014); dan

- f. *Indonesia-Australia EAS Rapid Disaster Response Workshop* (Bali, Indonesia, Juni 2014 dan Juni 2015). Indonesia dan Australia telah mengembangkan *EAS Rapid Disaster Response Toolkit* (*EAS Toolkit*) sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas negara peserta EAS dalam merespon dan menangani bencana. Diharapkan bahwa *Toolkit* tersebut dapat menjadi *practical platform* untuk kerja sama teknis negara peserta EAS di bidang penanggulangan bencana yang sejalan dengan mekanisme ASEAN lainnya guna mendukung visi *One ASEAN One Response*.

Untuk menguji *EAS Toolkit* tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan *Ambon Disaster Response Exercise* (Ambon DiREx) 2016: *Tabletop Exercise (TTX) on EAS Rapid Disaster Response Toolkit* pada tanggal 15-17 November 2016 di Ambon dengan tema: *Promoting the EAS Rapid Disaster Response Toolkit as a Regional Protocol in Strengthening Effective Collaboration on Disaster Response and Resilience in the Region*.

Pada tahun 2016, Indonesia menjadi ketua *ASEAN Committee on Disaster Management* (ACDM). Pada masa keketuaan Indonesia di ACDM tahun 2016, beberapa capaian terkait kerja sama penanggulangan bencana di ASEAN yaitu:

1. penandatanganan *ASEAN Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region* oleh para Pemimpin ASEAN;
2. penandatanganan *Host Country Agreement* antara Pemri dan AHA Centre pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta;
3. pengesahan *Concept Note on Joint Operations and Coordination Centre of ASEAN* (JOCCA) sebagai sebuah platform untuk koordinasi tim ASEAN dan rumah bagi ASEAN di lapangan;
4. pengesahan *ASEAN Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations* (SASOP) *Chapter VI* yang mengatur tentang penggunaan aset dan kapasitas militer dalam *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR) di ASEAN;
5. pengesahan *ASEAN Joint Disaster Response Plan* (AJDRP) sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan Deklarasi *One ASEAN One Response*;
6. keterlibatan ASEAN di *World Humanitarian Summit* (WHS) melalui *ASEAN Joint Statement for World Humanitarian Summit* dan *Side Event* pada WHS yang berjudul *ASEAN-UN Partnership Moving Forward* bulan Mei 2016 di Istanbul, Turki; dan
7. keterlibatan ASEAN pada *the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction* (AMCDRR) pada tanggal 3-4

AHA Centre | Sumber Foto: Setdijten KSA





November 2016 di New Delhi, India melalui *Joint Statement*.

## K. KERJA SAMA KETENAGAKERJAAN

ASEAN memiliki tenaga kerja yang besar terhitung hingga 285 juta orang. Menyadari hal ini, ASEAN memandang pentingnya untuk meningkatkan *competitiveness* ASEAN, perluasan kesempatan kerja, memperbaiki kualitas angkatan kerja dan menyediakan *social security* pada pekerja. Kerja sama ASEAN terkait ketenagakerjaan dilaksanakan oleh *ASEAN Labour Ministers Meeting* (ALMM) yang diselenggarakan setiap dua tahun.

Kerja sama ketenagakerjaan di ASEAN post-2015 tercerminkan dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 pada *strategic measure B.3.ix* dan pada Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN 2025 pada *strategic measures A.2.5.xv*. Masing-masing *strategic measures* berbunyi: “*Enhance regional initiative in accordance with the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers to improve the protection and promotion of the rights of workers and migrant workers*” dan “*Cooperate closely with the relevant Sectoral Bodies, while maintaining the respective reporting lines, to expedite the work of the ASEAN Committee on the Implementation of the Rights of Migrant Workers in developing an instrument to ensure the rights of migrant workers are well protected within the region, in accordance with the laws, regulations and policies of respective ASEAN Member States*”.

Dalam upayanya untuk menyelesaikan isu *undocumented migrant worker* dan juga pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran

beserta keluarganya, ASEAN mendirikan *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (ACMW) pada tahun 2008 sebagai bentuk tindak lanjut dari pembentukan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran pada tahun 2007. ACMW bertugas mengkoordinasikan penyusunan instrument ASEAN mengenai perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran melalui *ACMW-Drafting Team* (DT). Sejak tahun 2009, ACMW-DT telah mengadakan 15 kali pertemuan reguler dan 2 kali pertemuan khusus.

Dalam perkembangannya, Indonesia terus mendorong kelanjutan perumusan dan aktif dalam mengawal proses finalisasi *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* serta agar *instrument* dimaksud memenuhi 3 (tiga) isu prinsip yang sejalan dengan posisi nasional Indonesia, yaitu:

- perlindungan bagi anggota keluarga pekerja migran yang ikut serta ke tempat penempatan, dan mendorong agar instrumen bersifat *legally binding*;
- memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran tanpa membedakan status keimigrasiannya (*legal/illegal, documented/undocumented, skilled/unskilled*);
- serta menghormati hak-hak anggota keluarga pekerja migran yang turut serta ke tempat penempatan, sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (2007), *ASEAN Human Rights Declaration* (2012), *International Convention on the Protection of the Rights*



*of All Migrant Workers and members of their Famillies* (1990).

Diharapkan Pertemuan ACMW-DT dapat menyelesaikan perbedaan mendasar terkait isu-isu prinsipil dalam pembahasan *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*.

## L. KESEHATAN

Kerja sama ASEAN di bidang kesehatan, telah dimulai sejak tahun 1980 dengan dibentuknya *Senior Officials' Meeting on Health Development* (SOMHD) yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan tingkat Menteri kesehatan ASEAN (*ASEAN Health Minister' Meeting*) setiap dua tahun sekali. ASEAN tengah melakukan finalisasi *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda* (HDA) yang dibahas dalam *SOMHD Work Group Meeting on ASEAN Post-2015 Health Development Agenda*. Pada Pertemuan terakhir *Working Group* tersebut di Bangkok, Thailand (November 2015) lalu, telah berhasil disepakati 3 dokumen utama, yaitu *Governance and Implementation Mechanism* (GIM); *Cluster Strategy and Corresponding Health Priority Strategies based on the ASEAN Post 2015*

*Health Development Agenda* (2016-2020); dan *Schedule Options for Chairmanship Rotation*. Dalam dokumen GIM, telah disepakati bahwa 14 *Working Group* yang selama ini berada di bawah SOMHD akan dilebur dan digantikan dengan cluster. Masa transisi akan diberlakukan selama 2 tahun, yaitu tahun 2016-2017. Kerja sama kesehatan ASEAN akan dibagi dalam 4 *Cluster* utama (dengan total 20 *Health Priorities*), yaitu:

- Promoting Healthy Lifestyle*;
- Responding to All Hazards and Emerging Threats*;
- Strengthening Health System and Access to Care*; dan
- Ensuring Food Safety*.

Pertemuan SOMHD dan *Health Cluster* akan dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun dan dilaksanakan terpisah dari Pertemuan AHMM. Indonesia akan menjadi Ketua *Cluster Satu* (*Promoting Healthy Lifestyle*) selama periode 2016 dan 2017. Dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, beberapa hal yang menjadi fokus pada isu kesehatan, antara lain penyediaan akses yang lebih besar pada pelayanan kesehatan (B.2.); *ageing society*; *universal access to healthcare*; mempromosikan gaya hidup sehat; penguatan sistem kesehatan untuk merespon segala ancaman kesehatan (D2); dan memajukan registrasi HAKI terkait obat-obatan tradisional (E.2.x).

## M. PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kerja sama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan



didasarkan pada dokumen *Ministerial Understanding on Rural Development and Poverty Eradication* (RDPE) yang mengacu pada *Declaration of ASEAN Concord* (Bali Concord I) 1976. Deklarasi tersebut menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf. Selain itu, Deklarasi ini juga menekankan kerja sama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Kerja sama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan berada di bawah *purview ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication* (AMMRDPE) dan badan sektoral *ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication*.

Pembentukan masyarakat ASEAN 2015 menandainya terimplementasinya *Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication* (2011-2015). Selanjutnya, SOMRDPE didukung oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan dengan koordinasi dengan badan sektoral terkait di ASEAN menyelesaikan *the ASEAN Regional Assessment on MDG Achievements and Post-2015 Development Agenda* yang memberikan gambaran pencapaian *Millenium Development Goals* di kawasan Asia Tenggara serta rekomendasi prioritas pembangunan ASEAN pasca 2015. Rekomendasi ini digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan *the ASEAN Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication 2016-2020*.

Dalam mengadakan interaksi dengan *stakeholders*, telah diadakan *the Fourth ASEAN Forum on Rural Development and Poverty Eradication* pada 15 Oktober 2015 dengan tema “*Public, Private, dan People Partnership* (4Ps) *for the Post-2015 Sustainable Development in ASEAN*” yang merupakan forum dialog yang melibatkan sektor swasta, NGOs/CSOs, organisasi yang terkait dengan isu pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan.

## N. PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

*ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare and Development* (AMMSWD) merupakan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang menangani masalah kesejahteraan sosial. Kerja sama ini dibentuk tahun 1979 dan melakukan

pertemuan setiap dua tahun. Sebagaimana tercakup dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, kerja sama ASEAN bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak/akses yang sama kepada kalangan rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia.

Pada tahun 2016/2017, Indonesia sebagai ketua SOMSWD/AMMSWD melaksanakan pertemuan *The Eleventh ASEAN GO and NGO Forum of Social Welfare and Development*, *The Twelfth Senior Official Meeting of Social Welfare and Development* (12<sup>th</sup> SOMSWD), *The Eleventh ASEAN Plus Three Senior Official Meeting of Social Welfare and Development* +3 (11<sup>th</sup> SOMSWD+3), *The Ninth ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development* (9<sup>th</sup> AMMSWD), *The Fifth ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development*+3 (5<sup>th</sup> AMMSWD+3). Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan di Jakarta pada 26-30 September 2016 dengan tema Penguatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial menuju Visi Komunitas ASEN 2025.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Menteri Sosial ASEAN dan bertujuan agar terjalin komitmen dari perwakilan anggota negara-negara ASEAN untuk mendukung pembentukan kerja sama di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial yang inklusif, bisa diakses, memberdayakan, serta mampu memnuhi hak-hak dasar kelompok rentan, perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.





BAB  
3

KERJA SAMA  
EKSTERNAL ASEAN

*Lokasi: Pulau Samosir, Sumatera Utara*



## KERJA SAMA EKSTERNAL ASEAN

“Pembentukan ASEAN bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta memelihara kerja sama erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang mempunyai kesamaan tujuan”.

### - Deklarasi Bangkok 1967

ASEAN telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi di kawasan Asia, Pasifik, Amerika dan Eropa sejak tahun 1974. Prinsip-prinsip pelaksanaan kerja sama dengan pihak eksternal diatur dalam Bab XII Pasal 41 Piagam ASEAN mengenai Hubungan Eksternal, antara lain:

1. ASEAN perlu mengembangkan hubungan bersahabat, dialog, kerja sama dan kemitraan saling menguntungkan dengan berbagai negara serta organisasi internasional dan regional.
2. Hubungan dengan pihak eksternal harus menjunjung tujuan dan prinsip Piagam ASEAN.
3. ASEAN wajib menjadi kekuatan penggerak utama dalam tatanan hubungan di kawasan dan wajib mempertahankan sentralitasnya

- dalam kerja sama dengan pihak eksternal.
4. Negara anggota ASEAN wajib menjaga persatuan dan solidaritas serta mengkoordinasikan posisi dan tindakan bersama dalam kerja sama dengan pihak eksternal.
  5. Kebijakan strategis hubungan eksternal ditentukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi Para Menteri Luar Negeri.
  6. Para Menteri Luar Negeri ASEAN harus menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan hubungan eksternal.
  7. ASEAN dapat menandatangani perjanjian dengan berbagai negara serta organisasi internasional dan regional.

Pihak eksternal yang menjalin kerja sama dengan ASEAN terdiri dari: Mitra



kiri H.E. Hirubalan VP, DSG for ASEAN Political-Security Community  
sebelah Pak Wamen: Miroslav Jena, Assistant Secretary-General UN for Political Affairs |  
Wamenlu RI : A.M Fachir | Dirjen KSA : Jose Tavares

Wicara (*Dialogue Partner*), Mitra Wicara Sektoral (*Sectoral Dialogue Partner*), Mitra Pembangunan (*Development Partner*), Pengamat Khusus (*Special Observer*) dan Tamu (*Guest*). Mitra Wicara ASEAN ada 10 negara dan 1 organisasi internasional yaitu Australia (1974), Selandia Baru (1975), Jepang (1977), PBB (1977), Kanada (1977), Amerika Serikat (1977), Uni Eropa (1977), Korea (1991), India (1995), RRT (1996) dan Rusia (1996), sedangkan Mitra Wicara Sektoral ada 3 negara yaitu Pakistan (1993), Norwegia (2015) dan Swiss (2016) dan Mitra Pembangunan hanya 1 negara yaitu Jerman (2016).

ASEAN juga menjalin kerja sama dengan 6 organisasi regional yaitu *Community of Latin American and Caribbean States* (CELAC), *Economic Cooperation Organisation* (ECO),

*Gulf Cooperation Council* (GCC), *Mercado Comun del Sur/Common Market of the South* (MERCOSUR), *Pacific Alliance* (PA), serta *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC). Selain itu, ASEAN juga menjalin kerja sama antar Sekretariat dengan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) serta mendapat bantuan keahlian dan pendanaan proyek dari *Asian Development Bank* (ADB). Disamping berbagai kerja sama tersebut di atas, terdapat juga kerja sama eksternal lain yaitu kerja sama *ASEAN Plus Three* (APT) dan kerja sama *East Asia Summit* (EAS).



## Penambahan Mitra Kerja Sama Baru

Hingga tahun 2016, terdapat kurang lebih 28 negara dan organisasi regional yang menyampaikan permohonan menjalin kerja sama dengan ASEAN, namun sejak tahun 1999 ASEAN memberlakukan moratorium penambahan kerja sama kemitraan baru hingga waktu yang tidak ditentukan. Dengan bertambahnya pihak eksternal yang tertarik menjadi Mitra Wicara dan melakukan *engagement* dengan ASEAN, Indonesia mengusulkan pencabutan moratorium agar ketertarikan pihak eksternal tersebut mendapat respon positif.

Dalam menerima suatu negara sebagai Mitra Wicara, ASEAN menerapkan sejumlah pertimbangan yaitu Calon Mitra:

1. Harus menerima prinsip dan norma: Deklarasi Bangkok, Deklarasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*), Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) dan Deklarasi SEANWFZ (*South East Asian Nuclear Weapon Free Zone*).
2. Harus memiliki perwakilan diplomatik di semua negara anggota ASEAN, memiliki kerja sama politik dan keamanan dengan negara anggota ASEAN, serta memiliki potensi menjadi aktor utama di kawasan (pertimbangan politis).
3. Harus dapat memberi bantuan teknis dan/atau pembangunan serta memiliki perjanjian ekonomi dan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi

- yang baik dengan negara anggota ASEAN (pertimbangan ekonomi).
4. Harus memiliki hubungan sosial budaya dengan negara anggota ASEAN selama lima tahun terakhir, seperti pertukaran budaya, kerja sama riset dan iptek, kerja sama antar organisasi non-pemerintah, serta ada warga negara ASEAN yang bekerja/belajar di negara calon Mitra dan sebaliknya (pertimbangan sosial budaya).

## Mekanisme Kerja Sama Eksternal

ASEAN menerapkan pembagian tugas di antara negara anggota untuk menjadi koordinator kerja sama dengan masing-masing Mitra Wicara secara bergilir tiap tiga tahun, sebagai contoh: Indonesia menjadi koordinator kerja sama ASEAN-Korea (2012-2015), ASEAN-Selandia (2015-2018) dan ASEAN-Rusia (2018-2021). Koordinator kerja sama dengan PBB, Mitra Wicara Sektorial dan Mitra Pembangunan tidak dipegang oleh negara anggota ASEAN tetapi oleh Sekretariat ASEAN.

| Negara Anggota ASEAN | Mitra Wicara dalam Kekoordinatoran 2012-2015 | Mitra Wicara dalam Kekoordinatoran 2015-2018 | Mitra Wicara dalam Kekoordinatoran 2018-2021 |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Brunei Darussalam    | India                                        | Jepang                                       | Republik Korea                               |
| Kamboja              | Jepang                                       | Republik Korea                               | Selandia Baru                                |
| Indonesia            | Republik Korea                               | Selandia Baru                                | Rusia                                        |
| Laos                 | Selandia Baru                                | Rusia                                        | Amerika Serikat                              |
| Malaysia             | Rusia                                        | Amerika Serikat                              | Australia                                    |
| Myanmar              | Amerika Serikat                              | Australia                                    | Kanada                                       |
| Filipina             | Australia                                    | Kanada                                       | RRT                                          |
| Singapura            | Kanada                                       | RRT                                          | Uni Eropa                                    |
| Thailand             | RRT                                          | Uni Eropa                                    | India                                        |
| Vietnam              | Uni Eropa                                    | India                                        | Jepang                                       |

Pertemuan ASEAN dengan Mitra Wicara dilakukan melalui berbagai tingkatan pertemuan, yaitu:

1. Tingkat Kepala Negara, dilakukan melalui KTT ASEAN, KTT APT, KTT EAS dan *Commemorative Summit, Regular Summit, Special Summit* maupun *Stand Alone Summit* dengan Mitra Wicara;
2. Tingkat Menteri, dilakukan melalui pertemuan para Menlu negara anggota ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/ AMM*) dan pertemuan Menlu negara anggota ASEAN dengan Menlu negara Mitra Wicara (*Post Ministerial Conference/ PMC*). Khusus dengan UE, pertemuan ini diberi nama *ASEAN-EU Ministerial*

- Meeting* (AEMM);
3. Tingkat Menteri Sektorial, dilakukan melalui pertemuan *ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM Plus)*;
  4. Tingkat Pejabat Tinggi/Direktur Jenderal, dilakukan melalui *Senior Officials Meeting (SOM)*, *Senior Officials Consultations (SOC)*, serta *Forum* dan *Dialogue* antar *Senior Officials*;
  5. Tingkat Pejabat Tinggi Sektorial, dilakukan melalui *Senior Officials Meeting on Transnational Crimes (SOM-TC)*, *Senior Economic Officials' Meeting (SEOM)* dan *Senior Officials' Committee for the Socio Cultural Community Council Meeting (SOCA)*;

6. Tingkat Komite Wakil Tetap (*Committee of Permanent Representatives/CPR*), dilakukan melalui *Joint Cooperation Committee* (JCC) dengan Mitra Wicara dan *Joint Sectoral Cooperation Committee* (JSCC) dengan Mitra Wicara Sektoral;
7. Tingkat Direktur, dilakukan melalui *Working Group/WG*.

Tugas koordinasi juga dijalankan dalam pelaksanaan kerja sama dengan organisasi regional lain, yaitu bergilir tiap tahun. Sebagai misal, Indonesia menjadi koordinator kerja sama ASEAN-MERCOSUR (2017), ASEAN-SAARC (2018), ASEAN-CELAC (2019), ASEAN-PA (2020), ASEAN-GCC (2021) dan ASEAN-ECO (2022).

|      | CELAC             | ECO               | GCC               | MERCOSUR          | PA                | SAARC             |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2015 | Thailand          | Myanmar           | Filipina          | Brunei Darussalam | Singapura         | Vietnam           |
| 2016 | Vietnam           | Filipina          | Singapura         | Kamboja           | Thailand          | Brunei Darussalam |
| 2017 | Brunei Darussalam | Singapura         | Thailand          | Indonesia         | Vietnam           | Kamboja           |
| 2018 | Kamboja           | Thailand          | Vietnam           | Laos              | Brunei Darussalam | Indonesia         |
| 2019 | Indonesia         | Vietnam           | Brunei Darussalam | Malaysia          | Kamboja           | Laos              |
| 2020 | Laos              | Brunei Darussalam | Kamboja           | Myanmar           | Indonesia         | Malaysia          |
| 2021 | Malaysia          | Kamboja           | Indonesia         | Filipina          | Laos              | Myanmar           |
| 2022 | Myanmar           | Indonesia         | Laos              | Singapura         | Malaysia          | Filipina          |
| 2023 | Filipina          | Laos              | Malaysia          | Thailand          | Myanmar           | Singapura         |
| 2024 | Singapura         | Malaysia          | Myanmar           | Vietnam           | Filipina          | Thailand          |

The First ASEAN-Australia Biennial Summit, 7 September 2016, Vientiane, Laos  
www.asean.org



## 1. Perkembangan Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara

### A. ASEAN - AUSTRALIA

Kerja sama ASEAN dan Australia dimulai pada tahun 1974, diawali pembentukan *ASEAN-Australia Consultative Meeting* (AACM). Pada tahun 2014, ASEAN dan Australia merayakan 40 tahun kerja sama melalui KTT 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Australia di Nay Pyi Taw tanggal 13 November 2014. Kesepakatan KTT ini:

- Peningkatan dari *Comprehensive Partnership* menjadi *Strategic Partnership*;
- Penyelenggaraan KTT ASEAN-Australia Dua Tahunan;
- Perpanjangan program *ASEAN-Australia Development Cooperation Program* (AADCP) II periode 2015-2019;
- Pembentukan *ASEAN-Australia Council*.

Australia membuka Misi untuk ASEAN di Jakarta pada September 2013, dengan Duta Besar untuk ASEAN pertama, H.E. Mr. Simon

Merrifield. Pada bulan September 2016, Duta Besar kedua untuk ASEAN, H.E. Ms. Jane Duke, telah memulai tugasnya.

Fokus kerja sama ASEAN-Australia adalah bidang politik, keamanan, perdagangan, investasi, pendidikan dan pelatihan, industri, teknologi, lingkungan hidup dan kebudayaan. Sedangkan arah kerja sama tertuang dalam *Plan of Action (PoA) to Implement the ASEAN-Australia Comprehensive Partnership 2015-2019*. PoA ini diubah nomenklaturnya menjadi *PoA to Implement the ASEAN-Australia Strategic Partnership 2015-2019* pada Pertemuan *PMC+1 Session with Australia* di Kuala Lumpur, tanggal 5 Agustus 2015. KTT terakhir dilakukan pada KTT Dua Tahunan ASEAN-Australia ke-1, tanggal 7 September 2016 di Vientiane. Sedangkan KTT ke-2 rencananya diselenggarakan di Sydney pada 17-18 Maret 2018.



Perkembangan kerja sama ASEAN-Australia beberapa tahun terakhir antara lain:

1

## Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan** (polkam), ASEAN dan Australia bekerja sama dalam pemberantasan kejahatan transnasional, korupsi, penyelundupan manusia dan penangkapan ikan secara ilegal, pemajuan HAM, penanggulangan bencana, *disarmament*, *arms control* dan *non-proliferation of Weapons of Mass Destruction*. Australia telah mengaksesi TAC pada tahun 2005 dan berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan konsultatif, seperti EAS, ADMM-Plus, *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

Salah satu hasil penting kerjasama polkam adalah peningkatan penanggulangan terorisme dan ekstremisme, dengan disahkannya *ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* pada KTT Dua Tahunan ke-1 ASEAN-Australia (pembaruan dokumen serupa tahun 2004).

2

## Ekonomi

Dalam bidang **ekonomi**, kerjasama menonjol terlihat saat para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia dan Selandia Baru menandatangani *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA), 27 Februari 2009 di sela-sela KTT ke-14 ASEAN di Cha-am Hua Hin. AANZFTA diimplementasikan mulai 1 Januari 2010, namun Indonesia baru meratifikasi AANZFTA pada 6 Mei 2011. Selain AANZFTA, Australia juga aktif dalam pembahasan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) sejak tahun 2012.

ASEAN dan Australia juga sepakat menyelenggarakan *ASEAN-Australia Development Cooperation Programme* mencakup antara lain bidang transportasi, perdagangan, energi terbarukan, dan pariwisata. Selain itu, *connectivity* juga berupaya dibangun dengan menghubungkan ASEAN dan Australia Utara melalui pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur, memfasilitasi perpindahan manusia, barang, dan jasa, serta peningkatan *business links* melalui *ASEAN-Australia Council* (AAC).

3

## Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, kerja sama ASEAN-Australia difokuskan pada *people-to-people contact*, terutama pendidikan, melalui program *New Colombo Plan* dan *Australia Awards and Endeavour Scholarships*. Australia merupakan salah satu tujuan utama pelajar dari negara anggota ASEAN dengan 109 ribu orang belajar di berbagai institusi pendidikan Australia. Australia telah membentuk *ASEAN-Australia University Network* dan berkomitmen mengirimkan pelajarnya untuk belajar di negara anggota ASEAN.

## B. ASEAN - SELANDIA BARU

Kerja sama ASEAN dan Selandia Baru berlangsung sejak tahun 1975. Selandia Baru membuka Misi untuk ASEAN pada bulan Oktober 2015, sebagai tindak lanjut dari penunjukan Duta Besar pertama untuk ASEAN, H.E. Ms. Stephanie Pamela Lee, pada bulan November 2014.

Tanggal 22 November 2015 dilakukan KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Selandia Baru di Kuala Lumpur, yang ditandai dengan:

- Peningkatan kerja sama dari *Comprehensive Partnership* menjadi *Strategic Partnership*;
- Pengesahan *Plan of Action (PoA) to Implement the Joint Statement for ASEAN-New Zealand Strategic Partnership 2016-2020*. Fokus PoA adalah *Two Key Strategies*, yaitu *People Strategy* dan *Prosperity Strategy*.

Untuk melaksanakan kedua strategi tersebut, Selandia Baru menyiapkan dana melalui *NZ Aid*

*Program of Official Development Assistance* (ODA) hingga tahun 2020 untuk merealisasikan sejumlah inisiasi, seperti: 1) program *Young Business Leaders Initiative* (YBLI); 2) beasiswa pasca sarjana bagi 225 mahasiswa ASEAN; 3) *English Language Training for Officials* (ELTO) bagi 160 pejabat dari 96 instansi; dan 4) program *ASEAN Agriculture Technical and Vocational Education Training* melalui *Mekong Institute Food Safety Project* bagi pejabat dari negara-negara CLMV.



ASEAN-New Zealand 40th Anniversary Commemorative Summit | Kuala Lumpur, 22 November 2015  
Sumber: <http://internasional.republika.co.id>

Perkembangan kerja sama ASEAN-Selandia Baru beberapa tahun terakhir antara lain:

1

## Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, kerja sama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara dalam kerangka Konsultasi SOM-TC+ *New Zealand, ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM on CTTC)*, dan *ADMM-Plus Maritime Security and Counter Terrorism Exercise*. Selain itu, Selandia Baru mendukung penguatan kerja sama melalui mekanisme EAS, dengan partisipasi di *the 1<sup>st</sup> Meeting of the EAS Ambassadors* tanggal 8 April 2016.

2

## Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, Selandia Baru bersama Australia dan ASEAN telah memberlakukan AANZFTA sejak 1 Januari 2010. Untuk memperkuat AANZFTA, Selandia Baru berinisiatif melaksanakan program *AANZFTA Economic Cooperation Support Program (ECSP)* hingga bulan Juni 2018, karena peningkatan nilai perdagangan diantara ketiganya belum terlihat sejak dimulainya AANZFTA. Selandia Baru merupakan mitra dagang ke-10 terbesar ASEAN dengan nilai perdagangan sebesar 0,4% dari nilai total perdagangan ASEAN dengan dunia<sup>1</sup>. *Foreign Direct Investment (FDI)* dari Selandia Baru, di sisi lain, menunjukkan angka positif dengan peningkatan signifikan tahun 2015 dengan nilai total FDI sebesar US\$ 2,2 miliar<sup>2</sup> sehingga menempatkan Selandia Baru di peringkat ke-7 sumber FDI ASEAN.

ASEAN dan Selandia Baru sepakat mempererat kerja sama bidang *connectivity*, termasuk *regulatory coherence*. ASEAN mendorong partisipasi Selandia Baru dalam pertemuan *ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC)* dengan Mitra Wicara ASEAN lainnya serta simposium ACCC pada bulan Oktober 2016 di Laos. ASEAN dan Selandia Baru juga sepakat memperkuat kapasitas ASEAN di bidang pertanian dan peternakan melalui *ASEAN Agriculture Technical and Vocational Education and Training*, *Mekong Institute Safe Food Project* dan *ASEAN Foot and Mouth Disease Control Initiative*.

Kerja sama ekonomi lain yang didorong adalah *illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing)*, melalui tukar pengalaman dan peningkatan kapasitas, penguatan tata kelola nelayan lintas batas, serta penelusuran asal ikan tangkapan untuk mencegah masuknya produk hasil *IUU Fishing*. Selain itu didorong juga implementasi konkret *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* dimana ASEAN dan Selandia Baru merupakan *co-sponsor Statement* tersebut.

3

## Sosial-Budaya

Di bidang sosial-budaya, sejumlah program telah dijalankan, antara lain:

1. *Prime Minister's Fellowship Schemes*
2. *Inaugurasi ASEAN Young Diplomats Study Tour*;
3. *Young Business Leaders Initiatives (YBLI)*;
4. beasiswa pasca sarjana di Selandia Baru bagi mahasiswa ASEAN; dan
5. *English Language Training for Officials (ELTO) Programme*.

Selandia Baru menyiapkan dana sebesar NZD 20 juta (sekitar USD 13 juta) untuk program *Disaster Risk Management (DRM)* hingga tahun 2020 dan penguatan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* melalui *Executive Leadership Development Programme*.

Indonesia merupakan *Country Coordinator* Kerja Sama ASEAN-Selandia Baru periode 2015-2018 sejak Agustus 2015. Sebagai negara koordinator, Indonesia menekankan pada kerja sama maritim, *SEANWFZ*, *IUU Fishing*, pekerja migran, beasiswa pendidikan, pertanian, pencegahan bencana, energi terbarukan, pariwisata, konektivitas, *people-to-people contact*, pemanfaatan AANZFTA dan peningkatan hubungan ASEAN dengan negara Pasifik melalui Selandia Baru.



<sup>1</sup> Berdasarkan ASEAN Trade Database as of 10 June 2016\*preliminary figures

<sup>2</sup> Berdasarkan ASEAN FDI Database as of 13 June 2016\*preliminary figures





Lokasi: Blue River, Selandia Baru



### C. ASEAN - JEPANG

Kerja sama ASEAN-Jepang dimulai secara informal pada tahun 1973 dan diresmikan bulan Maret 1977 lewat penyelenggaraan *ASEAN-Japan Forum*. Sejak saat itu, kerja sama ASEAN-Jepang mengalami perkembangan signifikan di bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. *ASEAN-Japan Centre* (AJC) kemudian dibentuk pada bulan Mei 1981 di Tokyo untuk mendorong promosi perdagangan, investasi dan pariwisata.

Kerja sama ASEAN-Jepang difokuskan pada bidang kontra terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, penanganan bencana alam, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan maritim, penanganan pembajakan laut dan pertukaran pemuda/masyarakat. Pada KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo bulan Desember 2013 telah disahkan *Implementation Plan of the Vision Statement*

*on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation: Shared Vision, Shared Identity, Shared Future* sebagai pedoman kerja sama tahun 2015-2020. *Vision Statement* ini menggantikan *ASEAN-Japan Plan of Action 2011-2015* yang disahkan pada KTT ke-14 ASEAN-Jepang di Bali bulan November 2011.

Pelaksanaan kerja sama ASEAN-Jepang dilakukan melalui berbagai proyek yang didanai *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF). Agar kerja sama lebih fokus, ASEAN dan Jepang menyepakati bidang proyek kerja sama yang didanai JAIF 2.0, yaitu terorisme, ekstrimisme, kejahatan obat terlarang, manajemen perbatasan, pencucian uang, kejahatan dunia maya, penyelundupan orang, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan hewan liar, serta kejahatan lingkungan laut.



Perkembangan kerja sama ASEAN-Jepang beberapa tahun terakhir antara lain:

## 1

### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, ASEAN dan Jepang telah mengesahkan *Joint Declaration for Cooperation to Combat Terrorism and Transnational Crime* pada KTT ke-17 ASEAN-Jepang di Myanmar bulan November 2014. Kerja sama pemberantasan *cybercrime* melalui *ASEAN-Japan Cybercrime Dialogue* juga dimulai sejak tahun 2014 di Singapura. Selain itu, untuk pertama kalinya diselenggarakan *ASEAN-Japan Defence Ministers Informal Meeting* di Myanmar pada bulan November 2014 yang menyetujui kerja sama menghadapi ancaman keamanan non-tradisional.

## 2

### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, Jepang merupakan mitra dagang terbesar kedua ASEAN dengan nilai perdagangan dua arah sebesar US\$ 239,4 miliar (2015). Jepang juga menjadi sumber FDI terbesar kedua ASEAN dengan nilai US\$ 17,4 miliar (2015). ASEAN dan Jepang juga telah menyusun *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) pada tahun 2008 dan *ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation Roadmap* pada tahun 2012, untuk melipatgandakan perdagangan dan investasi pada tahun 2022.

## 3

### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, Jepang membentuk *Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths* (JENESYS) yang diimplementasikan pada tahun 2007-2012 sebagai program pertukaran pemuda. Program ini dilanjutkan dengan JENESYS 2.0 (Maret 2013 – Maret 2015), JENESYS 2015 dan JENESYS 2016. Selain itu, ASEAN dan Jepang juga bekerja sama di bidang kesehatan melalui *Japan-ASEAN Health Initiative* dan *ASEAN-Japan Health Initiative Forum* di Jakarta bulan Agustus 2015. Jepang juga memberi dukungan penyelenggaraan *The 1<sup>st</sup> ASEAN Mangrove Network* di Indonesia tahun 2014. Pendirian *AHA Centre* di Jakarta untuk membantu penanganan bencana juga hasil dari kontribusi besar dari Jepang.

Pada KTT ke-19 ASEAN-Jepang di Vientiane tanggal 7 September 2016, Jepang berkomitmen mempererat kerja sama dengan ASEAN melalui penyediaan dana bantuan sebesar USD 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur di

ASEAN, peningkatan kerja sama *people-to-people contact*, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). KTT ASEAN ke-30 kemudian menyerukan dilakukannya peningkatan kerja sama dengan Jepang.





# ASEAN - PBB

## D. ASEAN - PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

Kerja sama ASEAN dan PBB dimulai dengan kerja sama ASEAN dan *United Nations Development Programme* (UNDP) di awal tahun 1970-an dalam bentuk pemberian bantuan teknis keahlian dan pengembangan kapasitas dari UNDP kepada ASEAN di bidang pembangunan industri, pertanian dan kehutanan, transportasi, keuangan, jasa-jasa moneter dan asuransi. Pada tahun 1977, kerja sama ini diformalkan dengan peluncuran *ASEAN-UNDP Sub-Regional Program*. Sejumlah badan khusus PBB seperti UNESCO, UNESCAP, UNAIDS, WHO, ILO, UNICEF, UNHCR dan OCHA kemudian juga melakukan kerja sama dengan ASEAN tanpa terstruktur.

Kerja sama ASEAN dan PBB semakin berkembang sejak KTT ASEAN-PBB tahun 2000 di Bangkok. Saat itu, Sekjen PBB menyatakan bahwa ASEAN merupakan mitra PBB terpercaya di bidang pembangunan. Sampai saat ini telah dilakukan delapan kali KTT, yaitu tahun 2000, 2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Ruang lingkup kerja sama ASEAN-PBB meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dengan penekanan pada penguatan kerja sama institusional untuk: mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs), mengurangi kesenjangan pembangunan, mengatasi ancaman perubahan iklim, pertukaran informasi dan keahlian, kolaborasi dalam penanganan bencana alam dan konektivitas regional. Untuk mengatasi tantangan regional dan global, Indonesia memandang perlu diwujudkan Kemitraan Komprehensif antara ASEAN-PBB.



*The 8th ASEAN-U.N. Summit, 7 September 2016, Vientiane, Laos | [www.asean.org](http://www.asean.org)*

Perkembangan kerja sama ASEAN-PBB beberapa tahun terakhir antara lain:

1. KTT ke-7 ASEAN-PBB di Kuala Lumpur tanggal 22 November 2015 mengapresiasi pengesahan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan mengupayakan agar implementasinya saling melengkapi dengan *Sustainable Development Goals 2030*.
2. KTT ke-8 ASEAN-PBB di Vientiane tanggal 7 September 2016 mengesahkan *PoA to Implement the Joint Declaration on the Comprehensive Partnership between ASEAN and the UN 2016-2020* oleh Menlu ASEAN dan Sekjen PBB, untuk menyelaraskan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
3. Terkait terorisme dan ekstremisme, Indonesia menjadi co-chair penyelenggaraan *ASEAN-UN Workshop: Third Regional Dialogue on Political-Security Cooperation (AURED III) (Track 1.5)* dengan tema *preventive diplomacy*, pencegahan konflik dan pencegahan ekstremisme, di Jakarta tanggal 7-9 November 2016.

Saat ini, ASEAN dan PBB masih berupaya menyelaraskan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan *Sustainable Development Goals 2030* agar implementasi kedua visi dimaksud memberi manfaat konkret khususnya bagi masyarakat ASEAN.

## E. ASEAN - KANADA

Kerja sama ASEAN dan Kanada dimulai bulan Februari 1977 dengan pertemuan formal pertama ASEAN-Kanada. Pada pertemuan tersebut Kanada menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN dan keinginan menjalin kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, industri dan pembangunan. Dalam perkembangannya, ASEAN dan Kanada kemudian memperkuat kerja sama pemberantasan terorisme internasional dan kejahatan lintas negara, keamanan kesehatan, dialog antar keyakinan dan bantuan teknis pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN. Tahun 2017 punya arti penting bagi ASEAN dan Kanada karena merupakan tahun peringatan 50 tahun ASEAN, 150 tahun Kanada dan 40 tahun kemitraan ASEAN-Kanada. Kanada sendiri telah menandatangani TAC pada Pertemuan ke-43 AMM/PMC di Hanoi tanggal 21-23 Juli 2010.

Kerja sama kemitraan ASEAN-Kanada didasarkan pada *Joint Declaration on ASEAN-*



Logo ASEAN-Canada 40 Years of Dialogue Relations | Foto: <http://www.international.gc.ca>

*Canada Enhanced Partnership* (2009), *Plan of Action to Implement Joint Declaration on ASEAN-Canada Enhanced Partnership 2010-2015* dan *Plan of Action to Implement Joint Declaration on ASEAN-Canada Enhanced Partnership 2016-2020*. Pada Pertemuan *10th ASEAN-Canada Dialogue* di Toronto tanggal 6-7 Mei 2013, Kanada menyampaikan dua fokus kerja samanya dengan ASEAN, yaitu: *Human Rights* dan *Disaster Risk Reduction*.



The ASEAN-Canada Ministerial Meeting, 26 Juli 2016, Vientiane, Laos | [www.asean.org](http://www.asean.org)

“

Tahun 2017 punya arti penting bagi ASEAN dan Kanada karena merupakan tahun peringatan 50 tahun ASEAN, 150 tahun Kanada dan 40 tahun kemitraan ASEAN-Kanada.

Perkembangan kerja sama ASEAN-Kanada beberapa tahun terakhir antara lain:

1

### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, Kanada aktif mendukung penguatan HAM dan menyediakan dana sebesar CAD 3 juta (USD 2,18 juta) selama tahun 2010-2014 untuk implementasi *Regional Mechanisms to Protect the Human Rights of Women and Girls in Southeast Asia*. Selanjutnya, CAD 10 juta (USD 7,27 juta) selama tahun 2011-2016 untuk implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, serta CAD 5,5 juta (USD 4 juta) pada tahun 2012-2016 guna implementasi *Tripartite Action to Protect Migrants in the ASEAN Region from Labour Exploitation*.

2

### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, ASEAN dan Kanada telah mengesahkan *2016-2020 Work Plan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment* dan menunjukkan kemajuan dalam implementasinya. ASEAN dan Kanada membentuk *ASEAN-Canada Business Council* di Singapura pada bulan Juli 2012 dengan *key areas of strength* pada *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

3

### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, Kanada telah memberikan bantuan dana sebesar CAD 10 juta (USD 7,27 juta) dalam kerangka *Integrated Disaster Management Fund (2013-2017)* guna implementasi *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)*, peningkatan kemampuan ASEAN untuk mitigasi bencana alam dan penguatan *AHA Center*. Di bidang pendidikan, telah dilakukan *ASEAN-Canada Track 1.5 Dialogue 2012* dengan tema *Role of Education and Research in Promoting People-to-People Connectivity* di sela-sela *9th ASEAN-Canada Dialogue*. Dalam upaya penguatan Sekretariat ASEAN, Kanada melalui institusi *Open Text* memberikan bantuan dana CAD 1,3 juta (USD 950 ribu) untuk pengembangan *aseanonline.org*, portal khusus pengelolaan arsip dan dokumentasi ASEAN yang diluncurkan pada Pertemuan *2nd ASEAN-Canada JCC* tanggal 10 April 2014.



## F. ASEAN - AMERIKA SERIKAT (AS)

Kerja sama ASEAN dan AS dimulai sejak tahun 1977 dan tahun 2017 merupakan peringatan ke-40 tahun kemitraan ASEAN-AS. Dalam perkembangannya, kerja sama ASEAN-AS menghasilkan *Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership* (2005), *Revised Priorities for Cooperation under the ASEAN-US Enhanced Partnership* (2009) dan *ASEAN-US Enhanced Partnership Plan of Action* (2011-2015).

Pada KTT ke-3 ASEAN-AS di Kuala Lumpur tanggal 21 November 2015, kerja sama ASEAN-AS meningkat dari *Enhanced Partnership* menjadi *Strategic Partnership*. Pada KTT ini juga diadopsi *Joint Statement on ASEAN-US Strategic Partnership dan Plan of Action (PoA) to Implement the ASEAN-US Strategic Partnership 2016-2020*. Bagi AS, peningkatan status menjadi kemitraan strategis merupakan refleksi hubungan ASEAN-AS yang kuat, berjangka panjang dan produktif. Pentingnya ASEAN bagi AS ditandai dengan diselenggarakannya *Special ASEAN-US Summit* di Sunnylands tanggal 15-16 Februari 2016. KTT ini menghasilkan *Joint Statement of the ASEAN-US Special Leaders' Summit: Sunnylands Declaration*.

Pada tahun 2008, AS merupakan negara non-ASEAN pertama yang merangkapkan jabatan Duta Besar ASEAN dengan Duta Besar AS

untuk Indonesia. Pada Juni 2010, AS secara resmi mendirikan Misi untuk ASEAN di Jakarta dengan Duta Besar pertama, H.E. Mr. David L. Carden dan sejak tahun 2014, AS menunjuk H.E. Ms. Nina Hachigian sebagai Duta Besar kedua untuk ASEAN.

Bidang prioritas kerja sama ASEAN-AS adalah *counter-terrorism*, maritim termasuk pemberantasan *IUU Fishing*, *wildlife trafficking*, perubahan iklim, energi, UMKM, ekonomi digital dan *people-to-people ties*.



*Special ASEAN-U.S. Summit, 15-16 Februari 2016, Sunnylands, Amerika Serikat*  
[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

Perkembangan kerja sama ASEAN-Amerika Serikat beberapa tahun terakhir antara lain:

### 1

#### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, ASEAN dan AS mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Dalam hal ini, AS telah mengaksesi TAC pada Pertemuan ke-42 AMM/PMC tahun 2009 di Phuket. ASEAN dan AS juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama maritim serta pemberantasan terorisme, ekstrimisme dan kejahatan transnasional lainnya dalam kerangka EAS dan ARF. Kerja sama pemberantasan *IUU Fishing*, terutama penguatan kapasitas dan pertukaran informasi, juga didorong oleh ASEAN dan AS. Kunjungan Wapres AS, Mike Pence, ke Jakarta pada bulan April 2017 dan bertemu dengan Sekjen ASEAN, memberikan sinyal positif komitmen AS terhadap ASEAN dan kelanjutan kerja sama ASEAN-AS di berbagai bidang pada masa pemerintahan Presiden Trump.

### 2

#### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, sebagai hasil *Special ASEAN-US Summit*, ASEAN dan AS sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, pengembangan UMKM, teknologi informatika dan ekonomi digital. AS mengusulkan pembentukan "*ASEAN-US Connect*" untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan membangun jaringan antar pebisnis di kawasan serta meningkatkan perdagangan ASEAN-AS. *ASEAN-US Connect Centre* di Jakarta diresmikan pada September 2016 sebagai bagian dari Kantor Misi AS untuk ASEAN, diikuti dengan peresmian *ASEAN-US Strategic Connect* di Singapura sebagai *financial hub* dan di Bangkok sebagai kantor dagang. *ASEAN-US Connect* mengusung empat prioritas, yaitu bisnis, energi, inovasi dan kebijakan. Hal ini merefleksikan dukungan AS terhadap upaya integrasi ASEAN, pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN serta peningkatan nilai perdagangan dan investasi ASEAN-AS. AS merupakan salah satu mitra dagang dan investor utama ASEAN. Pada tahun 2015, nilai perdagangan ASEAN-AS mencapai USD 212,8 milyar atau 93% dari total perdagangan ASEAN. AS merupakan investor ke-3 terbesar di ASEAN dengan FDI senilai USD 12,2 milyar.

### 3

#### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, kerja sama kepemudaan, khususnya peningkatan kapasitas, kewirausahaan dan inovasi, merupakan salah satu fokus ASEAN dan AS. Hal ini selaras dengan kerja sama yang telah terjalin di bidang pendidikan dan peningkatan SDM secara lebih luas. Program *internship* yang ditawarkan AS diharapkan meningkatkan kapasitas pemuda ASEAN dalam bersaing secara global.

## ASEAN - UNI EROPA

### G. ASEAN - UNI EROPA (UE)

Kerja sama ASEAN-Uni Eropa (UE) secara informal dimulai tahun 1977 saat UE masih bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kerja sama ini kemudian diformalkan pada bulan Maret 1980 melalui penandatanganan *ASEAN-EEC Cooperation Agreement*. Pada tahun 2017 ASEAN akan merayakan peringatan 40 tahun kerja sama dengan UE.

Kerja sama Kemitraan Komprehensif ASEAN-UE terwujud tahun 2007 dengan ditandatanganinya *the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership* dan *Plan of Action to implement the Nuremberg Declaration*. Kemitraan ini diperkuat dengan diadopsinya *Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership 2013-2017*

pada tahun 2012 di Bandar Seri Begawan. Sebagai kelanjutan PoA 2013-2017, keduanya akan mensahkan *ASEAN-European Union Plan of Action 2018-2022*.

Kerja sama kemitraan ASEAN-UE memiliki 4 prioritas, yaitu penguatan konektivitas; peningkatan perdagangan dan investasi; penguatan kerja sama bidang iklim, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan; serta pengembangan kerja sama maritim dan penanggulangan kejahatan transnasional. Komitmen UE untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN ditunjukkan dengan peningkatan dana bantuan UE ke ASEAN dari EUR 70 juta (USD 76,52 juta) sebelum tahun 2014 menjadi EUR 170 juta (USD 185,83 juta) untuk tahun 2014-2020. Komitmen UE juga ditunjukkan dengan penugasan Duta Besar UE pertama untuk ASEAN, H.E. Mr. Francisco Jose Fontan Pardo, pembukaan Misi UE untuk ASEAN di Jakarta pada bulan September 2015 dan peningkatan kunjungan/pertemuan pejabat tinggi UE dan ASEAN. UE juga telah mengaksesi TAC pada Pertemuan ke-45 AMM/PMC di Phnom Penh tanggal 11 Juli 2012.



Logo 40 Tahun EU - ASEAN | Foto: [www.asean2017.ph](http://www.asean2017.ph)



Perkembangan kerja sama ASEAN-UE beberapa tahun terakhir antara lain:

## 1

### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, UE mendorong peningkatan kapasitas ASEAN *Inter-Governmental Commission on Human Rights* (AICHR) menjadi komisi HAM yang dinamis dan *action oriented*. ASEAN-UE juga menjalin kerja sama bidang maritim melalui penyelenggaraan *ASEAN-EU High Level Dialogue (HLD) on Maritime Cooperation* ke-1 di Jakarta tanggal 18-19 November 2013, dilanjutkan dengan HLD ke-2 di Kuala Lumpur tanggal 4-6 Mei 2015 dan HLD ke-3 di Bangkok tanggal 15-16 September 2016, sebagai forum pertukaran ide, *best practices* dan *lessons learned*.

## 2

### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, pada bulan Juli 2007 diluncurkan negosiasi ASEAN-EU FTA, namun ditunda hingga bulan Maret 2009. Hingga saat ini belum banyak kemajuan negosiasi ASEAN-EU FTA kecuali dihasilkannya parameter untuk terwujudnya FTA. UE sendiri merupakan salah satu investor dan mitra dagang terbesar ASEAN dengan nilai investasi sebesar USD 20,12 juta dan nilai perdagangan sebesar USD 228,09 juta pada tahun 2015. Pada bulan Maret 2017, telah dilakukan *endorsement* terhadap *AEM-EU Trade and Investment Work Programme for 2017-2018* guna mendukung negosiasi ASEAN-UE. Di bidang konektivitas, UE mendukung implementasi *Master Plan of ASEAN Connectivity* (MPAC) dan berharap agar ASEAN memanfaatkan *Asian Investment Facility* bagi pengembangan proyek konektivitas khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan transportasi udara.

## 3

### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, dukungan UE terhadap ASEAN di bidang pendidikan dilakukan melalui program *EU Support to Higher Education in ASEAN Region* (EU SHARE). Dalam kaitan ini, UE telah menyampaikan komitmennya senilai EUR 10 juta (USD 10,93 juta) untuk periode tahun 2013-2017. UE juga memberikan bantuan bagi operasional Sekretariat ASEAN dan bantuan dalam bentuk *development aid*.



ASEAN-EU Ministerial Meeting, 25 Juli 2016, Vientiane, Laos,  
[www.eeas.europa.eu](http://www.eeas.europa.eu)

## H. ASEAN - REPUBLIK KOREA

Awal kerja sama ASEAN-Korea (*Republic of Korea/ROK*) terjalin bulan November 1989, dan sejak tahun 1991 Korea menjadi Mitra Wicara ASEAN. Pada tahun 2010 kerja sama ASEAN-Korea ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis. Perayaan 25 tahun kerja sama ASEAN-Korea tahun 2014 ditandai dengan KTT Peringatan 25 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Korea di Busan pada bulan Desember. Pada KTT ini dilakukan juga *ASEAN-ROK CEO Summit 2014*, *ASEAN-ROK Special Ministerial Meeting on Forestry* dan *ASEAN-ROK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Governance*.

Kerja sama ASEAN-Korea difokuskan pada bidang ekonomi, perdagangan, investasi, transportasi, pariwisata, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, kehutanan, lingkungan hidup, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, kebudayaan, pertukaran masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan. Kerja sama ini dilaksanakan dalam berbagai proyek dan kegiatan yang didanai *ASEAN-ROK Economic Cooperation Fund (ECF)*, *ASEAN-ROK Special Cooperation Fund (SCF)*, *Future Oriented Cooperation Project (FOCP) Fund* dan *ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF)* yang



*The 18th ASEAN-Republic of Korea Summit, 7 September 2016, Vientiane, Laos | [www.asean.org](http://www.asean.org)*

dibentuk pada *ASEAN-ROK Joint Cooperation Committee (JCC)* bulan Juli 2015.

Sebagai pedoman kerja sama, pada KTT ke-17 ASEAN-Korea di Kuala Lumpur bulan November 2015 telah disahkan *ASEAN-ROK Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity 2016-2020*. PoA ini menggantikan *Plan of Action to Implement ASEAN-ROK Strategic Partnership for Peace and Prosperity 2011-2015* yang disahkan pada KTT ke-13 ASEAN-Korea di Hanoi bulan Oktober 2010. KTT ke-18 ASEAN-Korea di Vientiane tanggal 7 September 2016 kemudian membahas peningkatan kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme, upaya mencapai target perdagangan dua arah sebesar USD 200 milyar, pemberdayaan UMKM, pertukaran masyarakat dan pemuda serta kerja sama sosial budaya.

Perkembangan kerja sama ASEAN-Korea beberapa tahun terakhir antara lain:

1

### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, ASEAN dan Korea sepakat bekerja sama dalam nonproliferasi; denuklirisasi; keamanan maritim dan kerja sama maritim, termasuk menjaga perdamaian di Semenanjung Korea; keamanan non tradisional yaitu kejahatan lintas negara, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan di laut, pencucian uang, perdagangan narkoba, kejahatan ekonomi internasional dan *cybercrime*; *good governance*, demokrasi, hak asasi manusia (HAM); dan memajukan moderasi. Dalam memerangi terorisme, ASEAN dan Korea mendeklarasikan *ASEAN-ROK Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*. Korea juga menunjukkan dukungan pada terciptanya Asia Tenggara yang damai dengan mengaksesi TAC pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Korea bulan November 2004.

2

### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, ASEAN dan Korea sepakat bekerja sama dalam perdagangan dan investasi; *regional trade agreements*; keuangan; kepabeanaan; usaha kecil dan menengah; energi terbarukan, energi alternatif; infrastruktur; transportasi; ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, *rural development*; teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan inovasi. Kedua pihak telah memberlakukan *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)* sejak 1 Januari 2010. Pemberlakuan AKFTA ini merupakan kelanjutan dari perjanjian perdagangan dan investasi sebelumnya, seperti *Agreement on Trade in Goods (2006)*, *ASEAN-ROK Agreement on Trade in Services (2007)* dan *ASEAN-ROK Agreement on Trade in Investment (2009)*. Korea merupakan mitra dagang ke-5 terbesar ASEAN, sedangkan ASEAN merupakan mitra dagang ke-2 terbesar Korea. Dalam bidang investasi, Korea merupakan investor terbesar ke-5 di ASEAN. Pengembangan kerja sama ekonomi ASEAN-Korea juga dilakukan dengan pembentukan:

- *ASEAN-Korea Centre (AKC)* pada bulan Maret 2013 untuk meningkatkan volume perdagangan dan arus investasi;
- *ASEAN-Korea Business Council (AKBC)* pada bulan Desember 2014 untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan peran swasta dan mengembangkan kapasitas sektor UMKM; serta
- *ASEAN-ROK Innovation Centre* bulan November 2015 untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing industri lokal di pasar global. Pada AKC, Indonesia aktif mendorong penempatan wakil Indonesia sebagai eksekutif AKC.



### 3

### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, ASEAN dan Korea sepakat bekerja sama di bidang manajemen bencana; lingkungan, perubahan iklim, teknologi ramah lingkungan termasuk *low-carbon green growth*, pengelolaan hutan berkelanjutan dan rehabilitasi hutan, perdanganan flora dan fauna; kesehatan; pendidikan; informasi dan media massa; budaya dan seni; pemuda dan pertukaran orang, kerja sama konsuler; olahraga; pelayan publik, tenaga kerja dan pekerja migran, kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial.

Di bidang pendidikan, kerja sama ASEAN-Korea difokuskan pada pengembangan SDM serta pertukaran mahasiswa dan penawaran beasiswa melalui *ASEAN-ROK Academic Exchange Programme* dan *ASEAN Millennium Leaders College Student Exchange Programme*. Penguatan pertukaran budaya dan *people-to-people contact* juga dilakukan melalui berbagai kegiatan di AKC. ASEAN dan Korea selanjutnya menetapkan tahun 2017 sebagai *ASEAN-ROK Cultural Exchange Year* dan peresmian *ASEAN Culture House* (ACH) di Busan pada

September 2017. Di bidang lingkungan, ASEAN dan Korea memperpanjang *ASEAN-ROK Forest Cooperation Agreement* hingga tahun 2016, sebagai upaya reboisasi dan pelestarian hutan melalui kerja sama manajemen sumber daya air, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati. Di bidang penanggulangan bencana, ASEAN dan Korea aktif dalam implementasi fase kedua kerja sama AADMER 2013-2015. Korea juga mendukung konektivitas ASEAN melalui kerja sama antara ACCC dengan *ROK's Task Force on Connectivity* di Balikpapan pada bulan Juni 2013.

“

Di bidang lingkungan, ASEAN dan Korea memperpanjang *ASEAN-ROK Forest Cooperation Agreement* hingga tahun 2016, sebagai upaya reboisasi dan pelestarian hutan melalui kerja sama manajemen sumber daya air, pengembangan teknologi ramah lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati

## I. ASEAN - INDIA

India menjadi Mitra Wicara ASEAN pada tahun 1995 setelah sebelumnya menjadi Mitra Wicara Sektoral sejak 1992. Tahun 2012 diselenggarakan KTT Peringatan 20 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-India di New Delhi tanggal 20 Desember 2012. Pada KTT dimaksud disahkan *ASEAN-India Vision Statement* dan peningkatan kerja sama ASEAN-India menjadi Kemitraan Strategis. Penugasan Duta Besar India pertama untuk ASEAN, H.E. Mr. Suresh K. Reddy, dimulai pada tahun 2014 dan pembukaan Misi India untuk ASEAN di Jakarta pada tanggal 23 April 2015.



*The 2<sup>nd</sup> International Conference on ASEAN-India Cultural and Civilisational Links, Jakarta, 20 Januari 2017 | [www.asean.org](http://www.asean.org)*

ASEAN dan India berkomitmen meningkatkan kerja sama bidang perdagangan dan investasi, pengembangan SDM, iptek, teknologi informasi dan hubungan antar masyarakat. India lebih lanjut menyatakan komitmen pendanaan melalui *ASEAN-India Fund* (AIF) dan *ASEAN-India Green Fund* (AIGF) untuk membiayai berbagai proyek kerja sama ASEAN-India. Pedoman kerja sama ASEAN-India saat ini adalah *Plan of Action to Implement the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress, and Shared Prosperity 2016-2020*.

ASEAN dan India juga sepakat mengadakan forum *Delhi Dialogue* yang merupakan forum track 1,5 untuk membahas isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. ASEAN-India juga menyambut baik pembangunan dan pembukaan kembali Universitas Nalanda melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU) on the Establishment of Nalanda University*. India memanfaatkan kerja sama dalam EAS untuk mendorong pendirian kembali Nalanda University, setelah mendapat tanggapan positif dari negara anggota EAS.

Perkembangan kerja sama ASEAN-India beberapa tahun terakhir antara lain:

## 1

### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, ASEAN dan India terus menunjukkan komitmen peningkatan kerja sama. India telah mengaksesi TAC dan menandatangani Deklarasi Bersama ASEAN-India untuk Kerja Sama Memerangi Terorisme Internasional dan Penanganan Kejahatan Transnasional. India secara aktif terlibat di mekanisme yang dimotori ASEAN, yaitu EAS, ARF, ADMM Plus dan EAMF. Pada *ASEAN PMC 10+1 Session with India* bulan Juli 2016, ASEAN dan India mendorong peningkatan kerja sama bidang maritim dan penanggulangan terorisme serta *transnational crimes*.

## 2

### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, kerja sama ASEAN-India diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India* yang ditandatangani para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003. Kesepakatan tersebut diikuti dengan penandatanganan *ASEAN-India Trade in Goods Agreement* yang berlaku mulai 1 Januari 2010. Pemberlakuan ini menandai dimulainya perdagangan bebas ASEAN-India melalui ASEAN-India FTA (AIFTA). Tahun 2015, perdagangan ASEAN-India mencapai USD 58,7 milyar. Angka tersebut terus meningkat sejak tahun 2010 namun masih di bawah target total perdagangan ASEAN-India yang dicanangkan pada tahun 2012 sebesar USD 100 milyar. Minyak sawit, kopi, teh hitam dan merica adalah produk utama yang diperdagangkan di AIFTA ini. Dari sisi investasi, FDI India di ASEAN tercatat sebesar USD 605,9 miliar pada tahun 2014 dan naik menjadi USD 1.254 miliar pada tahun 2015. Untuk mendukung peningkatan investasi, pada bulan Desember 2012 didirikan *ASEAN-India Trade and Investment Centre* (AITIC).

Kerja sama ekonomi lain adalah pengembangan UMKM dan pariwisata. Terkait UMKM, ASEAN dan India menekankan pada 4 area kerja sama, yaitu (i) peningkatan akses UMKM terhadap keuangan; (ii) teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi; (iii) pengembangan SDM; dan (iv) promosi UMKM. Dalam bidang pariwisata, ASEAN dan India telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) between ASEAN and India on Strengthening Tourism Cooperation* pada bulan Januari 2012, untuk mendorong kerja sama fasilitasi perjalanan dan kunjungan wisatawan serta memperkuat kemitraan pariwisata. Jumlah wisatawan India ke ASEAN pada tahun 2015 meningkat 7,1% menjadi 116 juta orang, sedang wisatawan ASEAN yang berkunjung ke India sejumlah 700 ribu orang.

## 3

### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, kerja sama telah diperluas hingga mencakup pembangunan SDM, iptek, *people-to-people contacts*, kesehatan dan farmasi, transportasi dan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pertanian, energi, serta IAI. Semua proyek kerja sama tersebut didanai *ASEAN-India Fund* (AIF). Untuk mendukung kerja sama bidang ini, India mendirikan *ASEAN-India Centre* pada tahun 2014 di New Delhi.

ASEAN dan India juga sepakat mengadakan forum *Delhi Dialogue* yang merupakan forum *track 1,5* untuk membahas isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. ASEAN-India juga menyambut baik pembangunan dan pembukaan kembali Universitas Nalanda melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU) on the Establishment of Nalanda University*. India memanfaatkan kerja sama dalam EAS untuk mendorong pendirian kembali Nalanda University, setelah mendapat tanggapan positif dari negara anggota EAS.

Kerja sama iptek adalah bidang kerja sama penting dalam kerja sama ASEAN-India. Kerja sama di bidang iptek secara formal dibentuk melalui pelebagaan *ASEAN-India Working Group on Science and Technology* (AIWGST) serta pembentukan dan operasionalisasi *ASEAN-India Science and Technology Development Fund* (AISTDF) dengan dana awal sebesar USD 1 juta dari India.

KTT terakhir (ke-14) ASEAN-India dilaksanakan di Vientiane tanggal 8 September 2016. Pada KTT ini, India menyampaikan komitmen untuk: (a) meningkatkan AISTDF menjadi USD 5 juta pada tahun 2016; (b) membentuk konektivitas digital *ASEAN-India Innovation Platform* menggunakan teknologi *Gigabit-capable Passive Optical Network* (GPON); serta (c) memanfaatkan AIGF dalam menghadapi perubahan iklim.







“

Untuk melaksanakan kerja sama ini, ASEAN dan RRT membentuk *ASEAN-China Centre* (ACC) yang berlokasi di Beijing.



*The 19th ASEAN-China Summit to Commemorate the 25th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations, 7 September 2016, Vientiane, Laos | [www.asean.org](http://www.asean.org)*

## J. ASEAN - RRT (Republik Rakyat Tiongkok)

RRT resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN pada Juli 1996, dan sejak tahun 2003 meningkat menjadi Kemitraan Strategis. Pengembangan hubungan kerja sama ASEAN-RRT ditandai dengan pembukaan secara resmi misi diplomatik RRT untuk ASEAN tanggal 27 September 2012 dengan H.E. Mme Yang Xiuping sebagai Duta Besar pertama untuk ASEAN. Saat ini Duta Besar RRT untuk ASEAN adalah H.E. Mr. Xu Bu.

Pelaksanaan kerja sama ASEAN-RRT ke depan tercantum dalam *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity 2016-2020*. Kerja sama ini memiliki 11 prioritas bidang kerja sama, yaitu pertanian, informasi dan teknologi komunikasi, sumber daya manusia, investasi bersama, pembangunan wilayah Mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan publik dan lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam dan energi.

Untuk melaksanakan kerja sama ini, ASEAN dan RRT membentuk *ASEAN-China Centre* (ACC) yang berlokasi di Beijing. Pembukaan ACC merupakan wujud nyata komitmen RRT untuk lebih mendorong peningkatan ekspor ASEAN, peningkatan investasi RRT serta peningkatan kunjungan wisatawan RRT. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan ACC difokuskan untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Indonesia sebelumnya pernah berhasil menempatkan wakilnya sebagai eksekutif di ACC.



Perkembangan kerja sama ASEAN-RRT beberapa tahun terakhir antara lain:

## 1

### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, ASEAN dan RRT sepakat bekerja sama di bidang HAM, keamanan non-tradisional, kejahatan transnasional, pertahanan, kejahatan lintas negara, kerja sama kelautan, isu Laut China Selatan (LCS), terorisme, ekstremisme, *cyber security*, dan konektivitas maritim. Pada KTT ASEAN ke-30, isu LCS dibahas secara khusus agar situasi yang memanas bisa dihindari, termasuk seruan agar COC dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2017.

RRT sendiri merupakan Mitra Wicara ASEAN pertama yang menandatangani TAC pada KTT ke-7 ASEAN-RRT di Bali tahun 2003 dan menyepakati penguatan kerja sama di berbagai *ASEAN-led mechanisms*, yaitu EAS, ARF, APT dan ADMM Plus. Sebagai landasan kerja sama ASEAN dan RRT di bidang politik dan keamanan, keduanya mengeluarkan Deklarasi Bersama ASEAN-RRT tentang Kerja Sama Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional.

Terkait isu LCS, RRT telah menyatakan komitmennya menyelesaikan *Framework of the Code of Conduct (COC) in the South China Sea* pada tahun 2017. Pada KTT ke-19, kedua pihak telah mengesahkan 2 dokumen penting terkait isu LCS, yaitu: *Joint Statement on the Application of the Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES) in the South China Sea* dan *Guidelines for Hotline Communications Among Senior Officials of the Ministries of Foreign Affairs of ASEAN Member States and China in Response to Maritime Emergencies in the Implementation of the DOC*. Kedua dokumen tersebut mengedepankan kerja sama dalam kebebasan navigasi dan overflight, terutama pencegahan terhadap insiden di LCS.

## 2

### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, ASEAN dan RRT sepakat bekerja sama di bidang keuangan; ketahanan pangan, pertanian, dan kehutanan; kerja sama maritim; teknologi informasi dan komunikasi (TIK); iptek dan inovasi; *space cooperation*; transportasi; pariwisata; kerja sama energi dan mineral; *quality inspection*; bea cukai/kepabeanan; hak kekayaan intelektual; UMKM; dan kerja sama industri.

RRT adalah mitra dagang ASEAN terbesar ke-1 dengan total nilai perdagangan tahun 2015 sebesar USD 345,7 milyar. Nilai perdagangan tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan positif dengan kenaikan sekitar 15,2% dan nilai investasi mencapai USD 8,2 milyar atau naik 6,8% dari investasi yang masuk ke ASEAN. Di bidang perdagangan dan investasi, pada bulan November 2015 ASEAN dan RRT sepakat menandatangani *Protocol to Amend the Framework Agreement on the Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements* untuk meningkatkan target perdagangan hingga USD 1 triliun dan investasi hingga USD 150 milyar di tahun 2020. Peningkatan perdagangan antara ASEAN-RRT juga dapat lebih ditingkatkan dengan menggunakan mekanisme *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*.

## 3

### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, ASEAN dan RRT sepakat bekerja sama di bidang kesehatan publik; pendidikan; pelestarian budaya; SDM dan *social protection*; *poverty reduction*; lingkungan hidup dan konservasi lingkungan; media; penanganan bencana; peningkatan interaksi *people-to-people* dan kerja sama antar pemerintah lokal.

ASEAN-RRT mencanangkan tahun 2017 sebagai *ASEAN-China Year of Tourism Cooperation* yang bertujuan meningkatkan arus wisatawan di kawasan ASEAN dan RRT guna mendukung kemajuan kerja sama bidang ekonomi maupun *people-to-people interaction*. Kedua pihak menargetkan hingga tahun 2020 sebanyak 30 juta wisatawan RRT akan berkunjung ke wilayah ASEAN.

Pada KTT ke-19 ASEAN-RRT di Vientiane tanggal 7 September 2016, diperingati 25 tahun kerja sama ASEAN-RRT dengan mencatat pencapaian di berbagai bidang. Di bidang ekonomi dan konektivitas, pertemuan menyepakati untuk mengintensifkan negosiasi RCEP dan pelaksanaan MPAC 2025.





## K. ASEAN - RUSIA

Pada bulan Juli 1996 Rusia resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN. Kerja sama ASEAN-Rusia difokuskan pada bidang pembangunan, SDM, lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan, peningkatan *people-to-people contact*, *counter-terrorism*, maritim, penanganan bencana, kejahatan lintas batas, ekonomi, perdagangan dan investasi, energi, perhubungan, iptek, konektivitas, pendidikan, pemuda. Hubungan kemitraan ASEAN-Rusia memasuki tahap baru pada tahun 2004 dengan aksesinya Rusia terhadap TAC. Aksesinya ini menunjukkan komitmen kuat Rusia terhadap ASEAN, terutama bidang politik dan keamanan, guna turut menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Hingga kini telah dilakukan 3 kali KTT ASEAN-Rusia. Pada KTT ke-3 yang juga merupakan KTT Peringatan 20 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Rusia di Sochi (Mei 2016), dihasilkan 3 *outcome documents* sebagai acuan peningkatan kerja sama: (a) *Sochi Declaration*; (b) *Comprehensive Plan of Action to Promote Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Russian Federation (2016-2020)*; dan (c) *Report of the ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG)*.

Rusia menugaskan Duta Besarnya untuk Indonesia, H.E. Mr. Mikhail Galuzin, menjadi Duta Besar untuk ASEAN pada bulan Maret 2013.



The 3rd ASEAN-Russia Summit, 19-20 Mei 2016, Sochi, Rusia | [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)



Adapun perkembangan kerja sama ASEAN-Rusia beberapa tahun terakhir, antara lain

### 1

#### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, ASEAN dan Rusia sepakat membentuk *ASEAN-Russia Eminent Persons Group (AREPG)* pada Pertemuan ke-48 AMM/PMC di Kuala Lumpur bulan Agustus 2015 guna melakukan review dan memberikan rekomendasi atas hubungan kerja sama ASEAN-Rusia. Pertemuan ke-1 AREPG telah berlangsung di Vientiane pada Januari 2016; Pertemuan ke-2 di Siem Reap bulan Februari 2016; dan Pertemuan ke-3 di Moskow bulan April 2016. Rusia merupakan Mitra Wicara ASEAN yang aktif berpartisipasi dalam kerja sama politik keamanan melalui EAS, ARF dan ADMM Plus.

### 2

#### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, pada the 3<sup>rd</sup> AEM-Russia di Kuala Lumpur bulan Agustus 2015 para Menteri Ekonomi telah mensahkan the *Post-2015 ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation Work Programme* dengan lampiran 57 proyek baru. Pada tahun 2016 (s.d. November) nilai total perdagangan ASEAN-Rusia mencapai USD 13,381 milyar dan tingkat FDI Rusia ke ASEAN mencapai USD 28,9 milyar. ASEAN dan Rusia sedang menjajaki penguatan integrasi ASEAN-Rusia melalui kerja sama ekonomi antara ASEAN, *Eurasian Economic Union (EEU)* dan SCO.

Di bidang energi, ASEAN dan Rusia pada tahun 2013-2014 telah melaksanakan kegiatan "*Capacity Building of Hydro Power Operators in Assessment (Inspection) of Hydro Power Facility Condition*" dan "*Automated System Management Decisions Making Using "Automated Reliability Maintenance System (ARMS) to Improve the Safety and Reducing Accident Rate on Power Facilities"*". Indonesia merupakan negara pengusul proyek "*Capacity Building of Hydropower Operators in (Inspection) of Hydropower Facility Condition*" dengan Kementerian ESDM sebagai *focal point*.

Di bidang pariwisata, telah diadakan kegiatan *Russian Language Course for ASEAN Tour Operators* dan *Advance Russian Language Training for ASEAN Tour Operators* sesuai kesepakatan Pertemuan ke-12 ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee (ARJCC) tahun 2014.

### 3

#### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, telah dilakukan 4 kali kegiatan kegiatan *Russia-ASEAN Youth Summit (2013-2016)* yang dilaksanakan secara bergantian di kota-kota ASEAN dan Rusia. Pendirian *ASEAN Center di Moscow University (MGIMO)* juga memiliki peran penting dalam mempromosikan dan meningkatkan *awareness* terhadap ASEAN di kalangan masyarakat Rusia. Lebih lanjut, Rusia mengusulkan agar ASEAN-Rusia memiliki mekanisme diskusi rutin dalam tataran *track 2* melalui forum *ASEAN-Russia Strategic Partnership Think Tank (ARSPTT)*. Kedua pihak juga menyetujui penetapan *ASEAN-Russia Cultural Year* pada tahun 2016.



## 2. Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara Sektoral

### A. ASEAN - PAKISTAN

Pakistan memperoleh status Mitra Wicara Sektoral ASEAN pada saat Pertemuan ke-26 AMM di Singapura tanggal 23 Juli 1993. Kemudian pada pertemuan ke-11 ARF tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta, Pakistan mengaksesi TAC dan menjadi anggota ke-24 ARF. Pertemuan Pertama Kerja Sama Sektoral ASEAN-Pakistan diselenggarakan tanggal 5-7 November 1997 di Islamabad.

Pertemuan tersebut menyepakati Kerja Sama Sektoral ASEAN-Pakistan mencakup bidang perdagangan, industri, investasi, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, obat-obatan dan narkoba, pariwisata dan pengembangan

SDM. Hubungan kerja sama sektoral ASEAN-Pakistan kemudian dilembagakan melalui Pertemuan *ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee* (APJSCC), yang pertama kali diselenggarakan tanggal 5 Februari 1999 di Bali. APJSCC telah berjalan lima kali dan pertemuan kelima/terakhir pada tanggal 31 Mei 2011 di Sekretariat ASEAN.

Duta Besar Pakistan untuk ASEAN adalah H.E. Mr. Mohammad Aqil Nadeem, yang menyerahkan *letter of credence* kepada Sekjen ASEAN, H.E. Mr. Le Luong Minh, di Sekretariat ASEAN tanggal 1 Desember 2015.

Sejak memulai kerja sama tahun 1993, perkembangan yang dapat dicatat antara lain:

1

#### Politik-Keamanan

Di bidang **politik-keamanan**, ASEAN dan Pakistan menyepakati proposal Pakistan untuk memulai kunjungan penegak hukum negara anggota ASEAN ke Islamabad, guna mengidentifikasi kegiatan bagi implementasi *ASEAN-Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*. *Joint Declaration* yang ditandatangani pada AMM/PMC/ARF Juli 2005 di Vientiane.

2

#### Ekonomi

Di bidang **ekonomi**, telah dibentuk *ASEAN-Pakistan Business Council*, *ASEAN-Pakistan Trade Facilitation Workshop* dan *ASEAN-Pakistan Cooperation Fund* (APCF). Pakistan juga mengusulkan pembentukan *Joint Task Force on Industry* untuk mengidentifikasi subsektor/produk bagi integrasi industri ASEAN dan Pakistan. Selain itu, Pakistan berminat kerja sama bidang *Clean Development Technologies* (CDM).

3

#### Sosial-Budaya

Di bidang **sosial-budaya**, ASEAN dan Pakistan menjajaki kerja sama pariwisata dalam bentuk pelatihan bagi staf *Pakistan Institute of Tourism and Hotel Management* (PITHOM) dan *Pakistan-Austria Institute of Tourism and Hotel Management* (PAITHOM) oleh ASEAN. Pakistan juga menawarkan beasiswa bagi 10 pelajar dari negara anggota ASEAN, beasiswa tahunan untuk belajar bahasa Inggris, dan berencana menawarkan beasiswa khusus bagi negara-negara CLMV.



## B. ASEAN - NORWEGIA

Setelah menyampaikan keinginan kerja sama formal tahun 2014, Norwegia disahkan sebagai Mitra Wicara Sektoral ASEAN pada Pertemuan ke-48 AMM/PMC di Kuala Lumpur bulan Agustus 2015 (Mitra Wicara Sektoral ASEAN ke-2 setelah Pakistan). Sebelumnya, Norwegia telah melakukan aksesi terhadap TAC pada Pertemuan ke-46 AMM/PMC di Brunei Darussalam bulan Juli 2013, sehingga Norwegia tercatat sebagai negara ke-32 yang mengaksesi TAC.

Prioritas kerja sama ASEAN-Norwegia antara lain di bidang maritim, HAM, kontra terorisme, ekonomi perdagangan, UKM, konektivitas, bencana alam, perubahan iklim, pendidikan dan sosial budaya. Prioritas kerja sama ini diadopsi dari *Joint Statement on the ASEAN-Norway Partnership* yang disahkan pada Pertemuan ke-47 AMM/PMC di Nay Pyi Taw tanggal 8 Agustus 2014. Pendanaan kegiatan dalam kerangka kerja sama ASEAN-Norwegia didanai oleh Norwegian *ASEAN Regional Initiative Fund*.



## C. ASEAN - SWISS

Swiss menyampaikan keinginan menjadi Mitra Pembangunan (*Development Partner*) ASEAN tahun 2015, dan mengubahnya menjadi Mitra Wicara Sektoral pada tahun yang sama. Pada Pertemuan ke-48 AMM/PMC di Vientiane bulan Agustus 2016, Swiss dikukuhkan menjadi Mitra Sektoral ke-3 ASEAN setelah Pakistan dan Norwegia.

Menindaklanjuti status Swiss sebagai Mitra Sektoral ASEAN, pada 28 November 2016 dilaksanakan Pertemuan ke-1 *ASEAN-Switzerland Joint Sectoral Cooperation Committee* (JSCC) di Sekretariat ASEAN. Pertemuan dimaksud menyepakati *Terms of Reference for the ASEAN-Switzerland JSCC* dan pertukaran pandangan mengenai bidang kerja sama prioritas ASEAN-Swiss, antara lain HAM, pengembangan UMKM, penanggulangan bencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan buruh migran.

Swiss telah menyampaikan secara informal kemungkinan untuk mengaksesi TAC sebagai komitmen Swiss terhadap terwujudnya perdamaian di kawasan. Swiss juga telah menunjuk Duta Besar Swiss untuk ASEAN di Jakarta, yang dirangkap oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia, pada bulan Desember 2014.







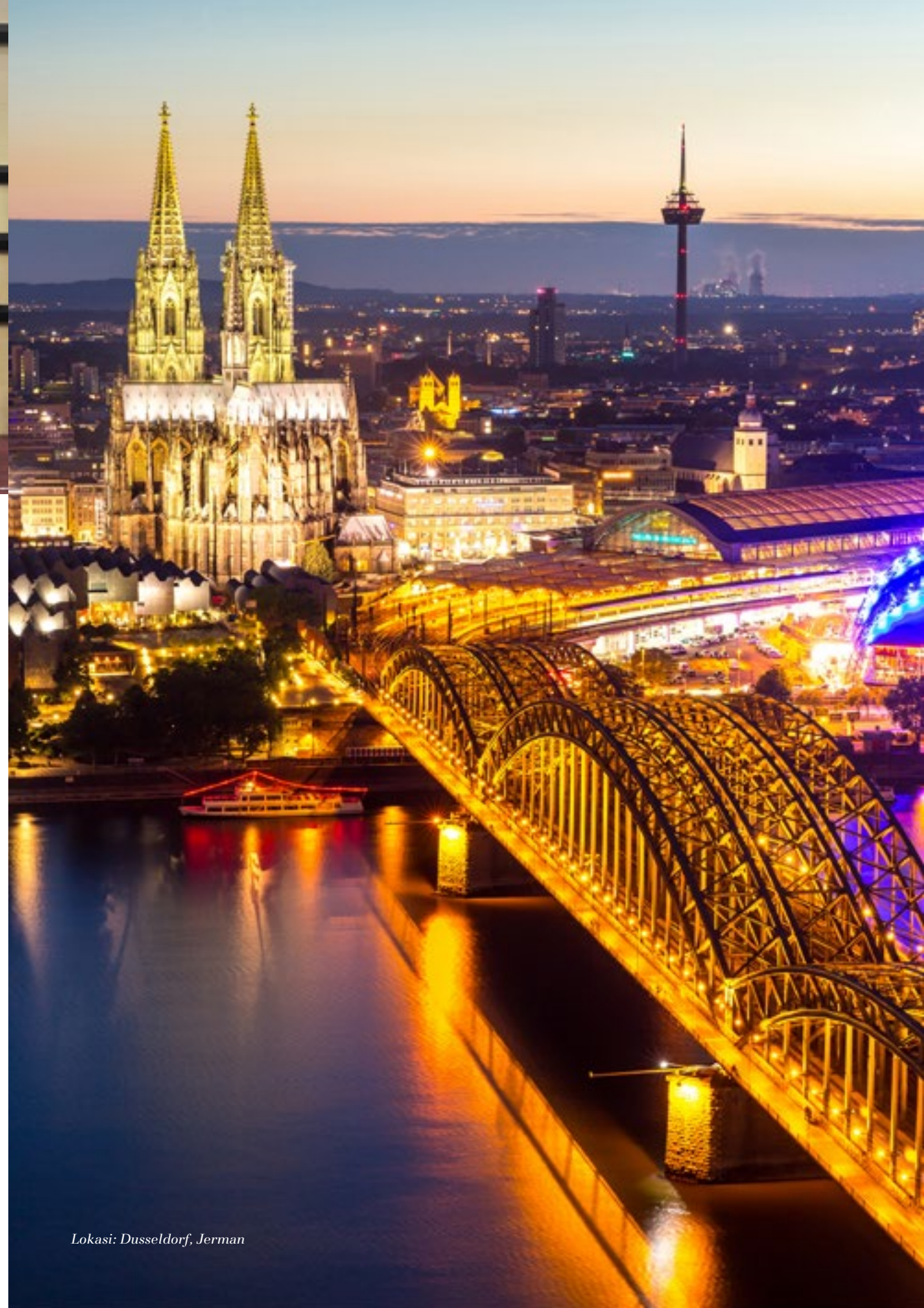
### 3. Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Pembangunan

#### ASEAN - JERMAN

Jerman menyampaikan keinginan resmi menjadi Mitra Pembangunan ASEAN tanggal 1 Maret 2016. Pada Pertemuan ke-48 AMM/PMC di Vientiane bulan Agustus 2016 Jerman diberikan status Mitra Pembangunan ASEAN. Meski demikian, sejak 2005, Jerman sebetulnya telah banyak mendukung ASEAN lewat pemberian dana guna peningkatan kerjasama bidang lingkungan, perubahan iklim, integrasi ekonomi kawasan dan konsolidasi Sekretariat ASEAN.

Menindaklanjuti status Jerman sebagai Mitra Pembangunan ASEAN sejak tahun 2016, Pertemuan ke-1 *ASEAN-Germany Development Partnership Committee* (AGDPC) telah diselenggarakan di Jakarta, bulan Januari 2017. Pertemuan telah menyepakati *Term of Reference for the ASEAN-Germany Development Partnership Committee* dan bertukar pandangan mengenai kerja sama

prioritas yang akan dimajukan dalam kerangka Kemitraan Pembangunan ASEAN-Jerman. Jerman antara lain mengusulkan beberapa proyek konkret seperti *Seminar ASEAN-EU Regional Cooperation*, penguatan *ASEAN Committee on Disaster Management*, kemungkinan kerja sama kontrol ekspor, perlindungan konsumen, *workshop* mitigasi perubahan iklim, dialog media dan *academic exchange day*. Sementara, usulan ASEAN antara lain: pendidikan kejuruan, *sharing expertise* UMKM, pembangunan berkelanjutan, pariwisata, serta pembangunan kapasitas diplomat dan pejabat negara anggota ASEAN di bidang perdamaian dan rekonsiliasi. Hingga saat ini perundingan masih dilakukan oleh ASEAN dan Jerman.



Lokasi: Dusseldorf, Jerman



---

## 4. Kerja Sama ASEAN dengan Organisasi Regional

### A. ASEAN-COMMUNITY OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN STATES (CELAC)

Kerja sama ASEAN dengan CELAC diijaki pertama kali pada sesi pembuka SMU PBB bulan September 1999, ketika CELAC masih bernama *Rio Group*. Pada SMU PBB tanggal 24 September 2010, dilakukan pertemuan *ASEAN-Rio Group Open-Ended Troika*. Setelah itu, di sela-sela SMU PBB ke-69 tanggal 27 Agustus 2014 diselenggarakan Pertemuan Tingkat Menlu ASEAN-CELAC. Pada tahun 2015 dan 2016 tidak diselenggarakan Pertemuan ASEAN-CELAC tingkat Menteri, namun para Duta Besar negara anggota CELAC di Jakarta melakukan dialog dengan Komite Wakil Tetap ASEAN di Sekretariat ASEAN untuk membahas potensi kerja sama dalam ketiga pilar Masyarakat ASEAN yang sejalan dengan CELAC.

CELAC, dengan 33 negara anggota, memiliki kemiripan dengan ASEAN, yaitu sama-sama



berupaya mencapai Komunitas Ekonomi melalui promosi perdagangan, manufaktur, pertanian, petrokimia dan ketahanan pangan. Dengan kemiripan tersebut, maka kerja sama ASEAN dan CELAC dapat saling melengkapi, khususnya di bidang pertanian dan teknologi. CELAC juga memiliki ekonomi yang kuat dan terus tumbuh serta PDB sebesar USD 8 milyar, sehingga punya potensi besar bagi ASEAN. Prioritas kerja sama ASEAN-CELAC saat ini meliputi perdagangan, konektivitas, pertanian dan kehutanan, energi, pariwisata, *drugs* dan lingkungan. Ke depannya, ASEAN dan CELAC dapat menjajaki kerja sama *people-to-people contact*, baik melalui pendidikan, pertukaran pelajar dan pariwisata. Indonesia akan menjadi negara koordinator kerja sama ASEAN-CELAC pada tahun 2019.

### B. ASEAN-ECONOMIC COOPERATION ORGANISATION (ECO)

*Economic Cooperation Organisation* (ECO) merupakan organisasi yang didirikan oleh Iran, Pakistan dan Turki pada tahun 1985. Selanjutnya, tanggal 28 November 1992 keanggotaan ECO bertambah dengan bergabungnya Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Sekretariat ECO berada di Iran. Adapun Hubungan ASEAN-ECO dimulai tahun 1992. Selanjutnya, tahun 1993 disepakati kontak antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat ECO.

Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 ASEAN-ECO dilaksanakan bulan September 1995 di New York. Hubungan kedua organisasi dilandasi oleh MoU yang ditandatangani pada Januari 2006 oleh Sekjen ASEAN dan ECO. Kesepakatanannya meliputi pertukaran informasi dan berbagi pengalaman di bidang perdagangan dan investasi, pengendalian narkoba, UMKM dan pariwisata. Tujuh negara anggota ECO



telah menunjuk Duta Besarnya untuk ASEAN, yaitu Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakstan, Pakistan, Turki dan Uzbekistan, serta telah membentuk *ECO Ambassadors Contact Group* pada tanggal 27 Februari 2013. PTM ke-13 ASEAN-ECO (2013) dan PTM ke-14 ASEAN-ECO (2014) dilakukan di sela-sela SMU PBB di New York.

Penyelenggaraan *ASEAN-ECO Tourism Forum* tahun 2014, menunjukkan ASEAN dan ECO telah memasuki tahapan baru kerja sama dari sekedar *exchange of information* menuju kerja sama konkret. Negara anggota ASEAN juga menyampaikan pandangan mengenai perlunya peningkatan kerja sama *business-to-business* seperti melalui penyelenggaraan *ASEAN-ECO Business Forum*. Pertemuan terkini ASEAN dan ECO adalah *ASEAN-ECO Informal Coordination Meeting* (ICM) pada tingkat pejabat tinggi, yang dilakukan di sela-sela SMU PBB ke-71 tanggal 24 September 2016.





### C. ASEAN-GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)

Negara Anggota GCC terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan Persatuan Emirat Arab. Para Menlu ASEAN bertemu mitranya dari GCC pertama kali di sela-sela SMU PBB tahun 1990. Disepakati bahwa para Menlu dari kedua organisasi akan bertemu rutin setiap tahun di New York dan mendorong Sekretariat ASEAN untuk menjalin kerja sama dengan Sekretariat GCC. Pada tahun 2000, telah terbentuk *ASEAN Riyadh Committee* (ARC) di Riyadh untuk mengembangkan hubungan kerja sama antara ASEAN dan GCC. Hingga saat ini, 5 negara anggota GCC telah menunjuk Duta Besarnya untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.

Mekanisme kerja sama ASEAN-GCC dilangsungkan pada tingkat Menteri Luar Negeri /Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) dan Pejabat Tinggi melalui pertemuan di sela-sela SMU PBB atau di salah satu negara GCC maupun negara ASEAN. Adapun isu-isu yang dibahas dalam kerja sama ini mencakup bidang kesehatan, pariwisata, sertifikasi makanan halal,

penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas negara. Selain itu, kedua organisasi terus berupaya mengembangkan kerja sama bidang perdagangan dan investasi, mempromosikan *inter-faith dialogue* dan meningkatkan kerja sama institusional ASEAN-GCC dalam bentuk MoU.

Untuk mempererat kerja sama, pada PTM ke-2 ASEAN-GCC di Singapura tanggal 31 Mei-1 Juni 2010, ASEAN-GCC sepakat melaksanakan *Two-Year Action Plan 2010-2012* yang mencakup kerja sama berbagai bidang. PTM ke-3 ASEAN-GCC di Manama tanggal 26 November 2013 yang berlangsung bersamaan dengan Pertemuan ke-12 *Asia Cooperation Dialogue* tanggal 25 November 2013 me-review perkembangan kerja sama ASEAN-GCC dan bertukar pandangan mengenai arah kerja sama ASEAN-GCC ke depan. Pertemuan juga menyepakati penyelenggaraan PTM ke-4 ASEAN-GCC di tahun 2014, namun tidak terlaksana. Thailand yang menjadi *country coordinator* kerja sama ASEAN-GCC tahun 2017 menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah PTM ke-4 ini di tahun 2017.

### D. ASEAN-MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)

Negara anggota MERCOSUR terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay dan Venezuela. Kontak awal ASEAN dan MERCOSUR dimulai ketika para Menlu ASEAN dan MERCOSUR mengadakan *Informal Breakfast Meeting* di sela-sela *the 3<sup>rd</sup> Foreign Ministers' Meeting of the Forum for East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC) tanggal 22 Agustus 2007 di Brasilia. Pada Pertemuan tersebut, ASEAN dan MERCOSUR sepakat memperkuat kerja sama, yang ditindaklanjuti dengan pertemuan Sekjen MERCOSUR dan Sekjen ASEAN pada *Presidential Summit of MERCOSUR* tanggal 17-18 Desember 2007 di Montevideo.

Kerja sama ASEAN-MERCOSUR terwujud dengan dilakukannya PTM ke-1 ASEAN-MERCOSUR di Brasilia tanggal 24 November 2008. Pertemuan dilakukan untuk membangun kerangka kerja sama ASEAN-MERCOSUR dan membahas situasi keuangan internasional, keamanan energi, keamanan pangan, perkembangan *WTO-Doha Round*,

perkembangan di ASEAN dan MERCOSUR, peningkatan perdagangan, investasi dan ekonomi, *people-to-people ties* serta kerja sama ASEAN-MERCOSUR di masa yang akan datang. Sedangkan rencana pertemuan tingkat pejabat senior maupun PTM ke-2 ASEAN-MERCOSUR hingga saat ini belum dapat terlaksana.

Terkait tindak lanjut *Plan of Action for ASEAN-MERCOSUR Cooperation* yang telah disiapkan ASEAN, MERCOSUR memandang bahwa PoA telah merefleksikan kebutuhan kerja sama kedua pihak. Keduanya sepakat bahwa letak geografis kawasan menjadi tantangan utama untuk pengembangan kerja sama secara intensif. Oleh karena itu, konektivitas fisik (transportasi dan infrastruktur) maupun non-fisik (teknologi informasi, pendidikan dan budaya) merupakan elemen utama mengatasi tantangan tersebut. Indonesia pada tahun 2017 menjadi negara koordinator kerja sama ASEAN-MERCOSUR.





## E. ASEAN-PACIFIC ALLIANCE (PA)

*Pacific Alliance* (PA) yang beranggotakan Chile, Kolombia, Meksiko dan Peru, dibentuk dengan mandat untuk menjembatani kerja sama ke kawasan Asia Pasifik. Inisiatif kerja sama ASEAN dan PA disampaikan oleh delegasi Kemlu Kolombia saat berkunjung ke Sekretariat ASEAN tanggal 24 Mei 2011. Delegasi Kolombia menyampaikan keinginan para Menlu PA untuk menyelenggarakan *ASEAN-Pacific Alliance Ministerial Meeting* di sela-sela SMU PBB bulan September 2011. Pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN pada September 2012 di Phnom Penh mencatat keinginan PA kerja sama dengan ASEAN.

PTM ke-1 ASEAN-PA dilakukan di sela-sela SMU PBB tanggal 26 September 2014, dipimpin bersama oleh Menlu Myanmar selaku Ketua ASEAN dan Menlu Meksiko selaku Ketua PA. PTM ke-1 ini menyepakati berbagai potensi kerja sama ASEAN dan PA di bidang ekonomi, konektivitas, *good governance*, demokrasi dan *rule of law* serta penanganan isu keamanan non-



tradisional. Sebagai tindak lanjut, Komite Wakil Tetap ASEAN kembali melakukan pertemuan dengan Duta Besar negara anggota PA di Jakarta tanggal 25 Mei 2015 untuk membahas struktur ASEAN dan PA, perkembangan ASEAN dan PA, area kerja sama ASEAN-PA dan modalitas kerja sama ke depan.

PTM ke-2 dan ke-3 ASEAN-PA diselenggarakan di sela-sela SMU PBB tahun 2015 dan 2016. Selain itu, kerja sama diharapkan diperluas melalui pertemuan di regional PA, misalnya secara bersamaan dengan pertemuan FEALAC. Sementara itu, dua negara anggota ASEAN, yaitu Singapura dan Indonesia, telah menjadi negara peninjau di PA. Indonesia disahkan menjadi negara peninjau saat Pertemuan ke-14 *Council of Ministers of the Pacific Alliance* tanggal 2 Juli 2015 di Caracas.

## F. ASEAN-SOUTH ASIA ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION (SAARC)

Pertemuan pertama ASEAN dan SAARC diselenggarakan di New York tanggal 25 September 1998. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa pertemuan ASEAN-SAARC akan diselenggarakan setiap tahun di sela-sela SMU PBB. Pertemuan dihadiri oleh Sekjen ASEAN dan Sekjen SAARC serta wakil-wakil dari semua negara anggota ASEAN dan SAARC (Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka).

Sekretariat SAARC di Kathmandu dan Sekretariat ASEAN juga telah meningkatkan kontak dan kerja sama. Selain itu, pejabat ekonomi dan perdagangan SAARC telah melakukan kunjungan ke Sekretariat ASEAN untuk mempelajari kerja sama ekonomi ASEAN, terutama skema *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Kemudian, Sekjen ASEAN dan SAARC telah mengadakan pertemuan di Sekretariat ASEAN untuk membicarakan berbagai kemungkinan kerja sama. Salah satu hasil pertemuan adalah penyelenggaraan



*Workshop* yang menghasilkan *ASEAN-SAARC Secretariat's Partnership Work Plan* (2004-2005) dan *Guidelines for ASEAN-SAARC Secretariat's Partnership*.

Prioritas kerja sama ASEAN dan SAARC yang disepakati adalah di bidang pertanian dan pedesaan, bioteknologi, kebudayaan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan, energi, lingkungan hidup, keuangan, mekanisme pendanaan, informasi, komunikasi dan media, *people-to-people contacts*, penanggulangan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, pengembangan sosial dan pariwisata. SAARC juga menggunakan kerja sama dengan ASEAN untuk mempelajari lembaga-lembaga di ASEAN seperti AHA, *ASEAN Foundation* dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asian* (ERIA). Indonesia akan menjadi negara koordinator kerja sama ASEAN-SAARC pada tahun 2018.

## 5. Kerja Sama Lainnya

### A. ASEAN PLUS THREE (APT)

APT adalah mekanisme kerja sama yang dikembangkan ASEAN dengan tiga negara Mitra Wicara, yaitu RRT, Jepang dan Korea, sejak tahun 1997 saat Asia dilanda krisis ekonomi. Dasar kerja sama APT adalah *Joint Statement on East Asia Cooperation*, *East Asia Vision Group Report* tahun 2007 dan *Report of the East Asia Study Group*. Kerja sama APT berfokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, alih teknologi, industri pertanian, ketahanan pangan dan energi, UMKM, pariwisata, kesehatan, jaring pengaman keuangan, investasi, perbankan dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional.

Pada tahun 2017, ASEAN akan merayakan peringatan 20 tahun kerja sama APT. Pada peringatan ini diusulkan mengeluarkan *Declaration on the 20<sup>th</sup> Anniversary of ASEAN Plus Three* dan membahas usul RRT mengenai pembentukan *APT SME Service Alliance* yang didanai melalui *APT Cooperation Fund*.

Di bidang keuangan, hasil yang menonjol adalah disepakatinya *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM) pada 24 Maret 2010. CMIM berisikan skema bilateral *Swap Arrangement* antar negara APT dengan jumlah dana USD 120 milyar sebagai *safety net* likuiditas keuangan agar krisis keuangan dapat dihindari. Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN+3 di Kamboja bulan April 2012



19th ASEAN Plus Three Summit, 7 September 2016, Vientiane, Laos | [www.asean.org](http://www.asean.org)

kemudian sepakat meningkatkan jumlah dana CMIM menjadi USD 240 milyar.

Pada KTT ke-19 APT di Vientiane tanggal 7 September 2016, diperkokoh komitmen untuk menjadikan APT sebagai *driving force* untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan di kawasan, sejalan dengan implementasi Visi Masyarakat ASEAN 2025. APT diharapkan menjadi organisasi yang terbuka dan inovatif terhadap ekonomi global sehingga bisa berjalan paralel dengan EAS, APEC dan RCEP. Sejak didirikan, APT telah menciptakan kondisi keuangan yang kondusif di kawasan, termasuk ketika terjadi krisis global tahun 2008. Arah ke depan kerja sama APT harus ditingkatkan pada bidang politik dan keamanan, mengingat kawasan Asia Timur masih rentan terhadap masalah di LCS dan Semenanjung Korea yang melibatkan negara-negara APT.

Berikut perkembangan berbagai kerja sama dalam kerangka APT:

#### 1. ASEAN PLUS THREE COOPERATION FUND

*Second Joint Statement on East Asia Cooperation* menyepakati pembentukan APTCF untuk mendukung program APT serta implementasi APT-CWP 2013-2017. Dana awal APTCF adalah USD 3 juta dengan rasio kontribusi 9:1 (negara *Plus Three*: USD 2,7 juta dan negara anggota ASEAN: masing-masing USD 30 ribu). Proses pembayaran kontribusi Indonesia ke APTCF dilakukan melalui Kemkeu c.q. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berkoordinasi dengan Ditjen Kerja Sama ASEAN dan Ditjen Multilateral, Kemlu RI. Pada tanggal 30 Desember 2016, Indonesia telah membayar kontribusi pada APTCF.

#### 2. FOLLOW-UP TO THE EAST ASIA VISION GROUP (EAVG) II REPORT

Untuk mewujudkan kerja sama konkret antar negara-negara APT dibentuk *East Asian Vision Group* (EAVG) dengan anggota para intelektual APT. Pada tahun 2001 EAVG menyampaikan laporan yang berisi sejumlah rekomendasi, yaitu: pembentukan *East Asia FTA*, *East Asia Investment Information Network*, fasilitas pendanaan regional, koordinasi mata uang dan EAS. Rekomendasi EAVG ini dikaji lebih lanjut oleh *East Asia Study Group* (EASG) yang beranggotakan pejabat senior Kemlu negara-

negara APT. *EAVG II Report: Realising an East Asia economic community by 2020* disampaikan pada KTT ke-15 APT tanggal 19 November 2012. APT SOM bulan Oktober 2015 memutuskan hanya menindaklanjuti 21 dari 25 *selected recommendations* dari *EAVG II Report*.

Indonesia bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi ke-7 (*Enhance cooperation in addressing non-traditional security issues, particularly counter-terrorism, cybercrime, drug and human trafficking, and maritime security*), rekomendasi ke-19 (*Encourage and facilitate the leading universities in the region to establish a network of East Asian universities based on the ASEAN University Network platform*) dan rekomendasi ke-24 (*Increase the support of East Asian nations for East Asian Studies at major universities*).

#### 3. CHIANG MAI INITIATIVE MULTILATERALIZATION (CMIM)

CMIM dibentuk pada 24 Maret 2010 dengan dana awal sebesar USD 120 milyar. Tujuan utama CMIM adalah menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek melalui *self-managed reserve pooling arrangement* (*pooling fund*) dan menyediakan bantuan keuangan (USD) melalui transaksi *swap* mata uang kepada anggota CMIM yang mengalami masalah keuangan. Kontribusi Indonesia di CMIM adalah sebesar USD 9,104 milyar sehingga transaksi *swap* maksimum yang dapat diajukan Indonesia adalah USD 22,76 milyar.





## 8. KERJA SAMA BIDANG PARIWISATA

Kerja sama pariwisata di kawasan ASEAN, RRT, Jepang dan Korea memiliki nilai yang sangat besar dan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja serta pembukaan lahan investasi. *APT Tourism Cooperation Work Plan 2007-2017* disusun untuk meningkatkan saling kunjung wisatawan dari dan ke kawasan APT. Untuk memperkuat kerja sama ini, *Memorandum of Cooperation (MOC) APT on Tourism* ditandatangani pada *ASEAN Tourism Forum (ATF)* di Manila pada bulan Januari 2016. Untuk menindaklanjuti MOC dimaksud, Kementerian Pariwisata cq Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata pada tanggal 24 November 2016 telah menyelenggarakan Rapat Inter-Kementerian.

## 9. KETAHANAN PANGAN

Dalam konteks APT, kerja sama pertanian diawali Pertemuan *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry and Plus Three Countries (AMAF+3)* di Medan pada bulan Oktober 2001. Sejak tahun 2003, APT melaksanakan *AFSIS Project* untuk menyediakan basis data produksi dan konsumsi

bahan pangan utama di Asia Tenggara. Saat ini proyek AFSIS sedang ditransformasikan menjadi badan permanen di ASEAN.

Pada bulan Juni 2012 juga dimulai pelaksanaan komitmen APTERR untuk menjaga cadangan beras dalam keadaan darurat, seperti bencana alam. Sekretariat APTERR berkedudukan di Bangkok. Pertemuan *APTERR Council* ke-5 di Siem Reap tanggal 5-6 Mei 2016 menyepakati *work plan* Sekretariat APTERR tahun 2016-2018. APTERR dan AFSIS tidak dapat digabungkan karena merupakan entitas dan mekanisme berbeda.

## 10. KESEHATAN GLOBAL DAN PENYAKIT MENULAR (EBOLA DAN MERS)

*EAS Joint Statement on Regional Responses to the Outbreak of Ebola/Spread of Ebola* (prakarsa RI) disahkan pada KTT ke-9 EAS di Myanmar bulan November 2014. EAS Joint Statement tersebut ditindaklanjuti dengan *APT Health Ministers's Special Meeting on Ebola*



*Preparedness and Response* di Bangkok tanggal 14-15 Desember 2014. Atas prakarsa Indonesia, telah diselenggarakan *APT Health Minister's Special VDO Conference on the Threat of MERS-CoV in the Region* tanggal 27 Juli 2015 untuk membahas langkah meningkatkan kesiapan dan respon menghadapi MERS.

## 11. ANNUAL MEETING OF DEANS/DIRECTORS OF DIPLOMATIC TRAINING INSTITUTIONS OF APT

*Annual Meeting of Deans/Directors of Diplomatic Training Institutions of APT* merupakan forum diskusi dan pertukaran *best practices* antar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Akademi Diplomasi APT. Pertemuan ke-10 diselenggarakan di Bali pada tanggal 8-10 April 2015, dengan topik: “*East Asian Community Building and Education*,” “*New Education Skills Technologies*,” “*Lifelong Education and Training for Diplomats*,” “*International Cooperation Among Diplomatic Training Institutions*”. Pertemuan ke-11

diselenggarakan di Seoul tanggal 27-29 April 2016 dan Pertemuan ke-12 diselenggarakan tanggal 20-21 April 2017 di Manila.

## 12. TRILATERAL COOPERATION (RRT, JEPANG, KOREA)

*Trilateral Cooperation* diusulkan oleh Korea pada tahun 2004 sebagai forum di luar skema *APT. Trilateral Cooperation Secretariat (TCS)* didirikan di Seoul pada bulan September 2011 dengan peran mendorong keterbukaan dan peningkatan saling pengertian bidang politik, penanggulangan bencana, pertanian, perdagangan dan transportasi. KTT Trilateral mulai diselenggarakan tahun 2008 namun terhenti sejak tahun 2012 dan baru diselenggarakan kembali pada tahun 2015. KTT ke-6 Trilateral di Seoul tanggal 1 November 2015 menyepakati *Joint Declaration for Peace and Cooperation in the Northeast Asia* dan penyelenggaraan KTT Trilateral setiap tahun. Kerja sama Trilateral dipandang penting agar



Kerja sama pariwisata di kawasan ASEAN, RRT, Jepang dan Korea memiliki nilai yang sangat besar dan berkontribusi bagi peningkatan pendapatan per kapita, penyerapan tenaga kerja serta pembukaan lahan investasi.



negara-negara *Plus Three* dapat mendukung upaya mewujudkan perdamaian, stabilitas, keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

## B. EAST ASIA SUMMIT (EAS)

EAS merupakan forum regionalisme terbuka Asia Timur yang dibentuk pada KTT ASEAN ke-11 tanggal 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur. Dasar kerja sama EAS adalah *Kuala Lumpur Declaration on East Asia Summit*. Saat ini terdapat 18 negara peserta EAS, yaitu 10 negara ASEAN dan 8 negara Mitra Wicara (Australia, RRT, India, Jepang, Korea, Selandia Baru, AS dan Rusia). EAS bersifat terbuka, inklusif, transparan dan *outward-looking* dengan format *retreat* berupa diskusi strategis berbagai tema aktual di kawasan.

EAS merupakan forum *leaders-led summit* dengan ASEAN sebagai *driving force*. Tujuan dan prinsip EAS termuat di *Kuala Lumpur Declaration on East Asia Summit* yaitu:

- a. *The EAS is a forum for dialogue on broad strategic, political and economic issues of common interest and concern with the aim of promoting peace, stability and economic prosperity in East Asia.*
- b. *The EAS's efforts to promote community building in the region will be consistent with and reinforce the realization of the ASEAN Community.*
- c. *The EAS will be an open, inclusive, transparent and outward-looking forum.*

Pada awalnya, EAS menetapkan lima area kerja sama prioritas, yaitu finansial, energi dan lingkungan hidup, pendidikan, isu kesehatan global dan penyakit pandemik, serta penanggulangan bencana. Pada KTT ke-6 EAS disepakati area prioritas baru, yaitu konektivitas. Di samping enam bidang kerja sama prioritas tersebut, EAS juga menjalin kerja sama di bidang lingkungan hidup dan perdagangan.

KTT ke-5 EAS yang diselenggarakan di Hanoi bulan Oktober 2010 telah menempatkan kerja sama EAS ke tingkat yang lebih tinggi dengan diadopsinya *Hanoi Declaration on the Commemoration of the Fifth Anniversary of the East Asia Summit*. KTT ke-6 EAS di Bali tanggal 19 November 2011 telah berhasil meningkatkan profil ASEAN dan EAS di mata dunia dengan bergabungnya AS dan Rusia di EAS. KTT EAS selanjutnya membahas isu-isu strategis regional dan internasional yang berkontribusi pada upaya menjaga keamanan dan stabilitas serta pemajuan ekonomi di kawasan Asia Timur.

Sebagai implementasi *Phnom Penh Declaration on East Asia Summit Development Initiative* yang disahkan pada KTT ke-7 EAS di Phnom Penh tanggal 20 November 2012, Pertemuan 4<sup>th</sup> EAS Foreign Ministers' Meeting (FMM) di Nay Pyi Taw tanggal 10 Agustus 2014 telah mengesahkan *Plan of Action for Implementing the Phnom Penh Declaration on EAS Development Initiative 2014-2015*. Dalam PoA tersebut, disepakati 8 area kerja sama dalam 6 prioritas kerja sama EAS,



*The 11th East Asia Summit, 8 September 2016, Vientiane, Laos | [www.asean.org](http://www.asean.org)*

yaitu di bidang lingkungan hidup dan energi; pendidikan; keuangan; isu-isu kesehatan global dan penyakit pandemik; penanganan bencana alam; konektivitas ASEAN; serta 2 kerja sama lainnya, yakni perdagangan serta ekonomi dan ketahanan pangan. Pada tahun 2015, secara ad referendum, para Menlu negara peserta EAS telah menyetujui perpanjangan implementasi PoA ini hingga 2017.

Pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur bulan November 2015, yang memperingati 10 tahun EAS, para Pemimpin memperkuat komitmen mempertahankan EAS sebagai *leaders-led forum* dan menekankan pentingnya dibentuk mekanisme implementasi keputusan. Komitmen ini dituangkan dalam *Kuala Lumpur Declaration on the Tenth Anniversary of the*

EAS. KTT ini juga mensahkan *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*, yang merupakan inisiatif Indonesia dengan *co-sponsors*: RRT, Selandia Baru, Australia dan AS. Tujuannya adalah pengembangan kerja sama bidang maritim yang lebih komprehensif di kawasan guna memelihara kawasan laut yang stabil, aman, damai dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat di kawasan. Pada tahun 2016 dibentuk *EAS Unit* di bawah Sekretariat ASEAN dan mulai diselenggarakan pertemuan berkala antara Komite Wakil Tetap ASEAN dengan Duta Besar EAS non-ASEAN di Sekretariat ASEAN.



Agenda Indonesia di EAS adalah stabilitas dan “Agenda Indonesia di EAS adalah stabilitas dan keamanan kawasan sebagai modal dasar kerja sama dan pembangunan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, meningkatkan kerja sama maritim sebagai implementasi *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, Regional Security Architecture*, pembangunan infrastruktur, pemberantasan terorisme dan ekstremisme serta penanggulangan bencana.

Berikut perkembangan berbagai kerja sama dalam kerangka EAS:

## 1. KERJA SAMA DI BIDANG KEUANGAN

Dalam rangka penguatan kerja sama keuangan, Menteri Keuangan negara peserta EAS telah menghadiri Pertemuan *2<sup>nd</sup> Informal EAS Finance Ministers’ Meeting* pada tanggal 13 Oktober 2012 di Tokyo, di sela-sela pertemuan tahunan IMF/World Bank. Selanjutnya *3<sup>rd</sup> Informal EAS Finance Ministers’ Meeting* dilaksanakan di AS pada bulan Oktober 2013 dan *4<sup>th</sup> Informal EAS Finance Ministers’ Meeting* di Kuala Lumpur tanggal 2-3 Desember 2015.

## 2. KERJA SAMA DI BIDANG ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk bidang **Energi**, KTT ke-2 EAS di Cebu tanggal 15 Januari 2007 menyepakati *Cebu Declaration on East Asia Energy Security*. Selanjutnya, pada *9<sup>th</sup> EAS Energy Ministers (EMM) Meeting* di Malaysia tanggal 8 Oktober 2015 digaribawahi pentingnya visi yang sama terkait *supply and demand* energi di kawasan EAS.

Di bidang **Lingkungan Hidup**, KTT ke-3 EAS mengeluarkan *Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment*, yang menekankan peran semua negara menghadapi perubahan iklim berdasarkan prinsip bersama sesuai tanggung jawab dan kapabilitasnya, serta komitmen stabilisasi *atmospheric greenhouse gas concentrations*.

Selanjutnya, pada *4<sup>th</sup> EAS Environment Ministers’ Meeting* di Laos tanggal 31 Oktober 2014 dibahas peningkatan kerja sama EAS di bidang lingkungan. Dua *Workshop* terkait mengenai adaptasi *Climate Change*

diselenggarakan oleh Australia di New Delhi tanggal 6 November 2014 dan Manila tanggal 26-28 Februari 2014. Kemudian, *5<sup>th</sup> EAS Environment Ministers’ Meeting* rencananya diselenggarakan bersamaan dengan *the 14th ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)* tahun 2017.

## 3. KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN

Pada *3<sup>rd</sup> EAS Education Ministers’ Meeting* di Selangor tanggal 26 Mei 2016 dibahas kelanjutan implementasi *EAS Education Plan of Action 2011-2015*. Terlepas dari akhir masa berlaku PoA pada tahun 2015, berbagai program kegiatan tetap dilaksanakan masing-masing negara. Selanjutnya, *EAS Cooperation on Education* diharapkan dapat selaras dan saling melengkapi dengan *ASEAN Work Plan on Education 2016-2020*.

## 4. KERJA SAMA DI BIDANG KESEHATAN GLOBAL

Pada KTT EAS ke-7 di Phnom Penh tanggal 20 November 2012 disahkan *Declaration of the 7<sup>th</sup> East Asia Summit on Regional Responses to Malaria Control and Addressing Resistance to Antimalarial Medicines*. Pada *EAS Foreign Ministers’ Meeting* tanggal 10 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Indonesia menyerukan langkah EAS mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus ebola di Asia Pasifik. Prakarsa Indonesia, yakni *Joint Statement of the 9<sup>th</sup> EAS on Regional Response to the Outbreak of Ebola Virus Disease*, didukung negara peserta EAS dan disahkan pada KTT ke-9 EAS di Nay Pyi Taw tanggal 12 November 2014. KTT ke-10 EAS bulan November 2015 selanjutnya mengesahkan *EAS Statement on Enhancing Regional Health*

*Security relating to Infectious Diseases with Epidemic and Pandemic Potential*, yang merupakan prakarsa Korea dengan *co-sponsor* AS dan Indonesia.

## 5. KERJA SAMA DI BIDANG PENANGANAN BENCANA ALAM

Kerja sama di bidang penanganan bencana alam dan bantuan kemanusiaan merupakan salah satu fokus kerja sama EAS yang dimuat dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang EAS tanggal 14 Desember 2005. KTT ke-6 EAS tahun 2011 telah mengesahkan *Indonesian-Australian Paper: A Practical Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response*. *Paper* tersebut berisi usulan langkah-langkah konkret kerja sama berkaitan dengan *information sharing, overcoming bottleneck, capacity building, promoting collaboration and partnership in disaster response* serta penguatan mekanisme kerja sama penanganan bencana yang telah ada seperti *AHA Centre*.

*Information sharing* hingga saat ini diimplementasikan melalui mekanisme *ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)*. Dalam Pertemuan ke-21 *ACDM and Related Workshops* di Chiang-Mai tanggal 7-11 Januari 2013 telah diselenggarakan *ACDM Session on EAS Cooperation in Disaster Management (Closed Session with EAS Participating Countries)*, yang juga mengundang negara-negara peserta EAS non ASEAN. Pertemuan mencatat presentasi Australia mengenai ‘*Indonesia-Australia EAS Disaster Management Initiatives*’ dan mendorong ACDM untuk bekerja sama mengimplementasikan *EAS Joint Paper*. Pertemuan sepakat untuk bekerja sama dengan ACDM dan menjadikan *AADMER Work*





KTT EAS ke-9 tahun 2014 selanjutnya mengesahkan *Statement on EAS Guidelines for Rapid Disaster Response* untuk memperkuat kerja sama di bidang penanganan bencana dengan suatu *guidelines* yang mengatur penanganan bencana di suatu negara maupun pemberian bantuan dari negara peserta EAS sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara peserta EAS dan juga perjanjian regional di kawasan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berkoordinasi dengan Kemlu dan bekerja sama dengan *Emergency Management Australia* (EMA), telah menguji *EAS Rapid Disaster Response Toolkit* (EAS Toolkit) melalui penyelenggaraan *International Table Top Exercise* di Ambon tanggal 15-17 November 2016.

## 6. KERJA SAMA KONEKTIVITAS ASEAN

KTT EAS ke-6 mengesahkan *Declaration of the 6<sup>th</sup> East Asia Summit on ASEAN Connectivity* yang mendukung dan memfasilitasi pengembangan inisiatif konektivitas, pembangunan agenda kemitraan pemerintah-swasta di kawasan serta memajukan keterlibatan dan kerja sama konektivitas antar masyarakat. Pada *2<sup>nd</sup> EAS FMM* tahun 2014 diharapkan ACCC dapat mengembangkan kerja sama dengan negara peserta EAS non-ASEAN sebagaimana disepakati dalam *Declaration of the 6<sup>th</sup> East Asia Summit on ASEAN*

*Connectivity* yang memperkuat MPAC di tingkat regional. Pertemuan ACCC dengan negara peserta EAS non-ASEAN diselenggarakan di Bali pada bulan November 2013 dan *6<sup>th</sup> ASEAN Connectivity Symposium* bertema *the Connectivity Agenda for an Integrated ASEAN Community* diselenggarakan di Penang tanggal 16 Oktober 2015.

## 7. KERJA SAMA PERDAGANGAN DAN EKONOMI

EAS mendukung proses integrasi ekonomi kawasan dan memperkuat investasi serta perdagangan antar negara peserta EAS, termasuk negosiasi RCEP. Pada KTT ke-11 EAS, telah disahkan *Vientiane Declaration on Promoting Infrastructure Development Cooperation in East Asia* yang mendorong upaya peningkatan konektivitas kawasan melalui pembangunan infrastruktur.

## 8. KERJA SAMA KETAHANAN PANGAN

*Report of EAS Track II Study Group on Enhancing Food Security through Sustainable Fisheries Management and Marine Environmental Conservation* telah disampaikan pada KTT ke-9 EAS bulan November 2014 di Nay Pyi Taw.

## 9. KERJA SAMA POLITIK DAN KEAMANAN

Sejak tahun 2014, negara peserta EAS banyak



mengeluarkan pernyataan bersama di bidang politik dan keamanan, antara lain:

- *EAS Statement on the Rise of Violence and Brutality Committed by Terrorist/Extremist Organisations in Iraq and Syria* » KTT ke-9 EAS di Nay Pyi Taw tahun 2014.
- *EAS Statement on Countering Violent Extremism* » KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur tahun 2015.
- *EAS Statement on Issues Related to Security of and in the Use of Information and Communications Technologies* » KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur tahun 2015.
- *EAS Declaration on the Global Movement*

*of Moderates* » KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur tahun 2015.

- *EAS Declaration on Strengthening Responses to Migrants in Crisis and Trafficking in Persons* » KTT ke-11 EAS di Vientiane tahun 2016.
- *EAS Statement on Non-Proliferation* » KTT ke-11 EAS di Vientiane tahun 2016.

Kemlu RI dan Kemlu Korea bekerja sama dengan Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Airlangga serta *Graduate School of International and Area Studies of Hankuk University of Foreign Studies (GSIAS HUFS)*

menyelenggarakan *East Asia Summit (EAS) Regional Seminar for Capacity Building to Prevent and Counter Violent Extremism (PCVE)* di Surabaya tanggal 5-6 Desember 2016. Untuk KTT EAS tahun 2017, dibahas kemungkinan mengeluarkan *EAS Leaders' Declaration on Counter-Terrorism Financing and Anti Money Laundering*, yang disponsori bersama oleh Myanmar dan Australia.

## 10. BIDANG KERJA SAMA MARITIM

Sebagai salah satu upaya implementasi *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime*

*Cooperation*, Australia menyelenggarakan *EAS Seminar on Maritime Security Cooperation "Enhancing Information Sharing Among Commercial Vessels"* di Sydney tanggal 22-25 November 2016. Indonesia merupakan *co-Chair* dalam Seminar dimaksud.

## 11. BIDANG KERJA SAMA LAINNYA

Pada KTT ke-9 EAS tahun 2014 di Myanmar, para pemimpin EAS telah mengesahkan *EAS Declaration on Combating Wildlife Trafficking* yang merupakan upaya bersama EAS dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar.





---

## 6. *Trust Fund* dan *Project Fund*

“

Hingga akhir Februari 2017, tercatat ada 24 jenis *Trust Fund* dengan total dana sebesar USD 224,89 juta dan 46 jenis *Project Fund* dengan total dana sebesar USD 22,4 juta sehingga total keduanya berjumlah USD 247,29 juta.

Dalam rangka pembangunan ASEAN dan implementasi proyek-proyek kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Mitra Wicara Sektorial sesuai PoA, telah dibentuk *Trust Fund* dan *Project Fund* yang berasal dari negara anggota ASEAN, negara-negara Mitra Wicara dan pihak eksternal lainnya. Hingga akhir Februari 2017, tercatat ada 24 jenis *Trust Fund* dengan total dana sebesar USD 224,89 juta dan 46 jenis *Project Fund* dengan total dana sebesar USD 22,4 juta sehingga total keduanya berjumlah USD 247,29 juta. Kedua dana ini dikelola langsung oleh Sekretariat ASEAN dan penggunaannya harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

- Harus memperkuat ketahanan nasional negara anggota ASEAN dan mitranya.
- Tidak boleh mengandung ikatan politik.
- Tidak merugikan kepentingan nasional negara anggota ASEAN.
- Dilaksanakan di wilayah negara anggota ASEAN.
- Diajukan melalui Sekretariat ASEAN.
- Harus merujuk pada PoA dengan masing-masing mitra dan/atau pada aturan prosedur masing-masing jenis pendanaan.





|             | KODE DAN NAMA <i>TRUST FUND</i>    | JUMLAH<br>(USD) |             | KODE DAN NAMA <i>TRUST FUND</i>                                                                                     | JUMLAH<br>(USD) |
|-------------|------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>T.1</b>  | Japan Scholarship Fund             | 691.950         | <b>T.13</b> | Japan-ASEAN Integration Fund                                                                                        | 38,587.268      |
| <b>T.2</b>  | ASEAN Energy Endowment Fundetnam   | 3.820.197       | <b>T.14</b> | ASEAN-ICT Fund                                                                                                      | 2.575.719       |
| <b>T.3</b>  | JAFTA Fund                         | 2.748.668       | <b>T.15</b> | ASEAN Japan Comprehensive<br>Economic Partnership Fund                                                              | 19,627.749      |
| <b>T.4</b>  | ASEAN Science & Technology Fund    | 11,581.350      | <b>T.16</b> | ASEAN-Russian Federation Dialogue<br>Partnership Fin. Fund.                                                         | 7,069.635       |
| <b>T.5</b>  | ASEAN-ROK Special Cooperation Fund | 4,428.954       | <b>T.17</b> | ASEAN Plus Three Cooperation Fund                                                                                   | 3,131.009       |
| <b>T.6</b>  | ASEAN-ROK Future Oriented Fund     | 3,594.984       | <b>T.18</b> | AADCP Phase II                                                                                                      | 9,058,258       |
| <b>T.7</b>  | ASEAN-India Fund                   | 5,890.926       | <b>T.19</b> | ASEAN-Dispute Settlement Mechanism (DSM)                                                                            | 355.963         |
| <b>T.8</b>  | ASEAN-China Cooperation Fund       | 6,216.819       | <b>T.20</b> | Japan-ASEAN Integration Fund 2.0                                                                                    | 82,109,851      |
| <b>T.9</b>  | ASEAN Development Fund             | 4,458.143       | <b>T.21</b> | ASEAN-ROK Cooperation Fund                                                                                          | 13,827,899      |
| <b>T.10</b> | ASEAN Cultural Fundura             | 936,821         | <b>T.22</b> | JENESYS 2016Theme Economic                                                                                          | 1,038,368       |
| <b>T.11</b> | ASEAN Pakistan Cooperation Fund    | 850,356         | <b>T.23</b> | Emergency Humanitarian and Relief Efforts<br>in the Event of the Irregular Movement of<br>Persons in Southeast Asia | 350,685         |
| <b>T.12</b> | ASEAN+3 Finance Cooperation Fund   | 367,993         | <b>T.24</b> | JENESYS 2016                                                                                                        | 1,569,299       |



|             | KODE DAN NAMA <i>PROJECT FUND</i>                            | JUMLAH<br>(USD) |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P.1</b>  | ASEAN Institute of Technology-UNEP Fund                      | 53.150          |
| <b>P.2</b>  | ASEAN National Tourism Organization<br>(NTOs) Fund           | 225.120         |
| <b>P.3</b>  | ASEAN Food Security Information System<br>(AFSIS) Fund       | 432.352         |
| <b>P.4</b>  | ACCORD                                                       | 115.037         |
| <b>P.5</b>  | US Patent and Trademark                                      | 69.097          |
| <b>P.6</b>  | ASEAN-Plus Three EID Program                                 | 182.770         |
| <b>P.7</b>  | ASEM Virtual Secretariat                                     | 3.336           |
| <b>P.8</b>  | Prevention & Control of Avian Influenza<br>in Asia & Pacific | 53.040          |
| <b>P.9</b>  | ASEAN Investor Seminar (AIS)                                 | 56.776          |
| <b>P.10</b> | Publication Project<br>on Multifunctionality of Agriculture  | 104.218         |
| <b>P.11</b> | ASEAN-Animal Health Trust Fund                               | 1.648.477       |
| <b>P.12</b> | ASEAN+3 Regional Experts Fund                                | 119.556         |
| <b>P.13</b> | HSF Environmental Education Action Plan Fund                 | 3               |

|             | KODE DAN NAMA <i>PROJECT FUND</i>                     | JUMLAH<br>(USD) |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P.14</b> | ASEAN Transboundary Haze<br>Pollution Control Fund    | 224.506         |
| <b>P.15</b> | ASEAN Regional Forum Fund                             | 162.868         |
| <b>P.16</b> | ASEAN ISO Project Fund                                | 3.270           |
| <b>P.17</b> | ASEAN-Norwegian Humanitarian Account                  | 16.474          |
| <b>P.18</b> | ASEAN-ROK Economic Cooperation Fund                   | 514.149         |
| <b>P.19</b> | ASEAN Secretariat-UN/ISDR World Bank Fund             | 120             |
| <b>P.20</b> | ASEAN-UNAIDS Fund                                     | 1.631           |
| <b>P.21</b> | ASEAN-Japan ICT Cooperation Fund                      | 394.112         |
| <b>P.22</b> | ASEAN Intergovernmental Commission<br>on Human Rights | 628.534         |
| <b>P.23</b> | AANZFTA ECWP Projects                                 | 4.103.890       |



| ASEAN PROJECT FUNDS |                                                                 |              | ASEAN PROJECT FUNDS |                                                                                                       |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | KODE DAN NAMA PROJECT FUND                                      | JUMLAH (USD) |                     | KODE DAN NAMA PROJECT FUND                                                                            | JUMLAH (USD) |
| P.24                | ASEAN Australia Cooperation for Disaster Management Fund        | 5.341        | P.37                | TPF Intermediary Account                                                                              | 14.993       |
| P.25                | ASEAN-AMFSO Fund                                                | 507.427      | P.38                | ASEAN Strengthening Agricultural Capacity Building Phase 2                                            | 687.877      |
| P.26                | ASEAN-India Green Fund                                          | 4.400.003    | P.39                | ASEAN-MAFF Project for Human Resource Development in Food-Related Areas                               | 1.160.056    |
| P.27                | ASEAN Japan Fund for Building Social Safety Nets                | 119.567      | P.40                | Strengthening Laboratory Capacity of EDPLN                                                            | 809.166      |
| P.28                | ASEAN Disaster Management and Emergency Relief                  | 17.218       | P.41                | Bio Diaspora: Strengthening ASEAN Preparedness and Response to Biological Threats                     | 37.216       |
| P.29                | ASEAN Mineral Trust Fund                                        | 766.836      | P.42                | Regional Secretariat for ASEAN Tourism Professional                                                   | 261.017      |
| P.30                | 10 Officials Myanmar in 20th ASEAN Summit                       | 2.221        | P.43                | ASEAN ACCP Website                                                                                    | 2.260        |
| P.31                | World Society for the Protection of Animals (WSPA)              | 9.735        | P.44                | JENESYS 2015 Overhead Allocation                                                                      | 288.908      |
| P.32                | ASEAN-WTO Pesticide Residue Data Generation Project             | 1.307        | P.45                | Development of ASEAN Documentation System, Knowledge and Documentation Management, Video Conferencing | 3.078.752    |
| P.33                | ASEAN Disaster Assistance Fund                                  | 3.249        | P.46                | ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children Fund             | 320.897      |
| P.34                | ASEAN-Regional Integration Support from the EU (ARISE)          | 691.625      |                     |                                                                                                       |              |
| P.35                | Regional Level Assessment of the Mid-Term Review ASCC Blueprint | 6.458        |                     |                                                                                                       |              |
| P.36                | ASEAN Youth Program Fund                                        | 97.149       |                     |                                                                                                       |              |



Sekretariat ASEAN menerapkan aturan jangka waktu minimal 4,5 bulan sebelum tanggal rencana pelaksanaan proyek, bagi pengusul proyek untuk mengajukan proposal ke Sekretariat ASEAN. Hal ini mengingat diperlukannya waktu untuk proses revisi proposal proyek dan pembahasan dengan pihak

pemilik dana. Apabila pihak pemilik dana telah memberikan persetujuan terhadap proposal proyek, maka pemilik dana akan menerbitkan surat instruksi pelaksanaan proyek dan otorisasi pengeluaran dana.

| Sumber Dana  | Jenis Dana | Jumlah Dana | Persentase | Sumber Dana     | Jenis Dana | Jumlah Dana | Persentase |
|--------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| ADB          | 1          | 53.040      | 0,021%     | Jepang          | 15         | 150.497.064 | 60,858%    |
| Negara ASEAN | 26         | 34.769.294  | 14,060%    | Korea           | 4          | 22.365.985  | 9,044%     |
| Australia    | 7          | 13.379.433  | 5,410%     | Norwegia        | 1          | 16.474      | 0,007%     |
| Kanada       | 2          | 846.382     | 0,342%     | Pakistan        | 1          | 850.356     | 0,344%     |
| China        | 2          | 6.331.855   | 2,560%     | Rusia           | 1          | 7.069.635   | 2,859%     |
| UE           | 1          | 691.625     | 0,280%     | PBB             | 3          | 54.902      | 0,022%     |
| HSF          | 1          | 3           | 0,000%     | Amerika Serikat | 1          | 69.097      | 0,028%     |
| India        | 2          | 10.290.929  | 4,161%     | Bank Dunia      | 1          | 1.307       | 0,001%     |
|              |            |             |            | Lainnya         | 1          | 3.249       | 0,001%     |

## Alur Pengajuan usulan proyek menggunakan dana ini adalah sebagai berikut:

### Keterangan

SPCD : *Strategic Planning and Coordination Division*

ASEC : *ASEAN Secretariat*

CPR : *Committee of Permanent Representatives*

DP : *Dialogue Partners*





Indonesia, melalui Kemlu, terus mendorong K/L terkait serta berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk Pusat Studi ASEAN, untuk berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan kedua dana ini bagi kepentingan Indonesia dan pembangunan masyarakat ASEAN di Indonesia, melalui berbagai seminar dan lokakarya. Pengajuan proposal proyek dan persetujuan dari pihak pemilik dana diakui masih perlu disederhanakan lagi dan karenanya Sekretariat ASEAN terus didorong untuk melakukan peran sebagai koordinator dan kontak bagi pihak-pihak pengusul dan pelaksana proyek.



Lokasi: Lalu lintas di Jalan Thamrin, Jakarta, Indonesia



## IDENTITAS ASEAN

### Bahasa

Bahasa ASEAN adalah Bahasa Inggris

### Motto ASEAN

Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas  
(*One Vision, One Identity, One Community*)

### Hari Peringatan

Hari ASEAN diperingati pada tanggal **8 Agustus** setiap tahun

### Lagu ASEAN (ASEAN Anthem)

Lagu ASEAN dipilih melalui sebuah kompetisi terbuka (Kompetisi ASEAN Anthem) yang dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan November 2008. Pada putaran final penjurian Kompetisi ASEAN Anthem tingkat ASEAN di Bangkok, Thailand, 20 November 2008, lagu berjudul "The ASEAN Way" karya Kittikhun Sodprasert, Sampao Triudom dan Payom Valaiphatchra dari Thailand ditetapkan sebagai Lagu resmi ASEAN.

Lagu ASEAN dapat digunakan pada pertemuan resmi dan aktivitas terkait ASEAN, termasuk dengan Mitra Wicara, yang dimaksudkan untuk mempromosikan kepentingan ASEAN.

Negara anggota ASEAN diharapkan dapat menerjemahkan Lagu ASEAN ini dalam bahasa lokal guna mempromosikan lagu tersebut dan meningkatkan kesadaran ASEAN di negara masing-masing.

### Bendera ASEAN



Bendera lambang ASEAN; Bendera dan lambang ASEAN menggambarkan ASEAN yang stabil, damai, bersatu dan dinamis. Warna-warna yang tertuang dalam lambang biru, merah, putih dan Kuning merupakan warna-warna utama lambang-lambang negara-negara Anggota ASEAN.

**Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas,**

**Merah menggambarkan keberanian dan dinamisme**

**Putih melambangkan kesucian, dan**

**kuning melambangkan kemakmuran.**

Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh-tokoh pendiri ASEAN agar ASEAN yang beranggotakan seluruh negara yang berada di ASIA Tenggara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.

Bendera dan lambang ASEAN harus digunakan untuk mempromosikan ASEAN dan tidak dapat digunakan untuk tujuan politik yang merusak martabat ASEAN, dan tujuan politik yang merusak martabat ASEAN, dan tujuan komersial, kecuali telah mendapat persetujuan resmi sesuai dengan prosedur.

Negara anggota ASEAN dapat menggunakan bendera dan lambang ASEAN pada acara resmi yang berhubungan dengan ASEAN. Lambang ASEAN diletakkan di sebelah kanan simbol nasional negara anggota ASEAN



## LAMPIRAN 2

# ASEAN ANTHEM

Choir

## ASEAN Anthem The ASEAN WAY

Lyricist : Payom Valaiphachra

Music: Kittikhun Sodprasert  
& Sampow Triudom  
Arr.: Kittikhun Sodprasert

Allegretto Maestoso  $\text{♩} = 100$

5 **A**

Raise our flag high, sky high Embrace the pride in our

9

heart A-SEAN we are bend-ed as one Lock-in out to the world. For

14 **B**

peace, our goal from the ve-ry start And pros-pe-ri-ty to last. We

18 **C**

dare to dream we care to share. To-ge-ther for A-SEAN we

22

dare to dream we care to share for it's the way of A-SEAN

Copyright © ASEAN 2551



---

## LAMPIRAN 3

# PROFIL RINGKAS NEGARA ANGGOTA ASEAN

Lokasi: Bangkok, Thailand





# BRUNEI DARUSSALAM



**Nama Resmi**  
Brunei Darussalam

**Nama Lokal**  
Negara Brunei Darussalam

**Ibukota**  
Bandar Seri Begawan

**Tanggal Kemerdekaan**

**01/01/1984**

**Bentuk Pemerintahan**  
Monarki Konstitusional

**Kepala Negara**  
Sultan

**Kepala Pemerintahan**  
Sultan

**Mata Uang**  
Brunei Dollar



## KONDISI GEOGRAFIS

**Luas Wilayah**

**5.765** Km<sup>2</sup>

**Perbatasan**

Laut Cina Selatan dan Malaysia

## DEMOGRAFI

**Jumlah Penduduk**

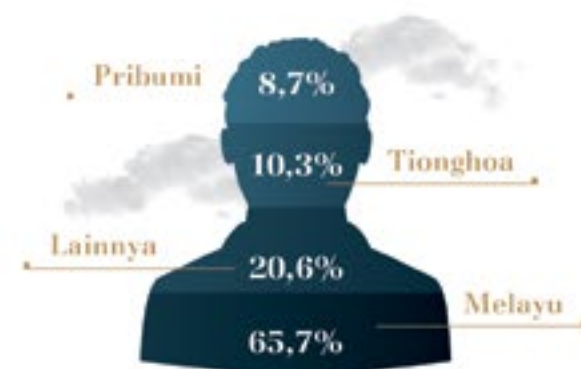
**443.620** jiwa (Juli 2017)

**Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

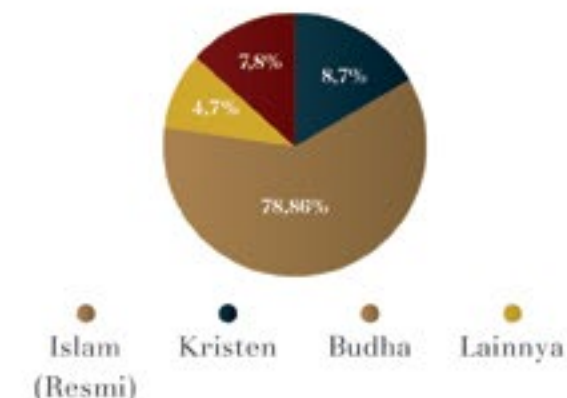
**1.65%** (estimasi 2014)

## DEMOGRAFI

**Kelompok Etnis**



**Agama**



**Bahasa**

Melayu (Resmi), Inggris, Mandarin

## EKONOMI

**Pendapatan Domestik Bruto**

**\$33.73** billion  
(estimasi 2016)

**PDB per Kapita (PPP)**

**\$79,700**  
(estimasi 2016)

**Total Perdagangan - Indonesia**

**US\$176.394** ribu  
(estimasi 2016)

**Pertumbuhan PDB**

**1,4%**  
(estimasi 2016)

**Komoditas Ekspor Utama**



**Komoditas Impor Utama**

Mesin-mesin, alat transportasi, barang jadi dan makanan



# KAMBOJA

**Nama Resmi**  
*Kingdom of Cambodia*

**Nama Lokal**  
Preahreacheanachakr

**Ibukota**  
Pnom Penh

**Tanggal Kemerdekaan**

**09/11/1953**

**Bentuk Pemerintahan**  
Monarki Konstitusional

**Kepala Negara**  
Raja

**Kepala Pemerintahan**  
Perdana Menteri

**Mata Uang**  
Riel

## KONDISI GEOGRAFIS

**Luas Wilayah**

**181.035** Km<sup>2</sup>

**Perbatasan**  
Teluk Thailand,  
Thailand, Laos  
dan Vietnam

## DEMOGRAFI

**Jumlah Penduduk**

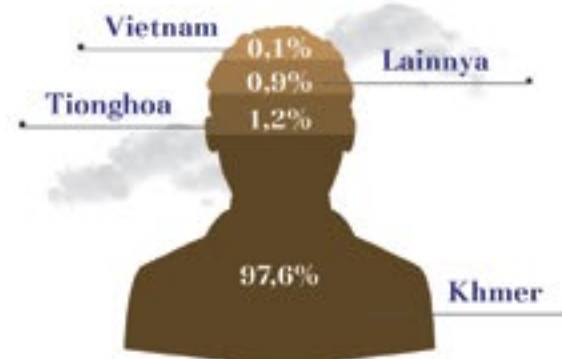
**15.957.223** jiwa  
(Estimasi Juli 2016)

**Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

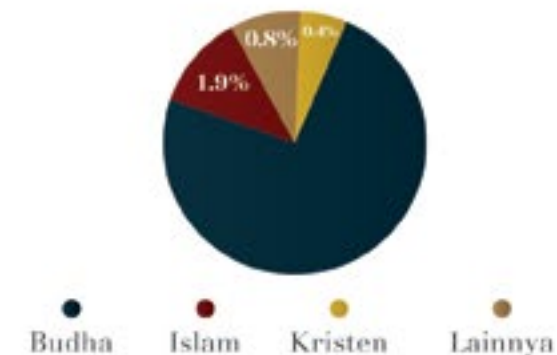
**1.56%** (Estimasi 2016)

## DEMOGRAFI

**Kelompok Etnis**



**Agama**



**Bahasa**

Khmer (Resmi), Perancis  
dan Inggris

## EKONOMI

**Pendapatan Domestik Bruto**

**\$58.94** billion  
(estimasi 2016)

**PDB per Kapita  
(PPP)**

**\$3.700**  
(estimasi 2013)

**Total Perdagangan  
- Indonesia**

**US\$ 450.738,4**  
ribu (2016)

**Pertumbuhan PDB**

**1,4%**  
(estimasi 2016)

**Komoditas Ekspor Utama**



**Komoditas Impor Utama**

Produk migas, rokok, bahan-bahan  
konstruksi





# INDONESIA

## Nama Resmi

Republic of Indonesia

## Nama Lokal

Republik Indonesia

## Ibukota

Jakarta

## Tanggal Kemerdekaan

**17/08/1945**

## Bentuk Pemerintahan

Republik

## Kepala Negara

Presiden

## Kepala Pemerintahan

Presiden

## Mata Uang

Rupiah

## KONDISI GEOGRAFIS

### Luas Wilayah

**1.904.569** Km<sup>2</sup>

### Perbatasan

Samudera India, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Palau, Vietnam

## DEMOGRAFI

### Jumlah Penduduk

**260.580.739** jiwa

(Estimasi Juli 2017)

### Tingkat Pertumbuhan Penduduk

**0.95%** (Estimasi 2014)

## DEMOGRAFI

### Kelompok Etnis

Estimasi 2010

**40.1%** Jawa

**15.5%** Sunda

**3.7%** Malay

**3.6%** Batak

**3%** Madura

**2.9%** Betawi

**2.7%** Minangkabau

**2.7%** Bugis

**2%** Banten

**1.7%** Banjar

**1.7%** Bali

**1.4%** Aceh

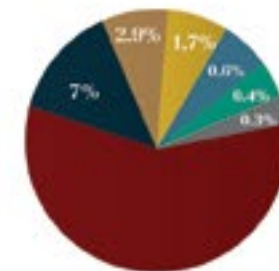
**1.4%** Dayak

**1.3%** Sasak

**1.2%** Cina

**15%** Lainnya

### Agama (Estimasi 2010)



Islam Kristen Katolik Hindu  
Budha Konghucu Lainnya

### Bahasa

Bahasa Indonesia (resmi),  
Jawa, Inggris, bahasa lokal

## EKONOMI

### Pendapatan Domestik Bruto

**\$3.208** trillion

(estimasi 2016)

### PDB per Kapita

(PPP)

**\$11.700**

(estimasi 2016)

### Total Perdagangan

- Indonesia

-

### Pertumbuhan PDB

**4.9%**

(estimasi 2016)

### Komoditas Ekspor Utama



Migas



Karet



Mesin



Bahan  
tambang



Pakaian  
jadi

### Komoditas Impor Utama

Mesin-mesin, besi dan baja, gandum





**Nama Resmi**  
*Lao People's  
Democratic Republic*

**Nama Lokal**  
Sathalanalat Paxathipatai  
Paxaxon Lao

**Ibukota**  
Vientiane

**Tanggal Kemerdekaan**

**19/07/1949**

**Bentuk Pemerintahan**  
Republik sosialis

**Kepala Negara**  
Presiden

**Kepala Pemerintahan**  
Perdana Menteri

**Mata Uang**  
Kip

## KONDISI GEOGRAFIS

**Luas Wilayah**  
**236.800** Km<sup>2</sup>

**Perbatasan**  
Myanmar, Tiongkok  
(PRT), Vietnam,  
Kamboja, Thailand

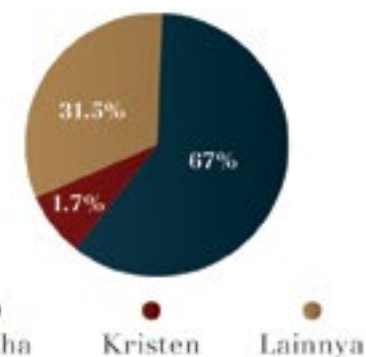


## DEMOGRAFI

**Kelompok Etnis**



**Agama**



**Bahasa**  
Khmer (Resmi), Perancis  
dan Inggris

## EKONOMI

**Pendapatan Domestik Bruto**

**\$40.96** billion  
(estimasi 2016)

**PDB per Kapita  
(PPP)**

**\$5.700**  
(estimasi 2016)

**Total Perdagangan  
- Indonesia**

**US\$ 10.071** ribu  
(2017)

**Pertumbuhan PDB**

**7.5%**  
(estimasi 2016)

**Komoditas Ekspor Utama**



**Komoditas Impor Utama**

mesin-mesin, kendaraan, bahan  
bakar, barang konsumsi





**Nama Resmi**  
Malaysia

**Nama Lokal**  
Malaysia

**Ibukota**  
Kuala Lumpur

**Tanggal Kemerdekaan**

**31/08/1957**

**Bentuk Pemerintahan**

Federal Monarki  
Konstitusional

**Kepala Negara**  
Raja

**Kepala Pemerintahan**  
Perdana Menteri

**Mata Uang**  
Ringgit

## KONDISI GEOGRAFIS

**Luas Wilayah**

**329.487** Km<sup>2</sup>

**Perbatasan**

Laut Cina Selatan, Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina

## DEMOGRAFI

**Jumlah Penduduk**

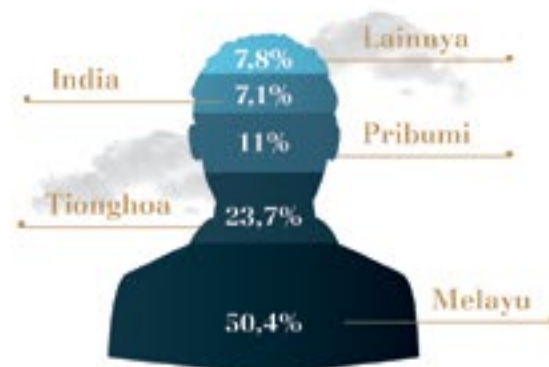
**31.381.992** jiwa  
(Estimasi Juli 2017)

**Tingkat Pertumbuhan Penduduk**

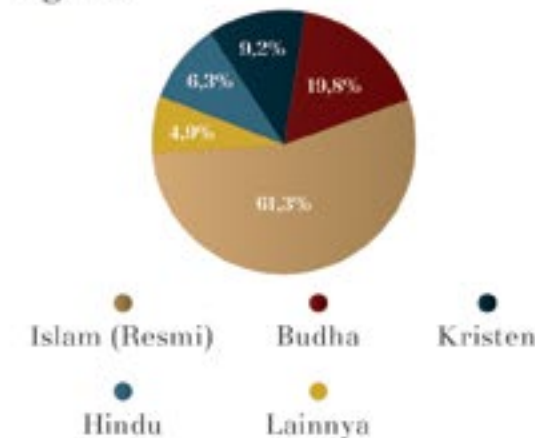
**1.47%** (Estimasi 2014)

## DEMOGRAFI

**Kelompok Etnis**



**Agama**



**Bahasa**

Melayu (Resmi), Inggris, Mandarin

## EKONOMI

**Pendapatan Domestik Bruto**

**US\$ 863.8** Milyar  
(Estimasi 2016)

**PDB per Kapita  
(PPP)**

**US\$ 27.000**  
(estimasi 2016)

**Total Perdagangan  
- Indonesia**

**US\$14.132.952,5**  
ribu (estimasi 2016)

**Pertumbuhan PDB**

**4.3%**  
(estimasi 2016)

**Komoditas Ekspor Utama**



**Komoditas Impor Utama**

elektronik, mesin-mesin, plastic, kendaraan, besi dan baja





# MYANMAR

## Nama Resmi

Republic of the Union  
of Myanmar

## Nama Lokal

Pyidaunzu Thanmāda  
Myāma Nainngandaw

## Ibukota

Naypyidaw

## Tanggal Kemerdekaan

**04/01/1948**

## Bentuk Pemerintahan

Junta militer

## Kepala Negara

Presiden

## Kepala Pemerintahan

Presiden

## Mata Uang

Kyat

## KONDISI GEOGRAFIS

### Luas Wilayah

**676.578** Km<sup>2</sup>

### Perbatasan

India, Bangladesh,  
Tiongkok (PRC),  
Laos, Thailand

## DEMOGRAFI

### Jumlah Penduduk

**56.890.418** jiwa  
(Estimasi 2016)

### Tingkat Pertumbuhan Penduduk

**1<sup>o</sup>** (Estimasi 2016)

## DEMOGRAFI

### Kelompok Etnis

Estimasi 2010

**68<sup>o</sup>** Burma

**9<sup>o</sup>** Shan

**7<sup>o</sup>** Karen

**3,5<sup>o</sup>** Rakhine

**2,5<sup>o</sup>** Tionghoa

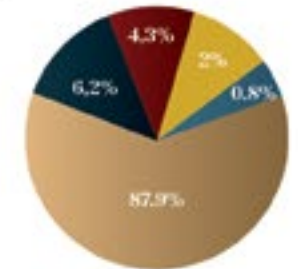
**2<sup>o</sup>** Mon

**1,5<sup>o</sup>** Kachin

**1<sup>o</sup>** Chin

**2,5<sup>o</sup>** Lainnya

## Agama



Budha

Kristen

Islam

Animisme

Lainnya

## Bahasa

Burma (resmi) dan beberapa  
bahasa etnis minoritas

## EKONOMI

### Pendapatan Domestik Bruto

**US\$ 311,1** milyar  
(estimasi 2016)

### PDB per Kapita (PPP)

**US\$ 6.000**  
(estimasi 2016)

### Total Perdagangan - Indonesia

**US\$ 729.023,1**  
ribu (2016)

### Pertumbuhan PDB

**8,1%**  
(estimasi 2016)

### Komoditas Ekspor Utama



### Komoditas Impor Utama

kain, produk minyak bumi, pupuk,  
plastik, mesin, alat transportasi,  
bahan bangunan, produk makanan





# FILIPINA

## Nama Resmi

Republic of the Philippines

## Nama Lokal

Republika ng Pilipinas

## Ibukota

Manila

## Tanggal Kemerdekaan

**04/07/1946**

## Bentuk Pemerintahan

Republik

## Kepala Negara

Presiden

## Kepala Pemerintahan

Presiden

## Mata Uang

Peso

## KONDISI GEOGRAFIS

### Luas Wilayah

**300.000** Km<sup>2</sup>

### Perbatasan

Malaysia,  
Indonesia, Tiongkok  
(PRC), Palau



## DEMOGRAFI

### Kelompok Etnis

Estimasi 2010

**28.1%** Tagalog

**13.1%** Cebuano

**9%** Ilocano

**7.6%** Bisaya/Binisaya

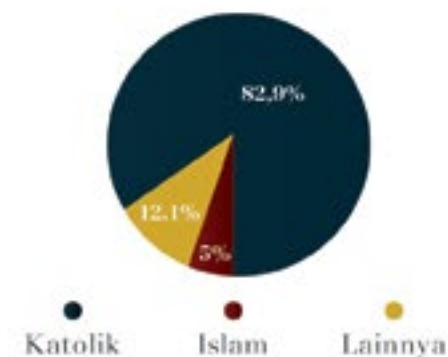
**7.5%** Iligaynon Ilonggo

**6%** Bikol

**3.4%** Waray

**25.3%** Lainnya

### Agama



### Bahasa

Filipino/Tagalog (resmi),  
Inggris

## EKONOMI

### Pendapatan Domestik Bruto

**US\$ 801,9** milyar

(estimasi 2016)

### PDB per Kapita

(PPP)

**US\$ 7.700**

(estimasi 2016)

### Total Perdagangan

- Indonesia

**US\$ 6.092.678,9**

ribu (2016)

### Pertumbuhan PDB

**6.4%**

(estimasi 2016)

### Komoditas Ekspor Utama



### Komoditas Impor Utama

produk elektronik, mesin besi dan baja, kain tekstil, bahan kimia, plastik





**Nama Resmi**  
Republic of Singapore

**Nama Lokal**  
Republic of Singapore

**Ibukota**  
Singapore

**Tanggal Kemerdekaan**  
**09/08/1965**

**Bentuk Pemerintahan**  
Republik Parlementer

**Kepala Negara**  
Presiden

**Kepala Pemerintahan**  
Perdana Menteri

**Mata Uang**  
Singapore Dollar

## KONDISI GEOGRAFIS

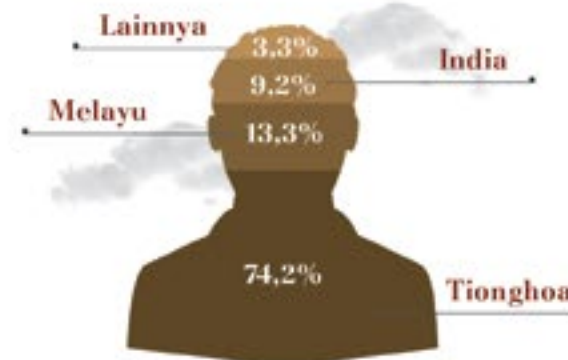
**Luas Wilayah**  
**697** Km<sup>2</sup>

**Perbatasan**  
Indonesia, Malaysia

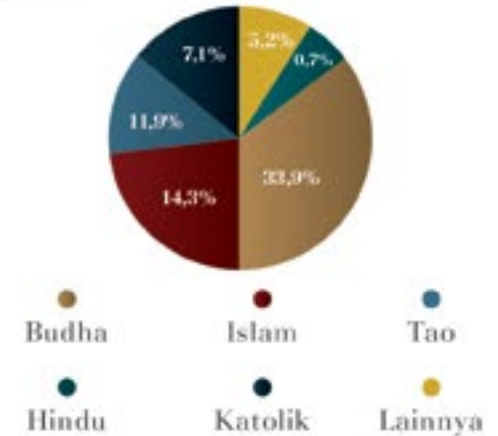


## DEMOGRAFI

**Kelompok Etnis**  
Estimasi 2010



## Agama



## Bahasa

4 bahasa resmi; Mandarin, Inggris, Melayu, Tamil

## EKONOMI

**Pendapatan Domestik Bruto**  
**US\$ 486.9** milyar  
(estimasi 2016)

**PDB per Kapita (PPP)**

**US\$ 87.100**  
(estimasi 2016)

**Total Perdagangan - Indonesia**

**US\$ 25.794.730,4**  
ribu (2016)

## Pertumbuhan PDB

**1,7%**  
(estimasi 2017)

## Komoditas Ekspor Utama



## Komoditas Impor Utama

mesin dan peralatan, bahan bakar mineral, bahan kimia, bahan makanan, barang-barang konsumsi





# THAILAND

## Nama Resmi

Kingdom of Thailand

## Nama Lokal

Ratcha Anachak Thai

## Ibukota

Bangkok

## Tanggal Kemerdekaan

Tidak pernah dikolonisasi

## Bentuk Pemerintahan

Monarki Konstitusional

## Kepala Negara

Raja

## Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri

## Mata Uang

Baht

## KONDISI GEOGRAFIS

### Luas Wilayah

**513.120** Km<sup>2</sup>

### Perbatasan

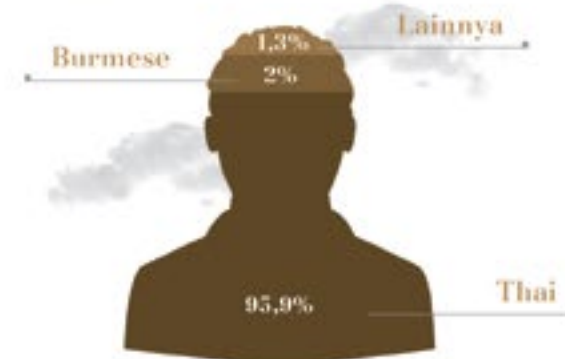
Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, India, Vietnam, Indonesia



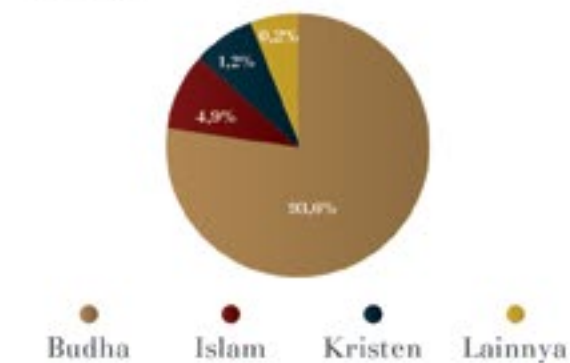
## DEMOGRAFI

### Kelompok Etnis

Estimasi 2010



### Agama



### Bahasa

Thai (resmi), Inggris

## EKONOMI

### Pendapatan Domestik Bruto

**US\$ 1.161** milyar

(estimasi 2016)

### PDB per Kapita

(PPP)

**US\$ 16.800**

(estimasi 2016)

### Total Perdagangan

- Indonesia

**US\$ 14.059.333.3**

ribu (2016)

### Pertumbuhan PDB

**3.2%**

(estimasi 2017)

### Komoditas Ekspor Utama



### Komoditas Impor Utama

barang setengah jadi dan bahan baku, barang-barang konsumsi, bahan bakar





#### Nama Resmi

*Socialist Republic of Vietnam*

#### Nama Lokal

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

#### Ibukota

Hanoi

#### Tanggal Kemerdekaan

Tidak pernah dikolonisasi

#### Bentuk Pemerintahan

Republik Sosialis Komunis

#### Kepala Negara

Presiden

#### Kepala Pemerintahan

Perdana Menteri

#### Mata Uang

Dong

## KONDISI GEOGRAFIS

#### Luas Wilayah

**331,210** Km<sup>2</sup>

#### Perbatasan

Tiongkok (PRC), Laos, Kamboja, Laut Cina Selatan

## DEMOGRAFI

#### Jumlah Penduduk

**96.160.163** jiwa  
(Estimasi Juli 2017)

#### Tingkat Pertumbuhan Penduduk

**0.95%** (Estimasi 2014)

## DEMOGRAFI

#### Kelompok Etnis

Estimasi 2010

**85.7%** Kinh (Viet)

**1.9%** Tay

**1.8%** Thai

**1.5%** Mounng

**1.5%** Khmer

**1.2%** Mong

**1.1%** Nung

**5.3%** Lainnya

#### Agama

**7.9%** Budha

**6.6%** Katolik

**1.7%** Hoa Hao

**0.9%** Cao Dai

**0.9%** Protestan

**0.1%** Islam

**81.8%** Ateis

#### Bahasa

Vietnam (resmi), Inggris, Perancis, Mandarin, Khmer

## EKONOMI

#### Produk Domestik Bruto

**US\$ 594.9** milyar  
(estimasi 2016)

#### PDB per Kapita (PPP)

**US\$ 6.400**  
(estimasi 2016)

#### Total Perdagangan - Indonesia

**US\$ 6.273.898,6**  
ribu (2016)

#### Pertumbuhan PDB

**6.3%**  
(estimasi 2017)

#### Komoditas Ekspor Utama



Pakaian



Sepatu



Hasil laut



Minyak mentah



Elektronik



Produk kayu



Beras



Mesin

#### Komoditas Impor Utama

mesin dan peralatan, produk minyak bumi, produk baja, bahan baku untuk industri pakaian dan sepatu, elektronik, plastik, mobil



## A

Arsitektur Kawasan | 20, 21, 32

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) | 25

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center) | 34, 73

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) | 22

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) | 29

ASEAN Maritime Forum | 26

ASEAN Peace Keeping Center's Network (APCN) | 24

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025; | 35, 53

ASEAN Minerals Cooperation Action Plan (AMCAP) 2016-2025, Phase 1; | 35

ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (APASTI 2016-2025) | 35, 48, 55, 71

ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC) | 24

AEC 2025 Strategic Action Plans (SAPs) for Financial Integration 2016-2025 | 35

ASEAN Standards and Conformance Strategic Plan 2016-2025; | 35

ASEAN Competition Action Plan 2016-2025 | 35

ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection 2016-2025; | 35

ASEAN Intellectual Property Rights (IPR) Action Plan 2016-2025; | 35

ASEAN Community Statistical System (ACSS) Strategic Plan 2016-2025; | 35

ASEAN Work Plan for Enhancing the Global Value Chain Agenda; | 35

ASEAN ICT Masterplan 2020 | 35

ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025, Phase 1 | 35

Agreement on the Establishment of Regional Secretariat on the Implementation of MRA TP | 53, 54

ASEAN Free Trade Area (AFTA) | 36, 128

ASEAN Agreement on Custom | 36

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) | 36

ASEAN Solutions for Investments, Services, and Trade (ASSIST) | 36

ASEAN Trade Repository (ATR) | 38

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) | 37, 38

ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) | 38

ASEAN Architects (AA) | 39

ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (MNP) | 39

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) | 41

ASEAN Investment Area (AIA) Council | 41

ASEAN Single Window | 41

ASEAN Connectivity for Trade and Investment (US-ACTI) | 41

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) | 43, 44

ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) | 45

ASEAN Transport Ministerial (ATM) | 47

ASEAN Open Sky Policy | 47

ASEAN Single Aviation Market (ASAM) | 48

ASEAN Highway Network (AHN) | 48

ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) | 48

ASEAN Power Grid | 48

ASEAN Petroleum Security Agreement Coordinated Emergency Response Measures (APSA CERM) | 49

ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) | 35, 48

ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) | 49

ASEAN Food Security Information System (AFSIS) | 49

ASEAN Plus Three Comprehensive Strategy on Food Security and Bioenergy Development beserta Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) 2011-2013 | 49

ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (APTERR) | 49

ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) | 49

ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) | 49

ASEAN Working Group on Small and Medium Enterprises Agencies | 52

ASEAN Strategic Action Plan for SME Development (SAP SMED) | 52

ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME) | 52

ASEAN Business Incubator Network (ABINet) | 52

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) | 35, 53

ASEAN ICT Masterplan | 35, 54, 55

ASEAN Telecommunications and IT Senior Officials Meeting (TELSOM) | 54

ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC) | 54

ASEAN Personal Data Protection Framework | 55

ASEAN Framework on Security | 55

ASEAN Cyber Wellness Training of Tutors | 55

ASEAN Plan of Action on Science and Technology (APASTI) | 55

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area Agreement (AANZFTA) | 57

AANZFTA Economic Cooperation Support Programme (AECSP) | 57

ASEAN – China FTA | 57

ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA) | 59

AIFTA Trade In Goods (TIG) Agreement | 59

ASEAN-India Trade in Services Agreement | 59

ASEAN-India Investment Agreement ASEAN Economic Ministers Meeting | 59

ASEAN-India Fund | 60, 108

ASEAN-ROK Free Trade Agreement (AKFTA) | 61

|          |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b> | <i>Broad directions for Customs 2016-2025</i>   35                                  | <i>Development and OTT Expansion</i>   55                                                                                                   |
|          | <i>Business Visitor</i>   40                                                        | <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India</i>   59                                               |
|          | <i>Bilateral Investment Treaty</i>   60                                             | <i>Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan General Exception List (GEL)</i>   61                           |
| <b>C</b> |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|          | <i>Common Effective Preferential Tariff (CEPT)</i>   36                             |                                                                                                                                             |
|          | <i>Coordinating Committee on ATIGA (CCA)</i>   36                                   |                                                                                                                                             |
|          | <i>Coordinating Committee on Services (CCS)</i>   37                                |                                                                                                                                             |
|          | <i>Contractual Service Supplier</i>   40                                            |                                                                                                                                             |
|          | <i>Coordinating Committee on Investment (CCI)</i>   41                              |                                                                                                                                             |
|          | <i>Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM)</i>   43                        |                                                                                                                                             |
|          | <i>Committee on Science and Technology</i>   55, 71                                 |                                                                                                                                             |
| <b>D</b> |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|          | <i>Digital Innovation</i>   45                                                      |                                                                                                                                             |
|          | <i>Daftar Negatif Investasi (DNI)</i>   38                                          |                                                                                                                                             |
| <b>E</b> |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|          | <i>Entry into force (EIF)</i>   41, 59                                              |                                                                                                                                             |
|          | <i>Energi</i>   48, 71, 90, 99, 112, 135, 136, 137                                  |                                                                                                                                             |
| <b>F</b> |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|          | <i>Foreign equity participation (FEP)</i>   38                                      |                                                                                                                                             |
|          | <i>Financial stability</i>   41                                                     |                                                                                                                                             |
|          | <i>Financial inclusiveness</i>   41                                                 |                                                                                                                                             |
|          | <i>Financial safety net</i>   42                                                    |                                                                                                                                             |
|          | <i>Framework for Infrastructure Investment to Balance Policy Goals of Broadband</i> |                                                                                                                                             |
|          |                                                                                     | <i>High Sensitive List (HSL)</i>   36                                                                                                       |
|          |                                                                                     | <i>2016-2025 Investment Work Programme</i>   35                                                                                             |
|          |                                                                                     | <i>International best practices</i>   35                                                                                                    |
|          |                                                                                     | <i>ICT in the Single Market</i>   55                                                                                                        |
|          |                                                                                     | <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)</i>   26, 27, 29, 33                                                                  |
|          |                                                                                     | <i>Information Security and Assurance</i>   55                                                                                              |
|          |                                                                                     | <i>Intra Corporate Transferee</i>   40                                                                                                      |
|          |                                                                                     | <i>Investasi</i>   38, 39, 40, 41, 47, 57, 59, 61, 83, 86, 92, 97, 99, 102, 105, 108, 112, 115, 117, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 134, 140 |
|          |                                                                                     | <b>J</b>                                                                                                                                    |
|          |                                                                                     | <i>Jasa Keuangan</i>   38, 41, 43, 45                                                                                                       |
|          |                                                                                     | <i>Joint ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors</i>   42                                                                        |
|          |                                                                                     | <b>K</b>                                                                                                                                    |
|          |                                                                                     | <i>Kejahatan Lintas Negara</i>   19, 24, 25, 97                                                                                             |
|          |                                                                                     | <i>Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025</i>   35                                                                                 |
|          |                                                                                     | <i>Keuangan inklusif</i>   42                                                                                                               |
|          |                                                                                     | <i>Konektivitas</i>   35, 45, 46, 48, 49, 56, 71, 90, 96,                                                                                   |

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 102, 107, 110, 114, 115, 119, 123, 126, 127, 135, 136, 140                                            |  |
| <b>L</b>                                                                                              |  |
| <i>Laut China Selatan</i>   20, 21, 30                                                                |  |
| <i>Laos-Thailand-Malaysia-Singapura Power Integration Project (LTMS-PIP)</i>   48                     |  |
| <b>M</b>                                                                                              |  |
| <i>Maritime Security</i>   22, 27, 29, 130, 142                                                       |  |
| <i>Maritime Safety</i>   29                                                                           |  |
| <i>Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025</i>   35, 56                                                   |  |
| <i>Mutual Recognition Agreement (MRA)</i>   38                                                        |  |
| <i>Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance</i>   41                                 |  |
| <i>Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025</i>   45                                             |  |
| <b>N</b>                                                                                              |  |
| <i>Non-Tariff Barriers (NTB)</i>   36                                                                 |  |
| <i>National Trade Repository</i>   37                                                                 |  |
| <i>National treatment (NT)</i>   38                                                                   |  |
| <i>New Media and Content</i>   55                                                                     |  |
| <b>P</b>                                                                                              |  |
| <i>Perdagangan Barang</i>   36, 37, 41, 57, 61                                                        |  |
| <i>Positive list</i>   40                                                                             |  |
| <i>Perdagangan Jasa</i>   37, 38, 59                                                                  |  |
| <i>Protocol to Implement the Seventh Package of Financial Services Commitments</i>   42               |  |
| <i>People Mobility</i>   47                                                                           |  |
| <i>People-to-people</i>   45, 56, 57, 66, 67, 71, 90, 94, 99, 107, 114, 115 123, 126, 128             |  |
| <i>Pangan</i>   21, 27, 49, 50, 123, 126, 129, 133, 136, 140                                          |  |
| <i>Pariwisata</i>   38, 53, 90, 92, 105, 112, 115, 117, 121, 123, 124, 125, 128, 129 133, 134         |  |
| <i>Perikanan</i>   27, 29, 50, 52                                                                     |  |
| <b>R</b>                                                                                              |  |
| <i>Rules of origin (ROO)</i>   36                                                                     |  |
| <i>Registered Foreign Professional Engineer (RFPE)</i>   38                                           |  |
| <i>Regulatory Excellence</i>   46                                                                     |  |
| <i>Roll-on/Roll-off (RoRo)</i>   47                                                                   |  |
| <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>   62                                        |  |
| <b>S</b>                                                                                              |  |
| <i>South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)</i>   20                                        |  |
| <i>Sekretariat Nasional ASEAN</i>   13                                                                |  |
| <i>Sekretariat ASEAN</i>   12, 45, 83, 97, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 136, 143, 151, 155 |  |
| <i>Strategic Action Plan for Trade in Goods 2016-2025</i>   35                                        |  |
| <i>Strategic Action Plan for Services 2016-2025</i>   35                                              |  |
| <i>Sensitive List (SL)</i>   36                                                                       |  |
| <i>Strategic Action Plan (SAP) Trade in Goods (TIG)</i>   35                                          |  |
| <i>Schedule of Commitment (SoC)</i>   40                                                              |  |
| <i>Sustainable Infrastructure</i>   45                                                                |  |
| <i>Seamless Logistics</i>   46                                                                        |  |



Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) | 48

Statement on Food Security in the ASEAN Region | 49

Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS) | 49

Southeast Asia Fisheries Development Center (SEAFDEC) | 50

Strategic Plan of Action (SPA) for ASEAN Cooperation on Fisheries (2016-2020) | 50

Strategic thrust | 54, 55

Sanitary and Phytosanitary (SPS) | 61

Sains, teknologi, dan inovasi (STI) | 55, 56

T

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) | 20, 21

Transnational Crime | 24, 25, 26, 29, 32, 84

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | 25

Terorisme | 25, 33, 92, 96, 97, 99, 105, 119, 125, 137

The Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry (2016-2025) | 35

Tenaga Kerja Terampil | 38, 39

Transposisi tarif | 36

Trade facilitation | 41

Trans ASEAN Gas Pipeline | 48

Technical Barriers to Trade (TBT) | 61

Tariff Finder | 37

Transportasi | 25, 38, 46, 47, 48, 68, 96, 105, 112, 126, 134

Telekomunikasi dan teknologi informasi | 54

U

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) | 45

W

Working Committee on ASEAN Financial Service Liberalisation (WCFSL) AFAS | 41

# #aseanadalahkita



Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
2017



Ayo Kenali ASEAN



<http://setnas-asean.id>

ISBN 978-602-81111-1-1

